



Prof. Dr. Ir. Sutawi, M.P.

Wacana

AGRIBISNIS

Pertanian dan Peternakan



x x x
x x
x

WACANA

AGRIBISNIS

PERTANIAN DAN PETERNAKAN

Oleh:

Prof. Dr. Ir. Sutawi, M.P.



Zahra Publisher Group

Wacana Agribisnis Pertanian dan Perternakan
Penulis : Prof. Dr. Ir. Sutawi, M.P.

ISBN : 978-623-424-038-2

Editor: Tim Zahra Publisher Group
Penata Letak: Tim Zahra Publisher Group
Desain Sampul: Tim Zahra Publisher Group

Copyright © Zahra, 2020,
162 hlm; 14,8 x 21 cm
Cetakan Pertama, Februari 2022

Diterbitkan oleh
CV. Zahra Publisher Group
Jl. Lesanpuro II No. 554a
Kota Malang, Jawa Timur
Email: zahra.publisher@gmail.com
Whatsapp: 08986373557

Dicetak dan Didistribusikan oleh
CV. Zahra Publisher Group

Barangsiapa dengan sengaja atau tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) atau pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

KATA PENGANTAR

Ilmu yang bermanfaat, yaitu ilmu yang diamalkan dan diajarkan kepada orang lain, merupakan salah satu dari tiga amal jariyah (HR Muslim 3084). Amal jariyah merupakan perbuatan baik seseorang yang tidak akan terputus pahalanya meski ia telah meninggal. Al-Hafidz Ibnu Al-Jauzi rahimahullahu ta'ala berkata, “Barangsiapa ingin amalannya tidak terputus setelah kematiannya, maka hendaklah ia menyebarkan ilmu.” Menyebarkan ilmu dapat dilakukan melalui berbagai cara, baik langsung maupun melalui media. Buku merupakan salah satu media yang populer dalam menyebarkan ilmu pengetahuan.

Pertanian dan peternakan merupakan sumber ilmu pengetahuan yang tergolong paling tua dan tidak pernah kering sepanjang masa. Pertanian dan peternakan merupakan penghasil makanan pokok yang wajib ada sepanjang sejarah kehidupan manusia. Dalam proses produksi, distribusi, dan konsumsi, pertanian dan peternakan mengalami berbagai dinamika yang selalu menarik untuk sekedar diperbincangkan, didiskusikan, ditulis, sampai dibukukan.

Puji syukur alhamdulillah, penulis panjatkan ke hadirat Allah swt atas terbitnya buku berjudul “Wacana Agribisnis Pertanian dan Peternakan” ini. Buku ini merupakan kompilasi 22 karya tulis terpilih tentang agribisnis pertanian dan peternakan yang terbit di berbagai media massa sejak 2014 sampai 2021. Karya-karya tulis ini menyoroti peristiwa-peristiwa pertanian dan peternakan yang sempat menjadi sorotan pada waktunya. Semoga karya tulis ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

Malang, 22-02-2022

Penulis,

Prof. Dr. Ir. Sutawi, M.P.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi.....	iii
1 Pertanian Riwayatmu Kini	1
2 Darurat Pangan Masa New Normal	7
3 Kontribusi Pertanian pada Era New Normal.....	13
4 Food Estate: Ketahanan Pangan Ketahanan Nasional.....	19
5 Menhan, Food Estate dan Pesawat Tempur	26
6 Ironis, Bangsa Tempe Impor Kedelai.....	33
7 Pupuk Bersubsidi Langka, Petani Merana	40
8 Cabai Rawit Semakin Pahit.....	47
9 Importasi Beras, Marjinalisasi dan Kemiskinan Petani.....	53
10 Harga Jagung Melambung, Peternak Limbung.....	60
11 Pemberdayaan Petani Milenial.....	66
12 Koperasi di Tangan Generasi Milenial.....	73
13 Kedaulatan Pangan Hasil Peternakan.....	80
14 Dinamika di Pasar Hewan	86
15 Empat Sehat Lima Sampoerna	93
16 Salah Gizi: Kurang Protein Banyak Nikotin	99

17	Peternak Ayam Bahagia	105
18	Idul Kurban untuk Ketahanan Pangan	114
19	Berapakah Data Konsumsi Daging ?	120
20	Ketahanan Pangan Produk Peternakan Masa Pandemi Covid-19	133
21	Mengapa Impor Daging Sapi Terus Meningkat ?	144
22	Stunting dan Fenomena Salah Gizi	151
	Daftar Pustaka	158
	Biodata Penulis.....	161



1.

PERTANIAN RIWAYATMU KINI

Pertanian adalah sumber kehidupan. Sebanyak 265 juta penduduk Indonesia dan 7,7 milyar penduduk dunia hidup dengan mengonsumsi hasil-hasil pertanian, seperti beras, jagung, gandum, kedelai, sagu, ubi, singkong, sayur-mayur, buah-buahan, rempah-rempah, daging, telur, susu, ikan, dan sebagainya. Pertanian juga sumber penghidupan. Sebanyak 38,70 juta penduduk Indonesia dan ratusan juta penduduk memperoleh penghasilan baik langsung maupun tidak langsung dari usaha-usaha di bidang pertanian, seperti petani, pekebun, peladang, petambak, nelayan, peternak, pekerja, penyuluh, pengangkut, pemodal, pengolah, dan pedagang hasil-hasil pertanian. Pendek kata, pertanian adalah sumber kehidupan dan penghidupan utama umat manusia di dunia.

Zaman Orde Baru pertanian adalah sektor andalan. Perhatian pemerintah Indonesia terhadap petani dan

pertanian sangat besar. Atas keberhasilan mencapai swasembada pangan pada 1989, Presiden Soeharto mendapat penghargaan tertinggi dari Organisasi Pangan Dunia atau *Food and Agricultural Organisation* (FAO). Zaman telah berubah, era pertanian semakin ketinggalan jaman. Masa depan pertanian berada di persimpangan jalan. Rakhmat Hadi Saputro (2003) mengungkap tentang “1001 Masalah Petani”, empat belas masalah utama adalah: (1) Regenerasi petani terancam lambat/gagal, (2) Sulit mencari tenaga kerja/buruh tani, (3) Mayoritas masih mengandalkan teknologi tradisional, (4) Irigasi tidak mendukung, (5) Serangan hama dan penyakit mengancam dari awal tanam sampai menjelang panen, (6) Harga sarana produksi cenderung naik, (7) Harga hasil panen dikendalikan tengkulak, (8) Dukungan pemerintah sangat kurang, (9) Bulog tidak mendukung petani, (10) Ancaman gagal panen, (11) Kekurangan modal, (12) Sulit mendapat akses ke bank, (13) Terjerat rentenir setiap saat, dan (14) Alih fungsi lahan sangat cepat.

“Seribu satu” masalah yang diderita petani mengakibatkan pertanian mulai ditinggalkan oleh generasi tua, apalagi generasi mudanya. Tidak ada lagi petani yang

mendidik anak-anaknya menjadi petani. Juga tidak ada generasi muda yang bercita-cita menjadi petani, bahkan di kalangan sarjana pertanian itu sendiri. Sensus Pertanian 2013 mencatat jumlah petani muda berusia di bawah 34 tahun hanya 3,35 juta (8,66%), sedangkan petani tua berusia lebih dari 55 tahun berjumlah 8,55 juta (22,09%). Jumlah petani muda tersebut menyusut 3,4% per tahun, lebih cepat dibanding petani tua yang menyusut hanya 0,5% per tahun. Selain masalah usia yang menua, masalah petani Indonesia juga tingkat pendidikan yang rendah. Sebanyak 72,6% tenaga kerja sektor pertanian hanya berpendidikan SD, bahkan tidak tamat SD. Tampak jelas bahwa petani saat ini adalah angkatan kerja usia tua yang telah melewati usia produktif dan berpendidikan rendah, sedangkan sisanya adalah sedikit kaum muda yang terpaksa bertani karena kalah bersaing mendapat pekerjaan lain yang diidamkan.

Panas, hujan, kotor, kerja keras siang malam, risiko yang besar, dan penghasilan pas-pasan, merupakan alasan utama generasi muda enggan berprofesi sebagai petani. BPS (2017) mencatat penghasilan petani padi hanya Rp 1,238 juta/bulan, jagung 1,047 juta/bulan, kacang tanah Rp 1,052 juta/bulan, ubi kayu Rp 869 ribu/bulan, kacang hijau Rp 469

ribu/bulan, dan kedelai Rp 307 ribu/bulan, jauh di bawah UMK Jawa Timur Rp 1,7-3,8 juta/bulan. Bagi generasi muda, bekerja sebagai pengemudi ojek online, pedagang kaki lima (PKL), buruh pabrik di kota-kota besar, atau menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri, jauh lebih bergengsi daripada menjadi petani di perdesaan. Bagi mereka, “hujan emas di negeri orang” tetap lebih menarik daripada “hujan batu di negeri sendiri”. Tidak mengherankan jika di daerah-daerah perdesaan mulai sepi dari kegiatan pertanian dan ditinggalkan generasi mudanya.

Tekad pemerintah Orde Reformasi selama 20 tahun terakhir untuk mengembalikan arti penting pertanian sebagai sumber kehidupan dan penghidupan utama bangsa Indonesia semakin jauh dari harapan. Keberhasilan Orde Baru mencapai swasembada pangan pada 1989 adalah berkat keseriusan menggarap sektor pertanian dengan anggaran hingga 17% dari APBN. Namun, dengan alokasi anggaran untuk Kementerian Pertanian beberapa tahun terakhir yang hanya 1% dalam APBN (Rp 20-an triliun) per tahun, tampaknya sangat sulit bagi Indonesia untuk mencapai swasembada pangan, khususnya beras, jagung, kedelai, gula, dan daging sapi.

Indonesia kini mulai terancam krisis pangan. Produksi sejumlah bahan pangan tidak mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri. Bahan pangan impor kemudian menjadi andalan. Tidak perlu bersusah payah menggenjot produksi, karena pangan impor murah tersedia melimpah ruah di pasaran. Saat ini ketergantungan Indonesia pada pangan impor mencapai 100% untuk gandum (11,8 juta ton/tahun), 78% kedelai (2,2 juta ton/tahun), 10% jagung (2,3 juta ton/tahun), 67% gula (3,8 juta ton/tahun). Selama lima tahun terakhir (2014-2018) defisit neraca perdagangan tanaman pangan mencapai rata-rata USD 6,84 milyar per tahun. Ini berarti sebanyak Rp 95,76 triliun devisa negara terkuras untuk mengimpor pangan setiap tahun. Ketergantungan pangan impor pada masa mendatang diperkirakan semakin besar karena terjadi kemerosotan produksi, utamanya akibat akibat konversi lahan pertanian. Secara nasional 100.000 ha lahan pertanian produktif setiap tahun beralih fungsi menjadi perumahan, pertokoan, sarana pendidikan, jalan, pabrik, tempat hiburan, tempat wisata, pasar, dan mall.

Tanpa dukungan petani muda yang terdidik dan anggaran pembangunan pertanian yang memadai, maka

nasib pertanian akan semakin terpuruk dan cita-cita mewujudkan swasembada, ketahanan, kemandirian, dan kedaulatan pangan hanya akan menjadi slogan belaka. (*)

Malang Post, Sabtu 21 Sep 2019



2.

DARURAT PANGAN PADA MASA *NEW NORMAL*

Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang melanda Indonesia sejak 2 Maret 2020 berdampak negatif terhadap kesehatan, perekonomian, dan ketahanan pangan (*food security*). Indeks Ketahanan Pangan Indonesia tahun 2019 mencatat skor 62,6, meningkat dari 54,8 (2018), dan membawa Indonesia ke posisi 62 dunia, naik dari posisi 65 (2018). Indonesia mendapatkan skor 70,4 untuk *affordability* (keterjangkauan), skor 61,3 untuk *availability* (ketersediaan), dan 47,1 untuk *quality and safe* (*kualitas dan keamanan*). Kebijakan pemerintah kepada masyarakat untuk melakukan pekerjaan dari rumah (*working from home*), pembatasan sosial berskala besar (*PSBB*), dan menjaga jarak secara fisik dan sosial (*physical and social distancing*), serta penutupan wilayah secara terbatas (*partial lockdown*), berpotensi menimbulkan kerawanan pangan bahkan dapat

memicu darurat pangan (*food emergency*) pada masa *new normal* (tatanan baru beradaptasi dengan Covid-19).

BKP Kementan memperkirakan ketersediaan 10 bahan pangan strategis nasional untuk bulan Maret hingga Agustus 2020 mencukupi kebutuhan bahkan tercatat surplus. Beras tersedia 25,6 juta ton dari kebutuhan 15 juta ton; jagung sebanyak 13,7 juta ton dari kebutuhan 9,1 juta ton; bawang merah tersedia 1,06 juta ton dari kebutuhan 701.482 ton; bawang putih tersedia 442,5 ribu ton dari kebutuhan 311,9 ribu ton; dan cabai besar tersedia 657.467 ton dari kebutuhan 551.261 ton; dan cabai rawit tersedia 539,6 ribu ton dari kebutuhan 493,8 ribu ton. Selanjutnya, daging sapi/kerbau tersedia 517.872 ton (290.000 ton diantaranya berasal dari impor) dari kebutuhan 476.035 ton; daging ayam ras 2 juta ton dari kebutuhan 1,7 juta ton; minyak goreng 23,4 juta ton dari kebutuhan 4,4 juta ton; dan stok gula pasir yang terdapat di gudang distributor sebanyak 159.000 ton.

Perkiraan tersebut tidak menjamin bahwa Indonesia akan terbebas dari ancaman darurat pangan, karena pandemi Covid-19 belum pasti kapan akan berakhir. Menurut FAO, sebuah negara dikatakan mengalami darurat pangan jika kekurangan pasokan pangan relatif terhadap kebutuhan

konsumsinya akibat bencana alam, lingkungan, dan/atau kemanusiaan, dan karena itu membutuhkan bantuan pangan dari luar. Jika tidak ada bantuan pangan, maka cukup banyak penduduk yang akan menderita kekurangan gizi bahkan kelaparan.

Pertama, kebutuhan pangan strategis Indonesia sebagian masih bergantung pada pangan impor. Indonesia baru mampu berswasembada beras, jagung, bawang merah, cabai, daging ayam dan telur, sedangkan gula, bawang putih, dan daging sapi masih harus dicukupi dari pasokan impor. Kemampuan suatu komoditas dalam memenuhi kebutuhan domestik diketahui melalui indikator SSR (Self Sufficiency Ratio). Nilai SSR beras, jagung, bawang merah, cabai, daging ayam dan telur masing-masing sebesar 95,86%, 98,48%, 99,98%, 96,75%, 99,90, dan 99,91%. Nilai SSR tersebut menunjukkan bahwa Indonesia telah berswasembada *on-trend* beras, jagung, bawang merah, cabai, daging ayam dan telur. Pengertian swasembada *on-trend* adalah minimal 90 persen kebutuhan pangan dipenuhi dari produksi domestik, sedangkan 10 persen sisanya dipenuhi dari impor ketika pasokan dalam negeri tak mencukupi. Daging sapi, gula, dan bawang putih masing-

masing memiliki nilai SSR 83,23%, 32,02%, dan 4,5%. Nilai SSR tersebut menunjukkan bahwa Indonesia masih bergantung pada pasokan komoditas impor daging sapi 16,77%, gula 67,98%, dan bawang putih 95,5% dari kebutuhan dalam negeri.

Kedua, ketersediaan pangan menurun. Pemberlakuan PSBB, penutupan wilayah terbatas, dan jaga jarak fisik menyebabkan aktivitas sosial menurun. Bisnis terkait makanan, seperti warung, restoran, hotel, dan katering mengurangi aktivitas, bahkan tutup. Akibatnya, permintaan produk pertanian berkurang, konsumsi berkurang, harga pangan menurun, dan pendapatan petani menurun. Pada April 2020 terjadi deflasi bahan pangan -0,13% yang mengindikasikan adanya penurunan harga akibat penurunan permintaan. Pada Mei 2020 BPS mencatat NTP (Nilai Tukar Petani) sebesar 99,47 atau lebih rendah 0,85 persen dibandingkan dengan bulan April sebesar 100,32. NTP merupakan indikator pendekatan terhadap tingkat kesejahteraan petani. NTP lebih kecil dari 100, berarti pendapatan petani lebih kecil dari pengeluarannya. Dampak selanjutnya adalah produksi pertanian akan menurun, karena petani kesulitan membeli dan memperoleh sarana produksi.

Produksi pertanian diperkirakan turun 6%, tenaga kerja pertanian turun 5%, dan investasi pertanian turun 4%. Perdagangan juga mengalami penurunan karena adanya pembatasan ekspor negara-negara eksportir pangan. IFPRI (International Food Policy Research Institute) mencatat 12 negara eksportir membatasi ekspor pangan sejak 15 Mei 2020 sebagai cadangan pangan negaranya. Penurunan produksi dan perdagangan pertanian menyebabkan penurunan ketersediaan pangan.

Ketiga, gangguan keterjangkauan pangan. Pada aspek fisik, keterjangkauan pangan menghadapi masalah distribusi karena penduduk Indonesia tersebar di 17.504 pulau, sedangkan pusat produksi ada di Jawa. Pulau Jawa yang luasnya hanya 6,7% (129.438 km²) dibanding luas daratan Indonesia (1.910.931 km²) merupakan sentra produksi lebih dari 60% produksi pangan. Beberapa provinsi diperkirakan mengalami defisit pangan karena berada jauh dari daerah produksi. Saat memimpin rapat terbatas tentang antisipasi kebutuhan bahan pokok di Istana Kepresidenan Bogor (Selasa, 28/4/2020) Presiden Jokowi menyampaikan bahwa stok beras defisit di 7 provinsi, jagung defisit di 11 provinsi, cabai besar defisit di 23 provinsi, cabai rawit defisit

di 19 provinsi, bawang merah defisit di 1 provinsi, telur ayam defisit di 22 provinsi, minyak goreng cukup untuk 34 provinsi, gula pasir defisit di 30 provinsi, dan bawang putih defisit di 31 provinsi.

Keempat, konsumsi pangan menurun. Pemerintah memperkirakan sebanyak 1,8-3,78 juta orang Indonesia akan jatuh miskin dan 3,0-5,2 juta kehilangan pekerjaan selama pandemi Covid-19. Peningkatan pengangguran menyebabkan penurunan pendapatan dan daya beli, pada gilirannya akan memberi tekanan pada kualitas dan kuantitas konsumsi pangan. Konsumsi pangan diperkirakan menurun 20%. Kondisi ini berhubungan erat pertumbuhan ekonomi yang melambat. Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mencapai 5,02% pada 2019, diperkirakan menyusut menjadi 1,0% pada 2020. Penurunan 1% pertumbuhan ekonomi menyebabkan peningkatan kemiskinan dan rawan pangan sebesar 1,6% and 3,0% (Vos et al., 2020). Penyusutan ekonomi Indonesia menyebabkan jumlah penduduk miskin dan rawan pangan diperkirakan meningkat 6,9-9,9% (Hermanto, 2020).***

Malang Post, 2 Juli 2020



3.

KONTRIBUSI PERTANIAN PADA MASA NEW NORMAL

Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang melanda Indonesia sejak 2 Maret 2020 tidak hanya berdampak negatif terhadap kesehatan, tetapi juga perekonomian dan ketahanan pangan. Sampai 1 Juli 2020 jumlah penderita terkonfirmasi positif Covid-19 sebanyak 57.770 kasus dan meninggal 2.934 orang. Ini berarti setiap hari rata-rata sebanyak 474 orang terjangkit dan 24 orang meninggal akibat Covid-19. Kebijakan pemerintah kepada masyarakat untuk melakukan pekerjaan dari rumah (*working from home*), pembatasan sosial berskala besar (*PSBB*), dan menjaga jarak secara fisik dan sosial (*physical and social distancing*), serta penutupan wilayah secara terbatas (*partial lockdown*), telah menyebabkan penurunan pertumbuhan ekonomi dan mengganggu ketahanan pangan (*food security*)

pada masa *new normal* (tatanan baru beradaptasi dengan Covid-19).

Pada perekonomian, pandemic Covid-19 menyebabkan jumlah pengangguran melonjak. Pemerintah memperkirakan sebanyak 3,0-5,2 juta kehilangan pekerjaan dan 1,8-3,78 juta orang Indonesia akan jatuh miskin selama pandemi Covid-19. Studi yang dilakukan oleh ekonom Arthur Okun yang disebut Hukum Okun (Okun's Law) mengindikasikan hubungan negatif antara pengangguran dengan pertumbuhan ekonomi. Semakin tinggi tingkat pengangguran semakin rendah tingkat pertumbuhan ekonomi, karena penduduk yang bekerja berkontribusi dalam menghasilkan barang dan jasa, sedangkan pengangguran tidak memberikan kontribusi. Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mencapai 5,02% pada 2019, diperkirakan menyusut menjadi 1,0% pada 2020 sebagai dampak pandemi Covid-19. Studi Vos et al. (2020) menyimpulkan penurunan 1,0% pertumbuhan ekonomi menyebabkan peningkatkan kemiskinan dan rawan pangan sebesar 1,6% and 3,0%. Menurut Hermanto (2020) penyusutan perekonomian Indonesia selama pandemic Covid-19 menyebabkan jumlah penduduk miskin dan rawan pangan meningkat 6,9-9,9%.

Pada ketahanan pangan, pandemi Covid-19 berpotensi menimbulkan kerawanan pangan (*food insecurity*) bahkan dapat memicu darurat pangan (*food emergency*) karena belum pasti kapan akan berakhir. Kerawanan pangan adalah suatu kondisi ketidakcukupan pangan yang dialami daerah, masyarakat, atau rumah tangga, pada waktu tertentu untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologi bagi pertumbuhan dan kesehatan masyarakat. Menurut FAO, sebuah negara dikatakan mengalami darurat pangan jika kekurangan pasokan pangan relatif terhadap kebutuhan konsumsinya akibat bencana alam, lingkungan, dan/atau kemanusiaan, dan karena itu membutuhkan bantuan pangan dari luar. Jika tidak ada bantuan pangan, maka cukup banyak penduduk yang akan menderita kekurangan gizi bahkan kelaparan. Selama pandemi Covid-19 beberapa provinsi diperkirakan mengalami defisit pangan karena berada jauh dari daerah produksi. Saat memimpin rapat terbatas tentang antisipasi kebutuhan bahan pokok di Istana Kepresidenan Bogor (Selasa, 28/4/2020) Presiden Jokowi menyampaikan bahwa stok beras defisit di 7 provinsi, jagung defisit di 11 provinsi, cabai besar defisit di 23 provinsi, cabai rawit defisit di 19 provinsi, bawang merah defisit di 1 provinsi, telur ayam defisit di 22 provinsi, minyak goreng

cukup untuk 34 provinsi, gula pasir defisit di 30 provinsi, dan bawang putih defisit di 31 provinsi.

Sektor pertanian berperan penting dalam mengurangi dampak negatif Covid-19. Pertama, penyedia lapangan kerja terbanyak. BPS (2019) menyebutkan struktur penduduk bekerja menurut lapangan pekerjaan didominasi oleh pertanian sebesar 27,33 persen, disusul perdagangan 18,81 persen; dan industri pengolahan sebesar 14,96 persen. Jumlah angkatan kerja sektor pertanian pada 2019 sebanyak 133,56 juta orang, naik 2,55 juta orang dibanding 2018. Sayangnya, penghasilan pekerja pertanian tergolong rendah. BPS (2017) mencatat penghasilan petani padi hanya Rp 1,238 juta/bulan, jagung 1,047 juta/bulan, kacang tanah Rp 1,052 juta/bulan, ubi kayu Rp 869 ribu/bulan, kacang hijau Rp 469 ribu/bulan, dan kedelai Rp 307 ribu/bulan, jauh di bawah UMK Jawa Timur Rp 1,7-3,8 juta/bulan. Penghasilan yang rendah ini merupakan salah satu penyebab generasi muda kurang tertarik bekerja di sektor pertanian. Jumlah petani muda berusia di bawah 34 tahun hanya 8,66%, sedangkan petani tua berusia lebih dari 55 tahun 22,09%. Jumlah petani muda tersebut menyusut 3,4% per tahun, lebih cepat dibanding petani tua yang menyusut hanya 0,5% per tahun.

Kedua, sektor pertanian penghasil 11 bahan pangan strategis (beras, jagung, bawang merah, bawang putih, cabai besar, cabai rawit, daging sapi dan kerbau, daging ayam ras, telur ayam ras, gula pasir, dan minyak goreng). Indonesia baru mampu berswasembada beras, jagung, bawang merah, cabai, daging ayam dan telur, dan minyak goreng, sedangkan gula, bawang putih, dan daging sapi masih harus dicukupi dari pasokan impor. Kemampuan suatu komoditas dalam memenuhi kebutuhan domestik diketahui melalui indikator SSR (Self Sufficiency Ratio). Nilai SSR beras, jagung, bawang merah, cabai, daging ayam, telur, dan minyak goreng masing-masing sebesar 95,86%, 98,48%, 99,98%, 96,75%, 99,90, 99,91%, dan 321,66%. Nilai SSR tersebut menunjukkan bahwa Indonesia telah berswasembada *on-trend* beras, jagung, bawang merah, cabai, daging ayam dan telur. Pengertian swasembada *on-trend* adalah minimal 90 persen kebutuhan pangan dipenuhi dari produksi domestik, sedangkan 10 persen sisanya dipenuhi dari impor ketika pasokan dalam negeri tak mencukupi. Daging sapi, gula, dan bawang putih masing-masing memiliki nilai SSR 83,23%, 32,02%, dan 4,5%. Nilai SSR tersebut menunjukkan bahwa Indonesia masih bergantung pada pasokan komoditas impor daging sapi

16,77%, gula 67,98%, dan bawang putih 95,5% dari kebutuhan dalam negeri. Selama lima tahun terakhir (2015-2019) defisit neraca perdagangan pangan sekitar US\$ 6,84 milyar per tahun. Ini berarti sebanyak Rp 95,76 triliun devisa negara terkuras untuk mengimpor pangan setiap tahun.

Strategi dasar untuk memperkuat kontribusi sektor pertanian pada era new normal dan selanjutnya adalah mengalokasikan anggaran pembangunan yang besar dan meningkat untuk sektor pertanian. Anggaran pertanian terus mengalami penurunan dari selama enam tahun terakhir. Pada 2015 adalah yang tertinggi yaitu Rp 32,72 triliun, turun menjadi Rp 27,72 triliun (2016), Rp 24,23 triliun (2017), Rp 23,90 triliun (2018) dan Rp 21,71 triliun (2019), dan terbaru Rp 21,05 triliun (2020). Anggaran pertanian tersebut hanya 0,77% dibanding total APBN 2020 sebesar Rp 2.613,81 triliun. Anggaran tersebut sangat jauh dibawah era Orde Baru yang mengalokasikan anggaran pertanian hingga 17% dari APBN. Dengan dukungan anggaran pembangunan pertanian yang besar, maka sektor pertanian dapat berperan secara signifikan dalam mengurangi dampak negatif pandemi Covid-19 terhadap perekonomian dan ketahanan pangan.

Harian Bhirawa, 7 Juli 2020



4.

FOOD ESTATE: KETAHANAN PANGAN DAN KETAHANAN NASIONAL

Presiden Joko Widodo menugaskan Menhan Prabowo Subianto untuk menjadi penanggung jawab dalam pembangunan *food estate* (lambung pangan) seluas 178 ribu hektar di Kabupaten Kapuas dan Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah (Kamis, 9 Juli 2020). *Food estate* merupakan istilah populer dari kegiatan usaha budidaya tanaman skala luas (>25 ha) yang dilakukan dengan konsep pertanian sebagai sistem industrial yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi, modal, organisasi, dan manajemen modern (Kementan, 2010). Konsep *food estate* diletakkan atas dasar keterpaduan sektor dan subsektor dalam suatu sistem agribisnis dengan memanfaatkan sumberdaya secara optimal

dan lestari, dikelola secara profesional, didukung oleh sumberdaya manusia yang berkualitas, teknologi tepat guna yang berwawasan lingkungan, dan kelembagaan yang kokoh. *Food estate* direncanakan menjadi salah satu Program Strategis Nasional (PSN). Program ini merupakan langkah antisipasi dini krisis pangan akibat pandemi Covid-19 yang diperingatkan FAO akan terjadi mulai Agustus 2020 sampai 2022 mendatang. Krisis pangan dipicu antara lain penurunan produksi, gangguan distribusi, dan pembatasan ekspor-impor pangan dunia.

Penunjukan Menhan, bukan Mentan, tentu bukan tanpa alasan. Pertama, ketahanan pangan merupakan salah satu unsur penting ketahanan nasional. Sebaik apapun unsur-unsur lain, jika rakyat kelaparan maka ketahanan nasional akan rapuh. Jepang merupakan satu teladan negara maju yang menjaga ketahanan pangan sebagai unsur utama ketahanan nasional. Sebagai negara yang tingkat keswasembadaan pangannya hanya 40%, pemerintah Jepang mengalokasikan APBN sebesar 3,7% dan memberi subsidi hingga 70% pada sektor pertanian untuk menjamin ketersediaan pangan bagi 127 juta rakyatnya. Rata-rata penghasilan petani Jepang mencapai sepuluh juta yen (Rp

1,34 miliar) per tahun, 25-30% lebih tinggi dibanding pendapatan per kapita penduduk. Bandingkan dengan pendapatan petani Indonesia. BPS (2017) mencatat penghasilan petani padi hanya Rp 1,238 juta/bulan, jagung 1,047 juta/bulan, kacang tanah Rp 1,052 juta/bulan, ubi kayu Rp 869 ribu/bulan, kacang hijau Rp 469 ribu/bulan, dan kedelai Rp 307 ribu/bulan, jauh di bawah UMK Jawa Timur Rp 1,7-3,8 juta/bulan.

Kedua, dalam APBN 2020 Kemenhan memperoleh anggaran paling besar yaitu Rp 122,45 triliun (21,02% APBN), 5,82 kali lipat anggaran Kementan yang hanya Rp 21,05 triliun (0,77% APBN). Ketiga, Menhan Prabowo pernah menjadi Ketua HKTI (Himpunan Kerukunan Tani Indonesia) periode 2004-2009. Pada waktu itu, Prabowo berjanji memperjuangkan kepentingan petani yang dinilainya masih belum mendapat prioritas utama, dan mendesak pemerintah agar membuat kebijakan yang berpihak kepada petani, seperti menghentikan keran impor produk pertanian. Prabowo menilai bahwa tingginya impor produk pertanian mengakibatkan petani lokal tidak mampu bersaing. Jika sukses membangun *food estate* sekaligus menyejahterakan petani, maka dapat dijadikan modal

Menhan Prabowo untuk kembali mencalonkan presiden ketiga kali pada Pemilu 2024 mendatang.

Food Estate bukanlah gagasan baru. Tahun 2007 pemerintah mencanangkan pengembangan *Merauke Integrated Food and Energy Estate* (MIFEE) di Kabupaten Merauke, Papua seluas 1,2 juta hektar. MIFEE direncanakan selesai terbangun selama 25 tahun dan akan terwujud pada tahun 2032 yang terdiri dari pembangunan *food estate* jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang. Selain MIFEE, ada 3 lokasi *food estate* yang dinotifikasi secara nasional yaitu Pengembangan Lahan Gambut (PLG) 1 juta hektar di Kalimantan Tengah, Delta Kayan Food Estate di Kabupaten Bulungan, Kalimantan Timur seluas sekitar 0,5 juta hektar, dan Jungkat Agri Kompleks di Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat seluas 0,25 juta ha. Namun, proyek-proyek *food estate* tersebut tidak berjalan sesuai harapan karena berbagai kendala yang kompleks. PLG dihentikan karena teknologi yang dipakai mendapat penolakan dari para penggiat lingkungan nasional dan internasional, sedangkan lokasi *food estate* yang lain karena konflik lahan, konflik sosial, ketersediaan infrastruktur agribisnis, dan teknologi hingga isu politik.

Sedikitnya ada empat latar belakang pembangunan *food estate*. Pertama, ancaman kerawanan pangan dunia. PBB (2020) menyebutkan terdapat 820 juta penduduk dunia tergolong rawan pangan kronis sebelum pandemi Covid-19. Sejak pandemi Covid-19 bertambah 135 juta penduduk terjerumus rawan pangan akut. Jumlah ini bisa bertambah dua kali lipat selama pandemi Covid-19 tahun 2020. Tingginya pengangguran, hilangnya pendapatan, dan kenaikan harga pangan menyebabkan akses terhadap pangan bagi sebagian penduduk semakin sulit. Di Indonesia, pemerintah memperkirakan sebanyak 3,0-5,2 juta kehilangan pekerjaan dan 1,8-3,78 juta orang Indonesia akan jatuh miskin selama pandemi Covid-19. Lembaga Demografi FEB UI (2020) memperkirakan sebanyak 17,5 juta rumah tangga terancam miskin dengan asumsi garis kemiskinan Rp 440.000 per kapita per bulan akibat Covid-19 karena adanya penurunan upah dan tanpa pendapatan. Menurut Hermanto (2020) penyusutan perekonomian Indonesia selama pandemi Covid-19 menyebabkan jumlah penduduk miskin dan rawan pangan meningkat 6,9-9,9%.

Kedua, munculnya fenomena *feeding frenzy*. Feeding frenzy dirumuskan oleh McMohan (2017) sebagai situasi di

mana negara pengekspor melakukan pembatasan terhadap arus keluar bahan pangan sebagai upaya menahan kenaikan harga dalam negeri. Sebaliknya, negara pengimpor menghapus semua bea impor dan berupaya mendatangkan sebanyak mungkin bahan makanan untuk mengamankan persediaan dalam negeri. McMahon menyebut, tindakan sebagian besar negara untuk mendahulukan kepentingan nasional masing-masing daripada bersinergi merumuskan kebijakan demi kemakmuran bersama justru memperparah krisis dan memicu kenaikan harga pangan dunia.

Ketiga, ketergantungan impor bahan pangan Indonesia cukup tinggi. Impor tujuh komoditas utama seperti beras, jagung, kedelai, gandum, gula tebu, ubi kayu, dan bawang putih mengalami kenaikan dari 21,7 juta ton pada 2016 menjadi 25,2 juta ton pada 2017. Impor ketujuh komoditas pangan yang jumlahnya masing-masing di atas 200 ribu ton per tahun menyebabkan defisit neraca perdagangan komoditas pangan terus melonjak dari US\$ 9,9 juta setara Rp 138,6 triliun (2015), US\$ 10,2 juta setara Rp 142,8 triliun (2016), mejadi US\$ 10,8 juta dan setara Rp 151,2 triliun (2017).

Keempat, luasnya alih fungsi lahan pertanian. Menurut Ketua HKTI Moeldoko (2020), penyusutan lahan pertanian di Indonesia mencapai 120 ribu hektare setiap tahun. Berdasarkan pemotretan yang dilakukan oleh BPS, BIG, dan LAPAN luas lahan baku sawah Indonesia menyusut dari 7,75 juta ha pada 2013 menjadi 7,1 juta hektar pada 2019 (Kementan, 2019). Ratusan ribu hektar lahan pertanian produktif tersebut setiap tahun beralih fungsi menjadi perumahan, pertokoan, sarana pendidikan, jalan raya, pabrik, tempat hiburan, tempat wisata, pasar, dan mall. ***

Malang Post, Senin 13 Juli 2020



5.

MENHAN, FOOD ESTATE DAN PESAWAT TEMPUR

Menhan Prabowo Subianto ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo menjadi penanggung jawab pembangunan *food estate* (lumbung pangan) seluas 178 ribu hektar di Kabupaten Kapuas dan Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah (Kamis, 9 Juli 2020). Food estate merupakan istilah populer dari kegiatan usaha budidaya tanaman skala luas (>25 ha) yang dilakukan atas dasar keterpaduan sektor dan subsektor dalam suatu sistem agribisnis dengan memanfaatkan sumberdaya secara optimal dan lestari, dikelola secara profesional, didukung oleh sumberdaya manusia yang berkualitas, teknologi tepat guna yang berwawasan lingkungan, dan kelembagaan yang kokoh. Food estate merupakan langkah antisipasi dini krisis pangan akibat pandemi Covid-19 yang diperingatkan FAO akan terjadi mulai Agustus 2020 sampai 2022 mendatang.

Penunjukan Menhan, bukan Mentan, tentu bukan tanpa alasan. Pertama, ketahanan pangan merupakan salah satu unsur penting ketahanan nasional. Sebaik apapun unsur-unsur lain, jika rakyat kelaparan maka ketahanan nasional akan rapuh. Jepang merupakan satu teladan negara maju yang menjaga ketahanan pangan sebagai unsur utama ketahanan nasional. Sebagai negara yang tingkat keswasembadaan pangannya hanya 40%, pemerintah Jepang mengalokasikan APBN sebesar 3,7% dan memberi subsidi hingga 70% pada sektor pertanian untuk menjamin ketersediaan pangan bagi 127 juta rakyatnya. Rata-rata penghasilan petani Jepang mencapai 10 juta yen (Rp 1,34 miliar) per tahun, 25-30% lebih tinggi dibanding pendapatan per kapita penduduk. Bandingkan dengan pendapatan petani Indonesia. BPS (2017) mencatat penghasilan petani padi hanya Rp 1,238 juta/bulan, jagung Rp 1,047 juta/bulan, kacang tanah Rp 1,052 juta/bulan, ubi kayu Rp 869 ribu/bulan, kacang hijau Rp 469 ribu/bulan, dan kedelai Rp 307 ribu/bulan, jauh di bawah UMK Jawa Timur Rp 1,7-3,8 juta/bulan.

Kedua, dalam APBN 2020 Kemenhan memperoleh anggaran paling besar yaitu Rp 122,45 triliun (21,02%

APBN), 5,82 kali lipat anggaran Kementan yang hanya Rp 21,05 triliun (0,77% APBN). Ketiga, Menhan Prabowo pernah menjadi Ketua HKTI (Himpunan Kerukunan Tani Indonesia) periode 2004-2009. Pada waktu itu, Prabowo berjanji memperjuangkan kepentingan petani yang dinilainya masih belum mendapat prioritas utama, dan mendesak pemerintah agar membuat kebijakan yang berpihak kepada petani, seperti menghentikan keran impor produk pertanian. Prabowo menilai bahwa tingginya impor produk pertanian mengakibatkan petani lokal tidak mampu bersaing. Jika sukses membangun food estate sekaligus menyejahterakan petani, maka dapat dijadikan modal Menhan Prabowo untuk kembali mencalonkan presiden kali ketiga pada Pemilu 2024.

Bukannya memaparkan grand design food estate, publik justru dikejutkan rencana kontroversial Menhan Prabowo memborong 15 unit pesawat tempur Eurofighter Typhoon bekas milik militer Austria (Surat Kemenhan No. 60/M/VII/2020 tertanggal 10 Juli 2020). Rencana tersebut membuktikan Menhan Prabowo kurang sensitif dalam memahami empat persoalan bangsa saat ini. Pertama, pandemi Covid-19. Sejak pertama dilaporkan 2 Maret 2020

sampai 9 Agustus 2020 jumlah penderita terkonfirmasi positif Covid-19 sebanyak 125.396 kasus dan meninggal 5.723 orang. Ini berarti setiap hari rata-rata sebanyak 779 orang terjangkit dan 36 orang meninggal akibat Covid-19. Wabah ini belum ditemukan vaksin atau obatnya dan belum jelas kapan berakhirnya.

Kedua, resesi ekonomi. Pemerintah memperkirakan sebanyak 3,0-5,2 juta kehilangan pekerjaan dan 1,8-3,78 juta orang Indonesia akan jatuh miskin selama pandemi Covid-19. Studi ekonom Arthur Okun yang disebut Hukum Okun (Okun's Law) mengindikasikan hubungan negatif antara pengangguran dengan pertumbuhan ekonomi. Semakin tinggi tingkat pengangguran semakin rendah tingkat pertumbuhan ekonomi, karena penduduk yang bekerja berkontribusi dalam menghasilkan barang dan jasa, sedangkan pengangguran tidak memberikan kontribusi. Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mencapai 5,02% pada 2019 menurun 2,97% pada Triwulan I, kemudian merosot menjadi -5,32 pada Triwulan II 2020. Dalam ilmu ekonomi, suatu negara dikatakan resesi apabila ekonominya minus dalam dua kuartal berturut-turut. Jika ekonomi Indonesia

Triwulan III 2020 pertumbuhannya negatif, maka Indonesia resmi masuk ke jurang resesi ekonomi.

Ketiga, kerawanan pangan (*food insecurity*). PBB (2020) menyebutkan terdapat 820 juta penduduk dunia tergolong rawan pangan kronis sebelum pandemi Covid-19. Sejak pandemi Covid-19 bertambah 135 juta penduduk terjerumus rawan pangan akut. Jumlah ini bisa bertambah dua kali lipat selama pandemi Covid-19 tahun 2020. Tingginya pengangguran, hilangnya pendapatan, dan kenaikan harga pangan menyebabkan akses terhadap pangan bagi sebagian penduduk semakin sulit. Lembaga Demografi FEB UI (2020) memperkirakan sebanyak 17,5 juta rumah tangga terancam miskin dengan asumsi garis kemiskinan Rp 440.000 per kapita per bulan akibat Covid-19 karena adanya penurunan upah dan tanpa pendapatan. Hasil survei Saiful Mujani Research & Consulting (SMRC) pada April 2020 menunjukkan 25% (sekitar 50 juta) warga menyatakan sudah tidak mampu lagi memenuhi kebutuhan pokok tanpa pinjaman, 15% warga tabungannya hanya cukup untuk beberapa minggu, dan 15% warga tabungannya hanya cukup untuk satu minggu.

Kerawanan pangan dapat memicu darurat pangan (*food emergency*) karena munculnya fenomena *feeding frenzy*. Feeding frenzy dirumuskan oleh McMohan (2017) sebagai situasi di mana negara pengekspor melakukan pembatasan terhadap arus keluar bahan pangan sebagai upaya menahan kenaikan harga dalam negeri. Sebaliknya, negara pengimpor menghapus semua bea impor dan berupaya mendatangkan sebanyak mungkin bahan makanan untuk mengamankan persediaan dalam negeri. McMahan menyebut, tindakan sebagian besar negara untuk mendahulukan kepentingan nasional masing-masing daripada bersinergi merumuskan kebijakan demi kemakmuran bersama justru memperparah krisis dan memicu kenaikan harga pangan dunia.

Keempat, degradasi pendidikan. Kebijakan *physical distancing* memaksa perubahan dari pendidikan formal di bangku sekolah menjadi belajar dari rumah (*school from home*) dengan sistem online dalam skala nasional. Bahkan, ujian nasional tahun ini terpaksa ditiadakan. Sistem pendidikan online tidak mudah karena kendala teknologi maupun ekonomi. Banyak guru dan orang tua yang masih gptek, tidak memiliki perangkat belajar seperti ponsel,

laptop dan koneksi internet, serta keterbatasan biaya. Akibatnya, banyak anak usia sekolah di pelosok Tanah Air yang saat ini lebih suka bersepeda dan main layangan daripada belajar.

Keempat masalah bangsa tersebut jelas lebih penting untuk segera diatasi daripada membeli pesawat tempur. Di Austria sendiri pesawat tempur itu jarang diterbangkan karena keamanan wilayah terjamin dan biaya operasional sangat mahal (US\$ 15.000=Rp 217,5 juta sekali terbang). Dana sebanyak itu tentu lebih bermanfaat untuk mengatasi masalah bangsa saat ini. Kepedulian Menhan Prabowo terhadap keempat masalah bangsa tersebut merupakan langkah strategis untuk meningkatkan elektabilitasnya yang semakin menurun beberapa bulan terakhir. ***

Harian Bhirawa, 27 Agustus 2020



6.

IRONIS, BANGGA TEMPE IMPOR KEDELAI

Dalam puisi “Pity the Nation” Kahlin Gibran menulis, “Kasihlah bangsa yang mengenakan pakaian yang tidak ditenunnya, memakan roti dari gandum yang tidak ia panen, dan meminum susu yang ia tidak memerahnyanya”. Puisi tersebut sangat relevan dengan kondisi Indonesia saat ini. Indonesia adalah bangsa produsen dan konsumen tahu dan tempe, namun tidak mampu memproduksi kedelai dalam jumlah cukup, sehingga selama puluhan tahun harus mengandalkan kedelai impor. BPS mencatat impor kedelai Indonesia terus meningkat dari 2,26 juta ton (2016) menjadi 2,67 juta ton (2019). Sepanjang semester-I 2020 impor kedelai Indonesia mencapai 1,27 juta ton senilai US\$ 510,2 juta (sekitar Rp 7,52 triliun), sebanyak 1,14 juta ton di antaranya berasal dari Amerika Serikat. Selama sepuluh tahun terakhir, volume kedelai impor mencapai 2-7 kali lipat

produksi kedelai lokal, sebagian besar berasal dari Amerika Serikat.

Ketergantungan terhadap kedelai impor berisiko terhadap bisnis tahu tempe jika terjadi lonjakan harga. Harga kedelai impor sejak Desember 2020 sampai awal Januari 2021 melonjak Rp9.200-10.000/kg dari harga sebelumnya Rp6.500-7.000 per kg. Pada harga kedelai Rp7.000, harga tempe berkisar antara Rp11.000-Rp12.000 ribu/kg. Ketika harga kedelai naik menjadi Rp9.200, biaya produksi tempe menjadi Rp14.000-an/kg. Lonjakan harga tersebut menyebabkan perajin tahu tempe di berbagai daerah mogok massal. Kejadian serupa pernah terjadi pada September 2013, di mana harga kedelai yang dalam kondisi normal sekitar Rp7.000/kg, mengalami beberapa kali kenaikan sebesar Rp300--Rp1.000/kg, dan bahkan telah melampaui batas keekonomian, yakni di atas Rp9.000/kg. Kejadian demikian dikawatirkan akan terulang dengan frekuensi yang semakin sering dan intensitas yang semakin tajam.

Ada banyak masalah endemik pada agribisnis kedelai di Indonesia yang belum pernah teratasi. Pertama, luas panen, produksi, dan produktivitas kedelai rendah. Luas panen kedelai menurun sekitar 20.000 ha/tahun dari sekitar 1

juta hektar (2000) menjadi sekitar 600 ribu hektar (2019). Produktivitas kedelai di Indonesia hanya 1,0-1,5 ton/ha, kurang dari setengah produktivitas kedelai di Amerika sebesar 2,5-3,5 ton/ha. Kedelai berasal dari daerah subtropis, sehingga jika ditanam di daerah tropis seperti Indonesia, hasilnya lebih rendah dibanding di negara subtropis. Di daerah tropis, panjang hari (photoperiodisitas efektif) rata-rata sekitar 11-12 jam, sedangkan di daerah subtropis mencapai 14-16 jam. Karena kedelai termasuk tanaman yang peka terhadap photoperiode, maka di Indonesia umur kedelai menjadi pendek, cepat berbunga, dan produktivitas rendah. Kombinasi luas lahan menyusut dan produktivitas rendah menghasilkan produksi kedelai Indonesia hanya sekitar 900 ribu ton/tahun, di mana 32,87% di antaranya disumbang Provinsi Jawa Timur.

Kedua, konsumsi kedelai meningkat. Kedelai merupakan komoditas pangan yang penting setelah padi dan jagung. Kebutuhan kedelai akan terus meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk, perekonomian dan kesadaran gizi. Kebutuhan kedelai nasional sekitar 2,5 juta ton setiap tahun sebagian besar (80,41%) digunakan untuk konsumsi langsung penduduk, 13,49% untuk industri

makanan, 3,96% untuk hotel, restoran dan rumah makan, dan 2,14% untuk benih. Rata-rata konsumsi kedelai penduduk Indonesia sebanyak 7,51 kg/kapita/tahun, 89% di antaranya dikonsumsi dalam bentuk tempe 3,80 kg dan tahu 2,88 kg. Dalam masa krisis ekonomi akibat pandemi Covid-19 saat ini, di mana pendapatan masyarakat menurun, tahu dan tempe merupakan sumber protein termurah dibanding daging sapi, daging ayam, telur, dan ikan.

Ketiga, minat petani menanam kedelai rendah karena keuntungan sedikit. Hasil survei BPS (2017) tentang ongkos usahatani menunjukkan keuntungan usahatani kedelai paling rendah. Keuntungan usahatani padi Rp 1,238 juta/ha/bulan, kacang tanah Rp 1,052 juta/ha/bulan, jagung Rp 1,047 juta/ha/bulan, singkong Rp 869 ribu/ha/bulan, dan kacang hijau 470 ribu/ha/bulan, sedangkan kedelai hanya Rp 307 ribu/ha/bulan. Selain itu, petani merasakan harga benih bermutu terlalu mahal, risiko kegagalan budidaya kedelai cukup besar terutama adanya serangan hama/penyakit, dan jaminan Harga Acuan Pembelian (HAP) yang ditetapkan pemerintah tidak berlaku, karena pada pada musim panen raya harga kedelai impor lebih murah.

Keempat, kualitas kedelai lokal rendah. Perajin tahu tempe menilai kualitas kedelai lokal lebih rendah dibanding kedelai impor. Kadar air yang terlalu banyak menyebabkan kedelai lokal lebih cepat membusuk, karena proses pengeringannya masih menggunakan cara dijemur. Bahkan, seringkali kedelai basah langsung dijual karena petani membutuhkan uang. Sebagai bahan baku pembuatan tahu, kedelai lokal sebenarnya lebih unggul dibanding kedelai impor, yaitu rasa tahu lebih lezat, rendemen lebih tinggi, dan risiko terhadap kesehatan cukup rendah, karena bukan berasal dari benih transgenik. Kedelai lokal mempunyai banyak kelemahan jika digunakan sebagai bahan baku tempe, yaitu ukuran bijinya kecil, tidak seragam dan kurang bersih; kulit ari kedelai sulit terkelupas pada saat proses pencucian; proses peragiannya lebih lama; dan setelah menjadi tempe, proses pengukusan untuk mengempukkan lebih lama atau bahkan kurang empuk.

Kelima, gagal swasembada. Target swasembada kedelai pernah dicanangkan oleh Presiden Habibie melalui Gema Palagung 2001 (Gerakan Mandiri Padi, Kedelai, Jagung), dilanjutkan Presiden SBY melalui RPPK (Revitalisasi Pertanian, Perikanan dan Kehutanan). Pada

tahun 2014 Presiden Jokowi juga menargetkan swasembada kedelai tahun 2017, kemudian diundur tahun 2020. Namun, target swasembada kedelai ketiga presiden tersebut gagal total. Sampai hari ini angka SSR (Self Sufficient Ratio) dan IDR (Import Dependency Ratio) kedelai Indonesia masing-masing 12% dan 88%. Artinya, tingkat keswasembadaan kedelai Indonesia hanya 12%, sedangkan ketergantungan impor mencapai 88%. Suatu negara dikatakan berswasembada jika angka SSR suatu komoditas minimal 90%.

Keenam, munculnya fenomena feeding frenzy. Feeding frenzy dirumuskan oleh McMohan (2017) sebagai situasi di mana negara pengekspor melakukan pembatasan terhadap arus keluar bahan pangan sebagai upaya menahan kenaikan harga dalam negeri. Sebaliknya, negara pengimpor menghapus semua bea impor dan berupaya mendatangkan sebanyak mungkin bahan makanan untuk mengamankan persediaan dalam negeri. McMahan menyebut, tindakan sebagian besar negara untuk mendahulukan kepentingan nasional masing-masing daripada bersinergi merumuskan kebijakan demi kemakmuran bersama justru memperparah krisis dan memicu kenaikan harga pangan dunia.

Melonjaknya harga kedelai impor merupakan indikator terjadinya feeding frenzy. Kenaikan harga kedelai ini dipicu lonjakan permintaan kedelai oleh China kepada AS selaku eksportir kedelai terbesar dunia. Pada Desember 2020 permintaan kedelai China naik dua kali lipat, yaitu dari 15 juta ton menjadi 30 juta ton. China tampaknya mengantisipasi peringatan FAO tentang krisis pangan akibat pandemi Covid-19 yang diperkirakan terjadi sampai tahun 2022. ***

Harian Bhirawa, 7 Januari 2021



7.

PUPUK BERSUBSIDI LANGKA, PETANI MERANA

Pupuk telah menjadi input produksi wajib dalam budidaya padi di Indonesia. Untuk setiap ton gabah yang dihasilkan, tanaman padi memerlukan hara Nitrogen sebanyak 17,5 kg (setara 39 kg Urea), Fosfor sebanyak 3 kg (setara 9 kg SP-36) dan Kalium sebanyak 17 kg (setara 34 kg KCl). Dalam satu musim tanam padi pada luasan satu hektar, padi sawah membutuhkan pupuk Urea (Nitrogen) 300 kg, SP36/TSP (Fospor) 100 kg, dan KCl (Kalium) 100 kg. Dengan luas baku sawah seluas 7,46 juta hektar, kebutuhan pupuk untuk padi sawah di Indonesia mencapai 23,4 juta ton per tahun.

Berdasarkan pengadaan dan penyalurannya, dikenal pupuk bersubsidi dan nonsubsidi. Pupuk bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari pemerintah untuk kebutuhan petani yang dilaksanakan

atas dasar program pemerintah. Pupuk nonsubsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya di luar program pemerintah dan tidak mendapat subsidi. Sesuai Permentan No. 49/2020 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Sektor Pertanian TA 2021, pupuk bersubsidi diperuntukkan bagi petani yang telah bergabung dalam kelompok tani yang menyusun Elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK). Ketersediaan pupuk bersubsidi seringkali mengalami kelangkaan ketika musim tanam. Kelangkaan pupuk bersubsidi berkaitan dengan beberapa faktor.

Pertama, anggaran pupuk bersubsidi terbatas. Berdasarkan usulan sistem e-RDKK dari seluruh daerah, kebutuhan pupuk tahun 2021 mencapai 23,4 juta ton senilai Rp 67,12 triliun. Sementara anggaran subsidi pupuk pada tahun 2021 hanya sebesar Rp 25,277 triliun. Dengan anggaran tersebut, pemerintah hanya mampu memenuhi kebutuhan pupuk subsidi sebesar 9,04 juta ton (39 persen). Padahal, rata-rata realisasi penyaluran pupuk subsidi periode 2018-2020 sudah mencapai Rp 32,584 triliun, sehingga kekurangan anggaran Rp 7,307 triliun.

Petani penerima pupuk bersubsidi adalah petani yang memiliki lahan seluas kurang dari 2 hektar. Hasil Survei Pertanian Antar Sensus oleh BPS tahun 2018 mencatat petani dengan kategori tersebut sebanyak 22,38 juta petani, sementara yang terdaftar dalam e-RDCK untuk mendapatkan pupuk bersubsidi hanya 17,05 juta (76 persen) petani, sisanya 5,33 juta (24 persen) petani tidak masuk dalam e-RDCK. Jika ketersediaan pupuk bersubsidi 9,04 juta ton dibagi jumlah petani yang terdaftar 17,05 juta petani, maka setiap petani rata-rata dapat membeli 530 kg pupuk bersubsidi. Besarnya perbedaan antara kebutuhan pupuk (23,4 juta ton) dengan alokasi pupuk bersubsidi (9,04 juta ton) berpotensi menimbulkan isu kelangkaan pupuk bersubsidi.

Kedua, perubahan pola distribusi pupuk subsidi dari manual ke Kartu Tani. Pola ini dimaksudkan untuk membuat distribusi pupuk subsidi semakin tepat sasaran. Sayangnya, distribusi Kartu Tani di lapangan belum merata, sehingga petani yang belum mengantongi Kartu Tani kesulitan mendapatkan pupuk bersubsidi. Selain itu, dalam sistem Kartu Tani ini, pemerintah hanya memberi jatah pupuk subsidi rata-rata sebanyak 10 kg per 0,1 hektar atau 100 kg

per 1 hektar. Jatah pupuk bersubsidi sebanyak ini, sangat jauh di bawah kebutuhan petani. Dalam satu kali musim tanam petani melakukan dua-tiga kali pemupukan. Petani yang memiliki lahan 0,1 hektar, membutuhkan sekitar 20 kg Urea dan 5 kg SP-36 untuk sekali pemupukan. Jika menggunakan pupuk lengkap, petani membutuhkan Urea sebanyak 7,5 kg, SP-36 10 kg dan KCl 5 kg. Namun, mengingat pupuk KCl tidak mendapat subsidi dari pemerintah, kebanyakan petani memilih hanya menggunakan dua jenis pupuk yang mendapat subsidi yaitu Urea dan SP-36.

Ketiga, harga pupuk nonsubsidi sangat mahal. Kehidupan petani semakin terjepit antara biaya dan harga (farm cost-price squeeze). Biaya sarana produksi pertanian cenderung naik, sementara harga jual hasil pertanian cenderung stabil bahkan menurun. Penggunaan pupuk bersubsidi oleh petani adalah upaya untuk menurunkan biaya produksi. Dalam struktur biaya produksi padi sawah sebesar Rp 13,56 juta per hektar, biaya pupuk menduduki peringkat ketiga terbanyak (9,43 persen), setelah upah pekerja dan jasa pertanian (48,79 persen) dan sewa lahan (25,61 persen). Jika menggunakan pupuk nonsubsidi, maka biaya pupuk bisa

meningkat 2-3 kali lipat. Saat ini harga pupuk Urea bersubsidi sebesar Rp 2.250 per kg sedangkan nonsubsidi Rp 5.500-6.000 per kg, pupuk ZA subsidi Rp 1.700 per kg dan nonsubsidi Rp 3.000-3.500 per kg, kemudian pupuk SP-36 Rp 2.400 per kg dan nonsubsidi Rp 6.000-6.500 per kg. Adapun untuk NPK subsidi Rp 2.300 per kg dan nonsubsidi Rp 7.500-Rp 8.000 per kg sedangkan NPK Formula Khusus subsidi Rp 3.300 per kg dan nonsubsidi Rp 8.000-10.000 per kg. Terakhir, pupuk organik subsidi Rp 800 per kg dan nonsubsidi Rp 2.000-2.500 per kg. Disparitas harga antara pupuk subsidi dan nonsubsidi yang terlalu tinggi (sampai Rp 3.000-4.000 per kg) berpotensi memicu terjadinya moral hazard spekulasi yang akhirnya menimbulkan masalah dalam penyaluran pupuk subsidi kepada petani.

Keempat, petani padi sangat membutuhkan bantuan pupuk. Petani padi sebenarnya termasuk kelompok masyarakat yang kurang sejahtera. Dalam satu musim tanam tingkat keuntungan petani sekitar Rp 4,95 juta per hektar atau sekitar Rp 1,65 juta per bulan. Dengan rata-rata kepemilikan lahan sekitar 0,4 hektar, berarti penghasilan petani hanya sekitar Rp 660 ribu per bulan. Hasil Survei Ongkos Usaha

Tani Tahun 2017 (SOUT-2017) memberi konfirmasi bahwa 99,58 persen rumah tangga petani padi menyatakan membutuhkan bantuan dari pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Mayoritas (55,70 persen) rumah tangga menyatakan bahwa jenis bantuan yang paling dibutuhkan adalah bantuan pupuk. Hasil SOUT-2017 juga memperlihatkan bahwa tingkat ketergantungan petani Indonesia terhadap pupuk sangat tinggi. Persentase rumah tangga yang menggunakan pupuk mencapai 97,39 persen dari jumlah total rumah tangga padi sawah. Rumah tangga yang menggunakan pupuk bersubsidi mencapai 85,84 persen, sedangkan 10,55 persen sisanya menggunakan pupuk nonsubsidi.

Kelima, aplikasi pupuk organik tidak praktis dan ekonomis. Hasil SOUT-2017 menunjukkan jumlah rumah tangga padi sawah yang menggunakan pupuk anorganik mencapai 99,87 persen, sedangkan pemakai pupuk organik hanya 0,13 persen. Substitusi pupuk anorganik dengan pupuk organik secara teknis memang dapat mengurangi aplikasi pupuk anorganik. Namun, secara ekonomis tidak serta merta mengurangi biaya produksi. Pupuk organik memang lebih murah, tetapi penggunaannya lebih banyak dan menambah

biaya tenaga kerja. Selain itu, respon tanaman terhadap pupuk organik lambat, karena kandungan unsur hara pada pupuk organik hanya 1%-2%, sehingga dapat mengakibatkan penurunan produksi padi. ***

Malang Post Disway, 18 Maret 2021



8.

CABAI RAWIT SEMAKIN PAHIT

Harga cabai rawit di berbagai daerah di Indonesia melambung setinggi langit. Dalam keadaan normal, harga eceran cabai rawit antara Rp 30.000-35.000/kg. Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) mencatat harga rata-rata cabai rawit di tingkat petani pada akhir Desember 2020 Rp 36.000/kg dan di tingkat pengecer Rp 59.000/kg. Pada Maret 2021, harga rata-rata cabai rawit di tingkat petani meningkat Rp 44.000/kg dan di tingkat pengecer Rp 75.000/kg. Di beberapa daerah, harga cabai rawit di tingkat petani bahkan mencapai Rp 60.000-75.000/kg dan di tingkat eceran mencapai Rp 100-130 ribu/kg. Harga cabai rawit ini lebih mahal daripada harga daging sapi Rp 100-110 ribu/kg.

Cabai merupakan komoditas kebutuhan pokok bagi rumah tangga. Cabai biasa dikonsumsi dalam bentuk segar maupun olahan. Cabai dalam bentuk segar dapat dikonsumsi sebagai bumbu masakan, sambal dan penghias makanan,

sedangkan bentuk olahannya seperti saus sambal dan bubuk cabai. Cabai yang dikonsumsi oleh masyarakat terdiri atas cabai merah, cabai hijau, dan cabai rawit. Konsumsi cabai penduduk Indonesia sebesar 4,59 kg/kapita/tahun, terdiri cabai merah 62%, cabai rawit 32%, dan cabai hijau 6%. Dengan jumlah penduduk 270 juta, maka kebutuhan konsumsi cabai nasional mencapai 1,239 juta ton per tahun, atau 103.250 ton per bulan, 33.040 ton di antaranya cabai rawit. Kebutuhan cabai pada hari-hari besar keagamaan, seperti Hari Raya Idul Fitri, Idul Adha, Hari Natal dan Tahun Baru, dan musim hajatan biasanya meningkat sekitar 10–20% dari kebutuhan normal. Cabai merupakan bahan pangan yang dapat dikonsumsi setiap saat dan tidak dapat disubstitusi, sehingga cabai akan terus dibutuhkan dengan jumlah yang semakin meningkat seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk, perekonomian nasional dan berkembangnya industri pangan nasional.

Berdasarkan data Kementan, produksi cabai besar tahun 2019 sebesar 1,26 juta ton dengan luas panen sebesar 144.391 ha dan produktivitas 8,77 ton per ha, sedangkan produksi cabai rawit sebanyak 1,37 juta ton dengan luas panen 177.581 ha dan produktivitas 7,8 ton per ha. Provinsi

Jawa Timur berada pada peringkat pertama produsen cabai rawit dengan rata-rata kontribusi 30,38%, disusul Jawa Tengah 13,76%, NTB 11,86%, Jawa Barat 11,75%, Aceh 5,40% dan Sumatera Utara 3,44%. Provinsi Jawa Timur rata-rata memproduksi cabai rawit 308.000 ton per tahun. Kontributor produksi terbesar cabai rawit di Jawa Timur adalah Kabupaten Blitar 21,40%, Kabupaten Malang 12,34%, Kabupaten Kediri 9,34%, dan Kabupaten Jember 6,98%. Cabe rawit sudah mulai berbuah dan bisa dipanen setelah berumur 2,5-3 bulan sejak bibit ditanam. Periode panen bisa berlangsung selama 6-7 bulan. Frekuensi panen pada periode masa panen tersebut bisa berlangsung 15-20 kali. Produksi cabai biasanya berlimpah pada musim kemarau atau musim pancaroba dan menurun pada musim hujan, karena sifat tumbuh tanaman cabai tidak banyak memerlukan air.

Cabai rawit tergolong jenis tanaman hortikultura yang rentan terhadap air. Bila diguyur hujan berlebihan, maka tanaman cabai akan menguning, busuk, dan akhirnya mati. Penyakit yang sering menyerang tanaman cabai pada masa musim hujan diantaranya penyakit antraknosa, virus kuning, dan lalat buah. Penyakit antraknosa (patek)

merupakan penyakit pada tanaman cabai yang paling banyak menyebabkan kerugian bagi petani. Kehilangan hasil produksi cabai akibat serangan penyakit yang disebabkan cendawan *Colletotrichum capsici* ini mencapai 20–90 persen, terutama di musim penghujan. Penyakit ini dapat menyerang semua fase buah cabai, baik saat fase cabai masih muda maupun fase sudah masak.

Produksi cabai sebenarnya memenuhi kebutuhan konsumsi, bahkan cenderung surplus. Namun, komoditas ini sangat sensitif terhadap cuaca, sehingga berakibat pada fluktuasi pasokan dan fluktuasi harga. Banyak faktor yang mempengaruhi pasokan dan harga. Pasokan dipengaruhi oleh jumlah produksi di sentra produksi dan kelancaran transportasi. Produksi dipengaruhi oleh luas panen dan produktivitas yang sangat ditentukan oleh kondisi iklim. Fluktuasi produksi cabai, selain disebabkan oleh musim, juga oleh terkonsentrasinya pusat-pusat produksi hanya di daerah tertentu, sementara konsumen cabai tersebar di hampir seluruh di Indonesia. Hal ini mengakibatkan terjadi senjang penawaran dan permintaan komoditas di daerah tertentu yang mengakibatkan aliran produksi dari daerah surplus ke daerah defisit. Pada sisi lain, banyak faktor yang juga

mempengaruhi harga, seperti jumlah dan kontinuitas pasokan, dinamika permintaan konsumen dan dinamika kenaikan harga baik harga input maupun harga komoditas lain.

Fluktuasi harga cabai lebih banyak disebabkan oleh ketidakstabilan pasokan, sebagai akibat ketidakstabilan produksi dan gangguan distribusi. Pada musim kemarau (September-Oktober), produksi dan pasokan cabai melimpah, distribusi lancar, sementara permintaan relatif tetap, sehingga harga merosot tajam. Sebaliknya, pada musim penghujan (Februari-Maret), produksi dan pasokan menurun, distribusi terganggu karena banjir, mengakibatkan harga melambung tinggi. Fluktuasi harga yang tajam menjadikan komoditas cabai dimasukkan dalam jajaran komoditas pertanian penyumbang inflasi terbesar setiap tahun.

Meski fluktuasi harga cabai merupakan peristiwa rutin setiap musim kemarau dan hujan, belum ada solusi permanen dari pemangku kepentingan. Pengembangan komoditas cabai selama ini masih tertuju pada sisi penawaran melalui pendekatan penumbuhan sentra-sentra produksi baru dan pemantapan sentra yang telah ada. Akan tetapi,

kebijakan yang bertumpu pada sisi penawaran tersebut belum efektif dalam mencapai tujuan peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani. Petani cabai tetap menanggung risiko usaha yang sangat tinggi, yang tercermin dari lebarnya kesenjangan antara harga saat panen raya dan harga saat paceklik. Pada saat panen raya, produksi cabai melimpah, harga merosot. Sebaliknya, pada musim paceklik, harga melambung, produksi menyusut. Kenaikan harga cabai rawit tidak otomatis berpengaruh terhadap pendapatan petani. Jadi, ketika harga cabai rawit melambung tinggi, petani dan konsumen sama-sama merasakan cabai rawit semakin pahit. ***

New Malang Pos, Rabu 24 Maret 2021



9.

IMPORT BERAS, MARJINALISASI DAN KEMISKINAN PETANI

Indonesia berhasil mencapai swasembada beras tahun 1984. Atas keberhasilan tersebut, pada 14 November 1985 Presiden Soeharto diundang berpidato pada konferensi ke 23 Organisasi Pangan Dunia (FAO) di Roma, Italia, dan pada 21 Juli 1986 Presiden Soeharto menerima medali emas dari FAO di Bina Graha Jakarta. Berdasarkan ketetapan FAO, suatu negara dikatakan swasembada jika produksi beras mencapai 90 persen dari kebutuhan nasional. Beras kemudian menjadi makanan pokok bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Sejak saat itu tidak ada lagi pernyataan di dalam buku teks sekolah bahwa makanan pokok orang Madura adalah jagung, dan makanan pokok orang Maluku dan Papua adalah sagu, seperti tahun 1970-an.

Saat ini konsumsi beras penduduk Indonesia mencapai 97,36 kg/kapita/tahun. Tingkat konsumsi tersebut

menjadikan Indonesia negara konsumen beras terbesar di dunia, jauh di atas rata-rata konsumsi beras dunia sebesar 60 kg, dan negara tetangga Malaysia 80 kg, Thailand 70 kg, serta Jepang 58 kg/orang/tahun. Jika konsumsi beras tersebut dibagi harian, maka orang Indonesia mengonsumsi beras 267 g/orang/hari atau 89 g sekali makan. Dengan jumlah penduduk 272 juta jiwa, maka setiap tahun harus tersedia beras sebanyak 26,48 juta ton untuk konsumsi rumah tangga di Indonesia. Jika ditambah konsumsi di luar rumah tangga sebesar 17,24 kg/kapita/tahun, maka kebutuhan beras Indonesia mencapai 31,17 juta ton/tahun.

BPS mencatat produksi padi Indonesia tahun 2020 sebanyak 54,65 juta ton gabah kering giling (GKG), setara 31,33 juta ton beras. Selama lima tahun terakhir, produksi padi mengalami penurunan sebesar 4,18%/tahun dari 79,35 juta ton tahun 2016. Penurunan produksi padi diakibatkan oleh penurunan luas panen dan produktivitas padi. Luas panen padi menurun 4,08%/tahun dari 15,16 juta hektar tahun 2016 menjadi 10,66 juta hektar tahun 2020, sedangkan produktivitas padi menurun 0,06%/tahun dari 52,36 ku/ha menjadi 51,28 ku/ha. BPS memprediksi produksi GKG sepanjang Januari 2021-April 2021 mencapai 25,54 juta ton

(setara 14,54 juta ton beras). Kementan mencatat pada periode Januari-Mei 2021, stok beras mencapai 24,9 juta ton, sementara kebutuhan 12,33 juta ton, sehingga terdapat surplus 12,56 juta ton.

Meskipun berhasil mencapai swasembada dan surplus beras, Indonesia juga tercatat negara importir beras. Selama periode tahun 2000-2019 rata-rata volume impor beras Indonesia sebesar 987,977 ribu ton/tahun, senilai US\$ 386,805 juta (Rp 5,415 triliun) per tahun. Impor tertinggi tahun 2011 sebanyak 2,75 juta ton (US\$ 1,513 miliar) dan terakhir tahun 2019 sebanyak 444,509 ribu ton (US\$ 184,254 juta). Negara asal impor beras Indonesia dalam beberapa tahun terakhir utamanya berasal dari Vietnam dan Thailand dengan kontribusi masing-masing 40,45% dan 38,43%, kemudian Pakistan 10,73% dan India sebesar 10,38%. Importasi beras umumnya dilakukan dengan empat alasan, yaitu teknis (produksi padi merosot), ekonomis (harga beras melonjak), politis (cadangan pangan), dan sosial (bantuan pangan).

Perangkap kemiskinan

Dalam Rapat Kerja Kemendag Tahun 2021, Kamis (4/3/2021), Menko Perekonomian Airlangga Hartarto

memaparkan rencana pemerintah mengimpor beras 1 juta ton untuk menambah cadangan (iron stock) sebesar 1 juta ton hingga 1,5 juta ton. Rencana importasi beras tersebut diperkuat oleh pemberitaan Bangkok Post bahwa pemerintah Indonesia dan pemerintah Thailand akan meneken MoU jual-beli beras Thailand sebanyak 1 juta ton pada akhir Maret 2021. Menteri Perdagangan Thailand Jurin Laksanawisit mengungkapkan, perjanjian yang akan diteken kedua negara merupakan kesepakatan antar-pemerintah (G2G). Isi perjanjiannya adalah terkait pasokan beras asal Thailand ke Indonesia, mencakup tidak lebih dari 1 juta ton beras putih dengan kadar retak 15-25 persen (beras medium). Perjanjian ini berlaku untuk pasokan impor 1 juta ton beras dalam setahun dengan durasi empat tahun. Impor beras dari Thailand yang dilakukan Indonesia ini dilakukan dengan syarat tertentu, yaitu tergantung produksi beras kedua negara dan harga beras dunia.

Setelah mengalami perdebatan selama beberapa pekan, pada Jumat (26/3/2021) Presiden Jokowi akhirnya memutuskan bahwa sampai bulan Juni 2021 tidak ada beras impor masuk ke Indonesia. Perdebatan tentang importasi beras di tengah musim panen raya padi telanjur membawa

dampak negatif bagi kesejahteraan petani. Harga gabah yang biasa turun saat panen raya, semakin merosot akibat wacana importasi beras. Kehidupan petani semakin terjepit antara biaya dan harga (farm cost-price squeeze). Biaya sarana produksi pertanian cenderung naik, sementara harga jual hasil pertanian cenderung stabil bahkan menurun. Saat tanam padi para petani kesulitan mendapatkan pupuk bersubsidi. Namun ketika panen tiba, harga jual gabah terpuruk. Saat ini harga gabah kering panen (GKP) di berbagai daerah jatuh dalam kisaran Rp 3.400 hingga Rp 3.600 per kg, di bawah Harga Pembelian Pemerintah (HPP) sebesar Rp 4.200 per kg. Padahal, pada tahun-tahun sebelumnya harga selalu di atas Rp 4.000 per kg, bahkan mencapai Rp 4.700 per kg pada tahun 2020.

Survei BPS tentang Struktur Ongkos Usaha Tanaman Padi 2017 (SOUT Padi 2017) mencatat pendapatan petani hanya sebesar Rp 4,95 juta per musim tanam per hektare atau Rp 1,23 juta per bulan. Survei BPS juga menyebutkan sebanyak 57,97 persen petani hanya memiliki lahan di bawah 0,1 hektare dan 29,47 persen petani memiliki 0,1 sampai 0,49 hektare. Ini berarti sebanyak 87,44 persen petani Indonesia hanya berpenghasilan antara Rp 123 ribu

sampai Rp 615 ribu per bulan. Pendapatan tersebut jauh di bawah Upah Minimum Provinsi (UMP) di Indonesia antara Rp 1,765 juta sampai 4,276 juta/bulan dan garis kemiskinan Rp 454.652 per kapita per bulan

Importasi beras dapat dipandang sebagai proses marjinalisasi halus (soft marginalization) bagi kehidupan petani, selain melalui konversi lahan, alih teknologi dan akses permodalan. Marjinalisasi semacam ini tidak memerlukan perilaku represif terhadap kelompok yang lemah, namun terjadi dengan proses sosial yang halus, sehingga petani tidak menyadari kalau mereka terpinggirkan. Kebijakan impor beras menyebabkan pendapatan petani merosot. Beras impor dapat menjatuhkan harga panen petani baik GKP, GKG maupun beras sampai sebesar 20 persen. Penurunan pendapatan mengakibatkan petani tidak mampu mengimbangi kebutuhan sosial ekonomi rumah tangga yang terus meningkat, sehingga terjerumus dalam perangkap kemiskinan (poverty trap). Perangkap kemiskinan merupakan sistem ekonomi yang sangat menyulitkan masyarakat petani keluar dari lingkaran kemiskinan karena rendahnya pendapatan. BPS mencatat jumlah rumah tangga miskin di Indonesia tahun 2020 sebagian besar (46,30

persen) berpengasilan utama berasal dari sektor pertanian. Tak heran jika pertanian semakin ditinggalkan generasi muda milenial karena merupakan lambang kemiskinan berkelanjutan. ***

Harian Bhirawa, Selasa 30 Maret 2021



10.

HARGA JAGUNG MELAMBUNG, PETERNAK LIMBUNG

Suroto ditangkap polisi ketika membentangkan poster meminta bantuan kepada Presiden Jokowi (Selasa, 7/9/2021) terkait tingginya harga jagung. Gara-gara poster tersebut, Suroto dan perwakilan peternak ayam dari berbagai daerah diundang Presiden Jokowi ke Istana Negara (Rabu, 15/9/2021). Pada kesempatan tersebut, Presiden Jokowi berjanji menurunkan harga jagung menjadi Rp 4500 per kg. Peternak ayam Blitar memang sangat berkepentingan terhadap harga jagung karena Blitar merupakan sentra populasi dan produksi telur Jawa Timur, bahkan Indonesia. Populasi ayam petelur di Jawa Timur tahun 2020 sebanyak 96,543 juta ekor (34%) dari populasi ayam petelur nasional 281,108 juta ekor dengan produksi telur mencapai 1.732.437 ton (32%) dari 5.044.395 ton produksi telur nasional. Kabupaten Blitar memberikan kontribusi terbesar yaitu 33%

terhadap populasi dan 34% terhadap produksi telur di Jawa Timur.

Dalam mengelola bisnis ayam petelur, peternak berada pada posisi terjepit antara biaya dan harga (farm cost-price squeeze). Biaya sarana produksi peternakan cenderung meningkat, sementara harga jual telur sangat berfluktuasi. Dalam struktur biaya produksi ayam petelur, biaya pakan memiliki peran 70% dalam perhitungan harga pokok produksi (HPP). Komponen utama (sekitar 50%) pakan ayam adalah jagung. Harga jagung mengalami kenaikan harga sejak awal tahun 2021. Harga jagung yang semula Rp 4000-an per kg melejit menjadi Rp 6000-7000an per kg saat ini. Akibatnya, harga pakan pun melambung melampaui Rp 8000 per kg. Tingginya harga jagung disebabkan masih belum optimalnya produksi jagung di dalam negeri dan adanya kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang diduga berdampak pada kenaikan biaya logistik jagung antar daerah. Sementara itu, harga jagung dunia selama satu tahun terakhir juga mengalami kenaikan sebesar 90-100% dari USD 135 per ton pada Juli 2020 menjadi USD 260 per ton pada Juli 2021, bahkan sempat USD 272 per ton pada Juni 2021. Meski harga jagung

naik, Kemendag memastikan tidak akan melakukan importasi jagung untuk kebutuhan pakan ternak. Pemerintah memilih melakukan substitusi jagung dengan gandum impor sebesar 300.000 ton.

Kenaikan harga pakan ternyata diperparah dengan fluktuasi harga telur yang cenderung menurun. Perbandingan ideal harga pakan dan harga telur adalah 1:3. Kalau harga pakan Rp 8.000 per kilogram, maka harga telur di kandang idealnya Rp 24.000 per kilogram. Harga telur di pasaran sempat mencapai level tertinggi sebesar Rp 25.000 per kilogram pada pertengahan April 2021, sedangkan harga terendah beberapa hari ini mencapai Rp 14.000-15000 per kilogram. Dengan harga serendah itu, peternak mengalami kerugian sekitar Rp 3000-4000 per kg. Harga tersebut jauh di bawah harga acuan pemerintah sebesar Rp 19.000-Rp 21.000 per kilogram, berdasarkan ketentuan Permendag Nomor 7 Tahun 2020. Ketimpangan antara HPP dan harga telur sudah terjadi sejak pemberlakuan PPKM yang terus diperpanjang.

Masalah harga pakan yang mahal merupakan pandemi berkala pada industri ayam ras yang tidak jelas solusinya. Harga pakan mahal hampir selalu disebabkan

ketersediaan jagung dalam negeri yang tidak mampu memenuhi kebutuhan industri pakan. Diperkirakan lebih dari 55% kebutuhan jagung dalam negeri digunakan untuk pakan, sedangkan untuk konsumsi pangan hanya sekitar 30%, dan selebihnya untuk kebutuhan industri dan bibit. Peran jagung sudah berubah sebagai bahan pakan dibanding sebagai bahan pangan. Gabungan Perusahaan Makanan Ternak (GPMT) mencatat serapan jagung untuk pakan ternak pada 2020 mencapai 6,5 juta ton dan menghasilkan pakan ternak dengan volume total 14,85 juta ton. Artinya, kandungan jagung dalam pakan ternak mencapai 43,7 persen.

Kebutuhan jagung sebagai bahan baku pakan ternak dipenuhi dari produksi nasional dan jagung impor. Produksi jagung nasional sebenarnya sudah mencapai tingkat swasembada dengan nilai SSR (Self Sufficiency Ratio) sebesar 98%. Nilai SSR tersebut berarti bahwa produksi jagung domestik telah mampu memenuhi 98% kebutuhan dalam negeri, sedangkan ketergantungan terhadap jagung impor hanya 2%. Impor jagung tahun 2015-2019 dibatasi oleh pemerintah dengan tujuan produksi jagung dalam negeri dapat terserap oleh industri pakan. Impor jagung diperlukan jika produksi nasional kurang mencukupi untuk kebutuhan

pabrik pakan. Volume impor jagung tahun 2016 menurun dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 61,96% atau sebesar 1,33 juta ton dari tahun sebelumnya 3,50 juta ton dan tahun 2017 relatif rendah 46,34% atau sebesar 714,50 ribu ton. Pada tahun 2018 dan 2019, volume impor jagung kembali meningkat sebesar 60,98% atau sebesar 1,15 juta ton dan 25,49% atau sebesar 293,21 ribu ton. Hingga bulan Juli 2020 impor mencapai 724,21 ribu ton atau masih rendah dari periode tahun 2019.

Pada sisi konsumsi, penurunan harga telur tidak serta merta diikuti kenaikan permintaan dan konsumsi telur karena pendapatan masyarakat juga menurun selama pandemi Covid-19. Konsumsi telur penduduk Indonesia saat ini sebanyak 6,78 kg/kapita/tahun, lebih rendah dibandingkan Malaysia 17,9 kg, Singapura 17,7 kg, dan Thailand 12,4 kg. Harga yang lebih mahal dan pendapatan penduduk yang lebih rendah menyebabkan konsumsi produk peternakan penduduk Indonesia lebih rendah dibanding beberapa negara tetangga. Pengeluaran penduduk untuk konsumsi telur (dan susu) hanya Rp 32.435 per kapita sebulan (5,67%) dari pengeluaran untuk pangan Rp 572.551 sebulan, jauh di bawah pengeluaran untuk rokok Rp 70.537. Penurunan

pendapatan mendorong penduduk mengutamakan konsumsi makanan pokok beras dan sumber protein nabati dan ikan yang lebih murah dibanding telur dan daging ayam.

Pandemi Covid-19 berpotensi menurunkan konsumsi telur dan daging ayam. Pertama, pengangguran meningkat. Pemerintah memperkirakan sebanyak 1,8-3,78 juta orang Indonesia akan jatuh miskin selama pandemi Covid-19. Peningkatan pengangguran menyebabkan penurunan pendapatan dan daya beli, ditambah gangguan rantai pasokan, pada gilirannya akan memberi tekanan pada kualitas dan kuantitas konsumsi telur dan daging ayam. Kedua, selama pandemi Covid-19 yang berlangsung hampir 2 tahun, perekonomian nasional yang mengalami kontraksi minus 2,09%. Penurunan 1% pertumbuhan ekonomi menyebabkan peningkatan kemiskinan dan rawan pangan sebesar 1,6% and 3,0%. Penyusutan ekonomi Indonesia menyebabkan jumlah penduduk miskin dan rawan pangan diperkirakan meningkat 6,9-9,9%. ***

New Malang Pos, Sabtu, 18 September 2021



11.

PEMBERDAYAAN PETANI MILENIAL

Setiap tanggal 24 September petani Indonesia memperingati Hari Tani Nasional (HTN). HTN ditetapkan oleh Presiden Soekarno melalui Keppres No. 169/1963 bertepatan terbitnya UU No. 5/1960 tentang Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) tanggal 24 September 1960. Penetapan HTN merupakan sebuah penghargaan tertinggi terhadap masyarakat petani yang berjuang menegakkan kedaulatan, kemandirian, dan ketahanan pangan bagi bangsa Indonesia. Selama pandemi Covid-19 yang berlangsung hampir 2 tahun, petani Indonesia berhasil menyelamatkan perekonomian sebagai penyumbang pertumbuhan positif 2,59% terhadap perekonomian nasional yang mengalami kontraksi minus 2,09%.

Di tengah ketangguhannya terhadap pandemi Covid-19, sektor pertanian sebenarnya mengalami kerapuhan yang

cukup serius, yaitu mulai ditinggalkan oleh generasi milenial. Hasil Survei Pertanian Antar Sensus (SUTAS) 2019 mencatat dari 33,49 juta penduduk yang berprofesi sebagai petani, hanya 4,99 juta (14,90%) petani muda yang berusia di bawah 34 tahun, sedangkan petani tua berusia lebih dari 55 tahun berjumlah 11,14 juta (33,28%). Jumlah petani muda menyusut 3,4% per tahun, lebih cepat dibanding petani tua yang menyusut hanya 0,5% per tahun. Selain masalah usia yang menua, petani Indonesia juga berpendidikan rendah. Sebanyak 22,24 juta (66,42%) petani berpendidikan SD dan tidak tamat SD, sedangkan yang berpendidikan tinggi hanya 1,05 juta (0,03%). Tampak jelas bahwa petani saat ini adalah angkatan kerja usia tua yang telah melewati usia produktif dan berpendidikan rendah, sedangkan sisanya adalah sedikit kaum muda yang terpaksa bertani karena kalah bersaing mendapat pekerjaan lain yang diidamkan.

FAO (2014) mengungkapkan beberapa alasan generasi milenial (usia 19-39 tahun) enggan bekerja di sektor pertanian. Pertama, citra petani sebagai pekerjaan yang rendah, kotor, tidak bergengsi, dan kurang memerlukan keterampilan. Kedua, pendapatan petani sangat rendah. BPS

(2017) mencatat penghasilan petani padi hanya Rp 1,238 juta/bulan, jagung Rp 1,047 juta/bulan, kacang tanah Rp 1,052 juta/bulan, ubi kayu Rp869 ribu/bulan, kacang hijau Rp469 ribu/bulan, dan kedelai Rp 307 ribu/bulan. Pendapatan tersebut jauh di bawah Upah Minimum Provinsi (UMP) di Indonesia antara Rp 1,765 juta sampai 4,276 juta/bulan dan garis kemiskinan Rp 454.652 per kapita per bulan. Ketiga, alih fungsi lahan pertanian ke industri meningkatkan pemiskinan petani. Di Indonesia terjadi konversi lahan pertanian seluas 120 ribu hektar lahan setiap tahun. Survei BPS menyebutkan sebanyak 57,97 persen petani hanya memiliki lahan di bawah 0,1 ha dan 29,47 persen petani memiliki 0,1 sampai 0,49 ha. Keempat, infrastruktur perdesaan dan fasilitas agroindustri kurang menarik kaum milenial tinggal di perdesaan. Kelima, akses finansial susah dijangkau untuk mengembangkan usaha pertanian. Keenam, kurikulum pertanian di universitas tidak mendorong petani milenial untuk mengejar karir di pertanian. Ketujuh, terbatasnya organisasi petani milenial dan kurang dilibatkannya pemuda tani dalam perumusan kebijakan pertanian.

Fenomena penuaan petani (*aging farmers*) dan semakin berkurangnya tenaga kerja milenial pertanian terjadi baik di negara maju maupun berkembang, seperti AS, Australia, UE, Jepang, Korea, Thailand, dan Vietnam. Upaya untuk menarik dan mempertahankan generasi muda petani terus dilakukan di berbagai negara. Pemerintah AS memberi fasilitas pinjaman kepada petani milenial untuk memulai bisnis pertanian melalui *Farm Service Agency* (FSA). FSA diberikan dalam bentuk program jaminan pinjaman, program pinjaman langsung, dan program jaminan sewa lahan. Program jaminan pinjaman dilakukan dengan menjamin pinjaman petani milenial ke bank komersial, kredit petani, dan lembaga kredit lainnya dengan memberikan jaminan kerugian sampai 95%. Besarnya pinjaman bisa mencapai \$300.000 (sekitar Rp4,35 miliar) dengan jangka waktu sampai 40 tahun.

Di Australia terdapat tiga skema pembiayaan *Young Farmer Finance Scheme* yang difasilitasi Rural Finance untuk petani milenial berusia kurang dari 40 tahun. Ketiga macam fasilitas pinjaman tersebut adalah: (1) Pembelian bahan baku dan peralatan, berjangka waktu delapan tahun dengan suku bunga 2% lebih rendah dari tingkat bunga

komersial selama tiga tahun pertama, (2) Pembelian tanah, berjangka waktu 15 tahun dengan tingkat suku bunga 2% lebih rendah dari tingkat bunga komersial selama lima tahun pertama, dan (3) *One to grow*, diperuntukkan bagi petani milenial yang ingin membeli lahan pertanian pertama kali dengan tujuan berusaha pertanian komersial, berjangka waktu sampai 12 tahun dengan diskon suku bunga 1% dari suku bunga komersial selama lima tahun.

Uni Eropa menerapkan kebijakan insentif melalui dua skema, yaitu: (1) Skema pensiun dini (*early retirement schemes*), yaitu skema pemberian insentif kepada petani berusia antara 55–66 tahun yang bersedia mentransfer usaha pertanian mereka kepada petani milenial, dan (2) Skema petani muda (*the young farmers scheme*), yaitu skema insentif untuk menarik pemuda berusia kurang dari 40 tahun ke sektor pertanian. Selama periode 2007–2013, sebanyak 24 negara UE menerapkan skema bantuan petani milenial, sementara 16 negara UE menerapkan skema pensiun dini. Untuk skema petani milenial, negara Uni Eropa berkewajiban menggunakan anggaran nasional sampai 2%.

Jepang memanjakan petani dengan berbagai insentif. Pertama, subsidi pendapatan bagi petani tanaman

berdasarkan volume produksi dan luas lahan. Kedua, subsidi pendapatan petani untuk produk strategis, sistem tumpang sari, sistem pertanian terpadu, dan lahan produktif. Ketiga, subsidi pendapatan petani padi dan subsidi selisih harga. Keempat, insentif tambahan untuk peningkatan mutu, peningkatan skala produksi, pertanian organik, kelompok petani, dan promosi bisnis. Dengan berbagai insentif tersebut, rata-rata penghasilan petani Jepang mencapai 10 juta yen (Rp1,34 miliar)/tahun, 25-30% lebih tinggi dibanding pendapatan per kapita penduduk.

Di Korea Selatan, kebijakan regenerasi petani dilakukan melalui *program farm successor postering*, petani milenial dapat memperoleh pinjaman selama 10 tahun. Di Thailand, negara yang berslogan “*kitchen of the world*” (dapur dunia), regenerasi petani berlangsung melalui program petani muda cerdas (*young smart farmers*) dengan batasan umur kurang dari 45 tahun. Pemerintah Thailand membuat kebijakan reformasi lahan pertanian, kartu kredit petani, menyediakan dana yang mudah diakses, dan mempromosikan profesi pertanian secara positif. Melalui model ekonomi “Thailand 4.0”, pemerintah Thailand menargetkan pendapatan petani sampai 7 kali lipat, dari

56.000 Baht (Rp26,60 juta) menjadi 390.000 Baht (Rp185,25 juta) pada tahun 2037.

Di Indonesia, pemberdayaan petani milenial diimplementasikan melalui berbagai program sekolah lapang petani baik di dalam maupun di luar negeri dan modernisasi alat dan mesin pertanian, serta Program Sejuta Petani Milenial. Namun, permasalahan teknis (lahan, teknologi, risiko gagal), ekonomis (modal, rantai pasar, fluktuasi harga), dan politis (kebijakan pemerintah) yang cukup berat menyebabkan mereka tetap enggan berprofesi sebagai petani. Bagi generasi milenial, bekerja sebagai pengemudi online, menjadi *youtuber* atau *influencer*, pedagang kaki lima (PKL), buruh pabrik di kota-kota besar, atau menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri, jauh lebih bergengsi daripada menjadi petani di perdesaan. Tidak mengherankan jika daerah-daerah perdesaan mulai sepi dari kegiatan pertanian yang ditinggalkan generasi milenialnya. ***

Harian Bhirawa, Selasa, 28 September 2021



12.

KOPERASI DI TANGAN GENERASI MILENIAL

Ada dua survei menarik tentang pengetahuan generasi muda milenial terhadap koperasi. Pada survei pertama di sebuah kampus di Jawa Tengah, peneliti mengajukan satu pertanyaan, “Apakah koperasi kumpulan orang atau modal ?” Hasilnya, 69 persen mahasiswa menjawab bahwa koperasi adalah kumpulan modal dan 31 persen menjawab koperasi sebagai kumpulan orang (Dalimunte, 2011). Pada survei kedua di Jakarta, peneliti bertanya kepada beberapa responden milenial tentang persepsi dirinya terhadap koperasi (WE Online, 2019). Responden pertama, *data entry finance* di salah satu perusahaan swasta, menjawab bahwa koperasi adalah simpan pinjam ibu-ibu PKK. Responden kedua, *digital marketing* di salah satu perusahaan swasta, menilai bisnis koperasi itu *out of date* dan cenderung tidak berkembang. Responden ini

menjelaskan generasi muda sekarang lebih tertarik membahas *start-up* dibandingkan koperasi. Jika kedua survei tersebut diperluas saat ini, maka dapat dipastikan menghasilkan kesimpulan bahwa generasi milenial usia 17-30 tahun yang jumlahnya bisa mencapai 60 persen dari total penduduk Indonesia tidak paham dan tidak tertarik pada koperasi.

Ribuan Masalah

Sejak 75 tahun koperasi ditulis dalam UUD 1945, sudah ribuan pembahasan tentang koperasi. Ada ribuan masalah ditemukan dan ribuan solusi ditawarkan untuk membangun koperasi sesuai cita-cita Dr. Mohammad Hatta, Proklamator dan Bapak Koperasi Indonesia. Menurut Bung Hatta, koperasi adalah usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan semangat tolong menolong yang didorong oleh keinginan memberi jasa kepada kawan berdasarkan prinsip "*seorang untuk semua dan semua untuk seorang*" (Alam, 2006). Namun, cita-cita tersebut bagaikan mimpi di siang bolong. Menurut Soelarso (2018), **Koordinator Majelis Pakar Dewan Koperasi Indonesia (DEKOPIN)**, setelah berumur lebih dari setengah abad, sosok koperasi Indonesia masih setara dengan **usaha**

mikro dan kecil dan bernuansa **kemiskinan**. Koperasi masih dalam sosok **kecil-lemah-sakit-tergantung-kuno**, jauh dari yang seharusnya yaitu **besar-kuat-sehat-mandiri-modern**.

Koperasi masih menjadi soko guru ekonomi paling loyo (Sutawi, Bhirawa 23 Juli 2014). Secara kuantitatif kinerja koperasi tidak lagi mengesankan, bahkan secara kualitatif peran koperasi sangat mengenaskan. Kemenkop UKM (2019) menunjukkan jumlah koperasi menurun menjadi 123.048 unit dari 203.701 unit (2013), dan jumlah anggota menurun menjadi 22.463.738 orang dari 35.258.176 orang (2013). Kontribusi koperasi terhadap PDB (Produk Domestik Bruto) hanya 5 persen, jauh di bawah BUMN 25 persen, dan BUMS 70 persen. Kondisi ini jauh berbeda dibandingkan koperasi di beberapa negara maju, di mana kontribusinya terhadap PDB sudah lebih dari 10 persen, seperti Finlandia 16,1 persen, Selandia Baru 13,9 persen, Swiss 11 persen, dan Belanda 10,2 persen.

Dalimunte (2006) mengungkapkan tujuh masalah mendasar koperasi: (1) koperasi tidak dipahami sebagai gerakan bersama (*society movement*) untuk menciptakan kehidupan yang lebih berpengharapan dan bermartabat, (2) tujuan koperasi hanya ditentukan para elite organisasi tanpa

melibatkan anggota, (3) koperasi tidak mengedepankan kolektivitas pemberdayaan (*empowering*) segenap unsur organisasi, (4) distribusi hasil koperasi tidak berkeadilan, (5) kepemimpinan yang lemah, (6) jiwa kewirausahaan yang lemah, dan (7) *management skill* yang rendah. Sutawi (2014) menambahkan empat masalah yang menyebabkan kinerja koperasi Indonesia sangat rendah: (1) koperasi tidak memiliki sumberdaya manusia berkualitas, (2) lemah permodalan, (3) tidak memiliki jaringan bisnis yang luas, dan (4) keberpihakan pemerintah semakin rendah. Terakhir, koperasi Indonesia bahkan tidak memiliki payung hukum yang baru, setelah UU Perkoperasian 2012 dibatalkan MK melalui putusan bernomor 28/PUU-XI/2013 karena dinilai bertentangan dengan UUD 1945, dan terpaksa kembali ke rezim koperasi di bawah UU Perkoperasian 1992. Masalah-masalah tersebut bersifat laten dan sistemis, bagaikan penyakit kanker yang secara perlahan-lahan membunuh ribuan koperasi. Sekretaris Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM), Prof Rulli Indrawan mengatakan selama 2016-2019 sebanyak 81.686 koperasi di Indonesia dibubarkan karena mandeg dan nakal (Kompas.com, 2020). Pembubaran terbesar terjadi tahun 2016 sebanyak 45.629

koperasi, tahun 2017 sebanyak 32.778 koperasi, tahun 2018 sebanyak 2.830 koperasi, dan terakhir tahun 2019 sebanyak 449 koperasi.

Koperasi Digital

Indonesia akan memasuki masa bonus demografi selama rentang waktu 2020-2035 yang mencapai puncaknya pada tahun 2030. Pada periode tersebut komposisi penduduk Indonesia akan didominasi oleh kelompok usia produktif. Sektor koperasi memiliki tantangan untuk bisa mengakomodasi kebutuhan dan karakter generasi milenial, yaitu cepat dan tepat dalam mengambil keputusan, tak terbatas ruang dan waktu, serta menyukai hubungan sosial. Koperasi memiliki tantangan untuk bisa memanfaatkan teknologi digital dalam pengelolaan bisnis untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pelayanan kepada anggota. Apabila tantangan-tantangan tersebut bisa dilalui, maka koperasi dapat menjadi modal sosial yang potensial untuk dikembangkan sebagai kekuatan kolektif, efisien, dan produktif dalam rangka mencapai kesejahteraan bersama

Bagi pihak-pihak yang optimistis, terutama pejabat Kementerian Koperasi dan UKM, Dinas Koperasi dan UKM,

dan aktivis koperasi, koperasi diyakini mampu bermain dalam gelombang teknologi dan informasi digital. Budaya generasi milenial yang sering membentuk komunitas juga bisa menjadi peluang untuk rebranding koperasi. Koperasi dapat diposisikan sebagai wadah berkumpulnya orang-orang yang memiliki kesamaan kepentingan, sehingga dapat menjadi *co-working place* bagi generasi muda milenial di mana terjadi *sharing economy* antara anggotanya secara langsung. Sayangnya, gagasan mulia ini masih terganjal masalah regulasi. UU Koperasi No. 25 Tahun 1992 tidak memadai untuk memberikan stimulasi daya tarik pengembangan koperasi bagi generasi milenial di Tanah Air. Menurut UU untuk mendirikan koperasi itu diperlukan 20 orang sebagai syarat awal. Akibatnya, anak-anak muda yang mau memulai bisnis menggunakan jalur koperasi tidak muncul. Di luar negeri untuk mendirikan bisnis koperasi itu hanya perlu 2 orang sesuai International Co-operative Law Guidance.

Bagi pihak-pihak yang pesimistis, koperasi semakin tidak menarik karena tak mengikuti laju zaman, sehingga tidak akan dikenal lagi oleh generasi milenial mendatang. Koperasi saat ini berada di dunia nyata perdagangan bebas

yang penuh persaingan. Dalam menghadapi dunia nyata seperti itu tokoh pemikir koperasi dunia dan perumus jatidiri koperasi ICA 1995 Ian McPerson memberi nasihat, *“Masalahnya terpulang pada diri kita sendiri, sejauh mana kita mempunyai wawasan, percaya diri dan disiplin untuk memasuki dunia nyata secara agresif, atau menunggu saja sampai dunia nyata menenggelamkan kita.”* Dalam lingkungan seperti itu koperasi Indonesia diyakini akan kalah bersaing dan tidak mampu menghadapi lawan-lawannya. ***

Harian Bhirawa, 15 Juli 2020



13.

KEDAULATAN PANGAN HASIL PETERNAKAN

Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi manusia (HAM) yang dijamin dalam UUD 1945. Dalam rangka menjamin HAM atas pangan, pemerintah dan DPR telah mengesahkan UU No. 18/2012 tentang Pangan, menggantikan UU Pangan No. 7/1996. Berbeda dengan UU Pangan lama yang hanya mengamankan ketahanan pangan, UU Pangan baru mengandung tiga amanat sekaligus, yaitu kedaulatan, kemandirian, dan ketahanan pangan (K3P). Kedaulatan pangan adalah hak negara dan bangsa yang secara mandiri menentukan kebijakan pangan dan sistem pangan sesuai dengan potensi sumberdaya lokal. Kemandirian pangan adalah kemampuan negara dan bangsa dalam memproduksi pangan dari dalam negeri dengan memanfaatkan potensi

sumberdaya alam, manusia, sosial, ekonomi, dan kearifan lokal. Ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif. Dalam bahasa sederhana, kata kunci kedaulatan pangan adalah sistem pangan lokal, kemandirian pangan adalah produksi pangan lokal, dan ketahanan pangan adalah kecukupan pangan lokal. Sistem pangan lokal menyangkut kebijakan produksi dan distribusi pangan sampai siap dikonsumsi. Dengan demikian, kedaulatan pangan merupakan prasyarat tercapainya kemandirian dan ketahanan pangan.

Upaya mewujudkan K3P dari hasil peternakan, seperti daging, susu, dan telur, merupakan pekerjaan rumah yang sangat berat bagi negara dan bangsa Indonesia. Meskipun terdapat sumberdaya lokal yang melimpah, sampai saat ini Indonesia belum mampu memproduksi pangan hasil peternakan lokal yang cukup bagi warga negaranya. Hal ini dibuktikan pada sistem produksi peternakan dari hulu sampai hilir yang masih mengandalkan sumberdaya dari luar negeri.

Pertama, ketergantungan terhadap sarana produksi, utamanya bibit ternak dan bahan pakan impor masih sangat

tinggi. Pada industri ayam ras, ketergantungan Indonesia terhadap bibit *grand parent stock* (GPS) impor dari Amerika dan Eropa mencapai 100%. Indonesia mengimpor sekitar 650.000 ekor bibit GPS senilai Rp 234 miliar setiap tahun. Pada industri sapi potong, Indonesia mengimpor sapi bakalan dari Australia sebanyak 400.000 ekor pada 2013 senilai sekitar Rp 5,04 triliun. Jumlah tersebut diperkirakan meningkat akibat kegagalan Program Swasembada Daging Sapi 2014. Dalam waktu yang bersamaan telah terjadi pengurangan dan pemotongan sapi betina lokal produktif yang mencapai 200 ribu ekor per tahun, atau sekitar 80% sapi yang dipotong di RPH di beberapa wilayah kantong ternak (Bappenas, 2010). Hal ini menyebabkan stok bibit sapi lokal semakin berkurang dan pada gilirannya menambah impor sapi bibit dan bakalan.

Selain itu, pada 2013 Indonesia juga mengimpor jagung sebanyak 3 juta ton senilai Rp 9 triliun untuk memenuhi kebutuhan pakan. Jumlah tersebut diperkirakan meningkat menjadi 3,5 juta ton pada 2014 karena keterbatasan produksi jagung dalam negeri. Ketergantungan yang tinggi terhadap bibit ternak dan bahan pakan impor memberi ancaman yang sangat nyata terhadap masa depan

industri peternakan dalam negeri. Jika pasokan bibit ternak dan bahan pakan impor tersendat atau bahkan berhenti sama sekali, maka produksi daging sapi, daging ayam, dan telur ayam ras dalam negeri akan mengalami kegoncangan.

Kedua, kontribusi investasi asing pada industri peternakan masih besar. Pada periode 2009-2012 realisasi investasi subsektor peternakan mencapai Rp 2,682 triliun, terdiri PMDN Rp 1,860 triliun (69%) dan PMA Rp 822 miliar (31%) (Ditjen PKH, 2013). Hal ini berarti bahwa industri peternakan Indonesia belum mampu memanfaatkan sumberdaya ekonomi lokal secara maksimal, sehingga nilai tambah industri peternakan yang dinikmati oleh dan untuk kesejahteraan bangsa asing masih cukup besar.

Ketiga, konsumsi produk peternakan masih dipenuhi dari produk impor. Hal ini dapat dilihat pada neraca ekspor dan impor subsektor peternakan periode 2010-2012 yang selalu defisit dalam jumlah besar, yaitu sekitar 1-1,5 miliar US\$ atau Rp 12-18 triliun per tahun (Ditjen PKH, 2013). Ini berarti bahwa K3P hasil peternakan masih jauh dari harapan, karena pemenuhan pangan berupa daging, susu, dan telur masih mengandalkan komoditas impor.

Prof. Dwi Andreas Santosa, Guru Besar IPB, mengungkapkan fakta bahwa kesalahan besar pembangunan pertanian yang mengandalkan konsep ketahanan pangan adalah menempatkan pangan hanya sebagai komoditas perdagangan dan petani/peternak kecil sebagai obyek yang berada di lapisan terbawah piramida struktur pertanian di Indonesia. Lapisan piramida teratas dihuni hanya oleh 0,2 persen penduduk yang tersusun dari konglomerasi agribisnis, pertanian kapitalis, pengusaha sarana produksi, serta jaringan industri pangan. Jumlah yang sangat sedikit tersebut mendapatkan kue pembangunan terbesar, memperoleh akses dan penguasaan terhadap sumberdaya produktif terbanyak, mendapatkan kemewahan dari institusi-institusi finansial dan asuransi, mendapatkan subsidi terbesar baik langsung maupun tidak langsung, dan didukung kebijakan pemerintah yang sangat berpihak kepada mereka. Di sisi lain, petani/peternak kecil ditempatkan hanya sebagai pemakai teknologi dan sarana produksi pertanian yang semuanya berasal dari luar mereka, akses terhadap perbankan dan asuransi praktis tertutup, tak ada jaminan ketika terjadi kegagalan panen dan tak terlindungi ketika harga hasil produksi merosot tajam (Kompas, 26/3/2014).

Menurut Prof. Andreas Santosa, solusi untuk mewujudkan kedaulatan pangan adalah bahwa presiden dan pemerintah mendatang harus memiliki program membalikkan struktur piramida pertanian dengan memuliakan petani/peternak di posisi tertinggi (Kompas, 16/5/2014). Pada situasi politik transaksional, di mana untuk menjadi legislator dan presiden membutuhkan biaya sangat besar, solusi tersebut akan sangat sulit terealisasi. Untuk menjadi pemimpin di negeri ini, seorang calon presiden butuh dana Rp 3 triliun (Kompas, 26/01/2014) sampai Rp 7 triliun (Forbes, 20/11/2013). Salah satu cara untuk mendapatkan dana tersebut adalah berkoalisi dengan para pengusaha. Koalisi penguasa dan pengusaha ini selanjutnya akan melahirkan kebijakan-kebijakan balas jasa yang menguntungkan pengusaha, seperti kemudahan mengimpor berbagai sarana produksi dan hasil produksi peternakan, serta berinvestasi bagi investor asing. Dengan demikian, amanat UU untuk mewujudkan kedaulatan pangan hasil peternakan di negeri ini tampaknya akan tetap menjadi mimpi tanpa realisasi. ***

Trobos, Selasa 1 Juli 2014



14.

DINAMIKA DI PASAR HEWAN

Awal Juni 2014 lalu saya mengantar Dr. Ir. Rochadi Tawaf dan Dr. Ir. Taslim, M.P, keduanya pakar agribisnis sapi potong dari Fakultas Peternakan Unpad, melakukan survei ke beberapa pasar hewan dan pedagang sapi di Kabupaten Ngawi, Madiun, dan Magetan, Jawa Timur. Tujuannya untuk mengetahui pasokan sapi potong, baik jantan maupun betina, yang dikirim ke Bandung dan Jakarta. Di sebuah pasar hewan besar yang berkapasitas 1.000 ekor sapi kami menemui kepala pasar yang kebetulan bergelar Sarjana Peternakan. Di sini kami memperoleh beberapa informasi yang cukup menarik mengenai perdagangan sapi di pasar hewan.

Pertama, bahwa jumlah sapi yang masuk di pasar hewan ini tidak tercatat dengan teliti, meskipun sapi masuk dari satu pintu. Pasar hewan tidak mencatat jumlah, jenis sapi, jenis kelamin, umur, atau asal sapi yang masuk. Yang

penting bagi petugas adalah target PAD terpenuhi. Setiap sapi masuk dikenai retribusi Rp 3.000,00 per ekor. Sapi yang masuk dituntun atau diangkut *pick up* dikenakan retribusi sesuai jumlah sapi. Tetapi, sapi yang diangkut truk, apalagi ditutup terpal, retribusinya tergantung teriakan blantik yang membawa. Jika blantik bilang “sepuluh”, maka dia cukup membayar retribusi Rp 30.000,00, meskipun dalam truk itu berisi 15 ekor sapi. Petugas tidak sempat memeriksa jumlah dan data/informasi lain tentang sapi itu. Jika itu dilakukan, maka akan terjadi kegaduhan di pintu masuk karena antrian yang semakin panjang. Blantik membawa sapi ke pasar hewan ini pada waktu yang hampir bersamaan yaitu jam 4-5 pagi. Jadi, jumlah sapi yang diperdagangkan di pasar hewan itu lebih banyak daripada yang tercatat di buku catatan pasar hewan. Di pasar hewan ini juga tidak ada dokter hewan yang siap melayani pemeriksaan sapi dan memberi surat keterangan kesehatan hewan yang diperlukan para blantik.

Kedua, penjualan sapi dikuasai oleh blantik *dadung*. Dadung adalah istilah bahasa Jawa yang berarti tali besar. Blantik dadung bekerja berkelompok, masing-masing kelompok beranggota 4-6 orang. Blantik dadung ini tidak bermodal uang, cukup koin Rp 500,00. Beberapa kelompok

blantik dadung mencegat setiap pembawa (pemilik atau pedagang) sapi yang datang, kemudian tawar-menawar mengenai harga sapi tersebut. Jika terjadi kesepakatan, maka blantik dadung akan memberi uang koin Rp 500,00 kepada pembawa sapi sebagai tanda jadi. Selanjutnya, blantik dadunglah yang akan menjual sapi di dalam pasar hewan, sedangkan pembawa sapi menunggu di sekitar pasar hewan. Jika sapi terjual, pembawa sapi akan memperoleh uang hasil penjualan sapi, sedangkan sisa penjualan dibagi rata sesuai anggota kelompok blantik dadung tersebut. Jika tidak terjual, maka sapi dikembalikan kepada pembawanya. Di arena pasar hewan itu jumlah orang dan jumlah sapi hampir sama. Mereka adalah pembeli sapi dan kelompok blantik dadung. Bagi peternak, perlu berhati-hati jika mau menjual sapi sendiri ke pasar hewan. Jika lengah, maka sapi bisa hilang di tangan blantik dadung yang tidak bertanggung jawab. Inilah rantai pemasaran sapi sampai pasar hewan: dari peternak - blantik kecil (desa) – blantik besar (kecamatan) – blantik dadung (pasar hewan) – pembeli.

Ketiga, sapi merah mendominasi pasar hewan. Hampir 90 persen sapi yang diperdagangkan di pasar hewan di daerah ini berwarna merah (tepatnya coklat), 10 persen

sisanya berwarna putih. Sapi merah adalah istilah lain untuk sapi Limpo (Limousin PO) dan Simpo (Simental PO). Seorang Staf Ahli Bupati, yang mantan Kepala Dinas Peternakan, yang kami kunjungi di kantornya memberikan penjelasan mengenai fenomena tersebut. Pada periode 1970-an pemerintah memperkenalkan IB kepada peternak. Ketika itu peternak tidak tertarik dan lebih suka mengawinkan sapinya secara alami. Dengan cara IB gratis, akhirnya peternak mau sapinya di-IB. Periode 1980-an peternak menanggung 50 persen biaya IB, dan sejak 1990-an peternak membayar 100 persen biaya IB. Sejak IB diperkenalkan sampai sekarang, semen yang di-IB-kan di daerah itu adalah jenis Limousin dan Simental. Hasilnya bagus. Secara teknis, penampilan sapi merah lebih baik daripada sapi putih, dan secara ekonomis, harga pedet dan bakalah sapi merah lebih mahal 2-4 juta dibanding sapi putih. Sejak saat itu peternak tidak mau lagi sapinya di-IB sapi putih. Fakta ini adalah bukti keberhasilan program IB, sekaligus “keberhasilan” memunahkan sapi lokal. Inilah penjelasan yang cukup ilmiah, mengapa sapi merah mendominasi pasar hewan di daerah ini.

Keempat, pemotongan sapi betina produktif terus terjadi. Seorang pedagang dan pemotong sapi yang kami temui di pasar hewan mengungkapkan bahwa tidak ada pantangan bagi jagal untuk memotong sapi betina produktif, meskipun ia tahu hal itu dilarang undang-undang. Dari 10 ekor sapi yang ia potong seminggu, sebanyak 2-3 ekor adalah betina produktif. Alasannya, harga beli sapi betina umumnya lebih murah 1-2 juta dibanding sapi jantan. Dr. Rochadi Tawaf punya banyak bukti berupa foto-foto janin yang dikeluarkan dari perut sapi betina yang dipotong di RPH di Bandung dan Jakarta. Informasi tersebut menambah bukti bahwa praktek pemotongan sapi betina produktif, baik yang ada maupun tidak ada janin dalam perut, masih terjadi secara masif di semua RPH di Indonesia.

Kelima, pengiriman sapi dari Jatim ke Bandung dan Jakarta menurun drastis. Dari pasar hewan kami menuju Magetan untuk menemui seorang pedagang sapi antar propinsi yang berpengalaman mengirim sapi ke Bandung dan Jakarta sejak tahun 1990. Pedagang besar ini biasa mengirim satu truk (16 ekor) sapi ke Bandung dan Jakarta setiap hari, atau 480 ekor setiap bulan. Namun, sejak April 2014, ia hanya mengirim satu truk sapi setiap bulan. Itupun hanya

sapi putih untuk memenuhi permintaan pedagang bakso yang setia menggunakan sapi lokal agar tekstur baksonya kenyal. Penyebabnya adalah harga sapi Jawa Timur Rp 6.000/kg lebih mahal dibanding harga sapi di Jabar dan DKI. Keputusan Pemprov Jatim melarang sapi impor masuk Jatim telah berdampak pada kenaikan harga sapi hidup Rp 34.000/kg, sedangkan di Jabar dan DKI yang kemasukan sapi impor hanya Rp 28.000/kg. Data resmi Disnak Jatim mencatat jumlah sapi yang dijual ke luar propinsi selama tahun 2013 sebanyak 131.707 ekor.

Keenam, data populasi sapi tidak akurat. Hasil Sensus Ternak 2011 yang dilaksanakan BPS mencatat populasi sapi dan kerbau di Indonesia mencapai 16,7 juta ekor, terdiri sapi potong 14,8 juta ekor, sapi perah 597,1 ribu ekor, dan kerbau 1,3 juta ekor. Atas dasar data tersebut, pemerintah berkeyakinan Program Swasembada Daging Sapi (PSDS) 2014 akan tercapai. Akan tetapi, harga daging sapi yang melambung mencapai Rp 100.000/kg sampai saat ini merupakan indikasi bahwa data populasi sapi potong yang digunakan pemerintah tidak akurat. Mendata populasi sapi bukan urusan teknis dan ekonomis semata, tetapi juga politis. Keterbatasan biaya, tenaga, dan waktu tidak memungkinkan

petugas menjangkau seluruh peternak yang tersebar sampai pelosok perdesaan. Sebagai jalan pintas adalah menggunakan metode “quick count” di tingkat RT atau desa. Berbeda dengan “quick count” pada pemilu yang akurasi mencapai 99 persen, pada sensus sapi akurasinya sangat rendah. Dari sisi politis, pejabat daerah selalu dituntut kenaikan populasi sesuai target. Jika tidak tercapai, maka risiko bagi pejabat itu adalah dimarahi atasan atau demosi jabatan. Oleh karena itu, cara agar selamat adalah selalu melaporkan data dengan prinsip “asal atasan senang”. Staf Ahli Bupati yang kami temui secara tegas menyatakan bahwa akurasi data populasi sapi hanya sekitar 50 persen. ***

Trobos, Januari 2015



15.

EMPAT SEHAT LIMA SAMPOERNA

Tidak banyak yang tahu dan tidak banyak yang peduli bahwa 2 Oktober diperingati sebagai Hari Susu Nasional (National Milk Day), melengkapi 1 Juni sebagai Hari Susu Dunia (World Milk Day). Di Indonesia susu tidak diperlakukan sebagai makanan pokok keluarga kecuali untuk balita, sehingga konsumsi susu sangat rendah. BPS (2017) mencatat konsumsi susu penduduk Indonesia setara 16,5 liter/kapita/tahun dari target 20 liter/kapita/tahun. Konsumsi ini merupakan yang terendah di Asia Tenggara dibanding Brunei Darussalam 129,1 liter, Malaysia 50,9 liter, Singapura 46,1 liter, dan Vietnam 20,1 liter/kapita/tahun. Compass Research (2015) bahkan mencatat konsumsi susu cair Indonesia hanya 3,36 liter/kapita/tahun setara 10 tetes susu/kapita/hari. Rendahnya konsumsi susu penduduk

Indonesia berkaitan dengan produksi, tradisi, dan kesadaran gizi.

Populasi sapi perah di Indonesia sekitar 550 ribu ekor, di mana 99% di antaranya ada di Jawa. Pusat populasi sapi perah terbesar terdapat di Jawa Timur sebanyak 50%, Jawa Tengah 25%, dan Jawa Barat 23%. Populasi sapi perah sebanyak itu menghasilkan produksi susu sebanyak 909,6 ribu ton yang hanya mencukupi 20% dari kebutuhan susu 265 juta penduduk Indonesia, sisanya sebanyak 80% masih harus diimpor dalam bentuk *skim milk powder*, *anhydrous milk fat*, dan *butter milk powder* dari berbagai negara, seperti Australia, Selandia Baru, Amerika Serikat, dan Uni Eropa. Sebanyak 90% usaha peternakan sapi perah tergolong usaha peternakan rakyat dengan skala kepemilikan peternak sapi perah belum ekonomis yaitu hanya 3–4 ekor/KK, idealnya 7–10 ekor sapi laktasi per KK. Produktivitas sapi perah juga rendah hanya sekitar 10 liter/ekor/hari, idealnya minimal 15 liter/ekor/hari. Rendahnya rata-rata produktivitas sapi perah tersebut disebabkan bibit sapi yang kurang bermutu, kurang pasokan pakan yang bernutrisi, harga pakan konsentrat mahal, dan manajemen pemeliharaan kurang baik.

Minum susu bukan tradisi penduduk Indonesia, seperti minum kopi, teh, dan jamu, yang telah turun-temurun karena ketersediaan hasil perkebunan dan rempah-rempah yang melimpah. Produksi susu sapi perah di Nusantara baru dimulai sejak abad 19 untuk memenuhi kebutuhan susu bagi orang-orang Belanda. Pada waktu itu Belanda merintis pengembangan usaha sapi perah di daerah dataran tinggi sejuk yang kemudian dikenal sebagai Jalur Susu, yaitu Pasuruan-Malang (Jawa Timur), Salatiga-Boyolali (Jawa Tengah), dan Lembang-Bandung-Cisarua-Cimahi (Jawa Barat). Sapi-sapi Fries Holland (FH) jantan didatangkan langsung dari Belanda untuk disilangkan dengan sapi lokal. Bagi penduduk pribumi saat itu, susu sapi merupakan makanan mewah bagi pejabat, orang kaya, dan kaum terpelajar.

Alasan mengapa masyarakat Indonesia tidak terbiasa meminum susu juga terungkap dalam buku "The History of Java" karya Gubernur Jenderal Inggris Thomas Stamford Raffles yang diterbitkan pada 1817. Raffles menyayangkan potensi susu sapi di Jawa yang disia-siakan masyarakat. Raffles menemukan fakta mengapa konsumsi susu di Asia Tenggara rendah. Ternyata mereka

tidak berkenan meminum susu hewan, karena merasa jijik seperti meminum darah. Bagi mereka, susu seperti darah yang berwarna putih. Tradisi minum susu dimulai oleh masyarakat dengan kebudayaan gembala. Sejak 9000 SM hingga 8000 SM, susu sudah dikonsumsi di Timur Tengah. Masyarakat Eropa baru mulai meminum susu 3300 SM hingga 1000 SM yang meyakini berkhasiat untuk menguatkan tubuh. Sampai abad ke-15 tradisi gembala di Nusantara belum mantap sehingga sumber makanan hewani berbasis ternak lebih sedikit dibandingkan dengan sumber makanan nabati. Apalagi, sapi disakralkan dalam tradisi Hindu.

Alasan lain rendahnya konsumsi susu adalah intoleransi laktosa (*lactose intolerance*), yaitu ketidakmampuan mencerna laktosa yang merupakan sejenis gula di dalam susu. Hal ini disebabkan oleh kurangnya atau bahkan tidak adanya enzim laktase untuk mencerna laktosa di usus halus. Normalnya, laktase mengubah laktosa menjadi glukosa dan galaktosa yang akan diserap lapisan usus ke dalam aliran darah. Namun, kekurangan laktase membuat laktosa menumpuk di dalam usus, sehingga menimbulkan gangguan pencernaan. Di usus besar, laktosa akan

berinteraksi dengan bakteri, sehingga orang dengan intoleransi laktosa akan mengalami perut kembung, buang angin terus menerus, dan diare setelah mengonsumsi susu sapi.

Di Indonesia, kebiasaan minum susu mulai dikampanyekan oleh Lembaga Makanan Rakyat (LMR) di bawah ahli gizi Poorwo Soedarmo pada 1951 melalui konsep "Empat Sehat Lima Sempurna". Soedarmo menilai susu adalah penyempurna dalam menu makan yang dikonsumsi sehari-hari, karena mengandung asam amino esensial yang lengkap dan bermutu tinggi. *Journal of Sports Science and Medicine* mencatat *Biological Value* (BV) susu adalah 91. Nilai biologis adalah cara mengukur kualitas suatu protein berdasarkan kemampuan tubuh dalam menyerap protein tersebut. Secara sederhana, BV adalah presentase protein yang dapat diserap oleh tubuh. Nilai BV yang baik adalah 70-100. Bahan makanan dengan BV yang tinggi menandakan kandungan asam amino yang lengkap dan tinggi.

Konsep "Empat Sehat Lima Sempurna" yang dikampanyekan sejak 68 tahun yang lalu itu, ternyata tidak mampu mendorong masyarakat Indonesia untuk

meminum susu. Penyebabnya adalah kesadaran gizi yang rendah. BPS (2018) mencatat pengeluaran rata-rata per kapita sebulan kelompok makanan sebesar Rp 527.956. Pengeluaran tersebut digunakan untuk membeli rokok Rp 65.586 (12,42%), lebih banyak dibandingkan untuk beras Rp 61.455 (11,64%), bahkan untuk susu dan telur hanya Rp 29.357 (5,56%). Fakta tersebut membuktikan bahwa penduduk Indonesia lebih menyukai nikotin rokok penyebab penyakit jantung, paru-paru, kanker, dan gangguan kehamilan dan janin, daripada protein susu yang menyehatkan badan dan mencerdaskan otak. Bagi mereka konsep makan adalah “Empat Sehat Lima Sampoerna”, artinya setelah makan tidak disempurnakan dengan minum susu, melainkan dengan menghisap rokok. ***

Malang Post, Sabtu 3 Oktober 2019



16.

SALAH GIZI, KURANG PROTEIN BANYAK NIKOTIN

UU Pangan No 18/2012 mengamanatkan bahwa pemenuhan pangan sebagai kebutuhan dasar manusia diselenggarakan berdasarkan kedaulatan pangan, kemandirian pangan, dan ketahanan pangan. Ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhi pangan bagi negara sampai perseorangan yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau. Pemenuhan konsumsi pangan secara kualitas ditunjukkan dengan skor Pola Pangan Harapan (PPH) yang merupakan gambaran keragaman dan keseimbangan gizi. FAO-RAPA (1989) mendefinisikan PPH sebagai komposisi kelompok pangan utama yang bila dikonsumsi dapat memenuhi kebutuhan energi, protein, dan zat gizi lainnya. Hasil Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi (WNPG) X Tahun 2012 menetapkan Angka Kecukupan Gizi

(AKG) dalam PPH adalah energi 2.150 kkal/kapita/hari dan protein 57 g/orang/hari. AKG tersebut menunjukkan banyaknya kalori dan protein minimum yang diperlukan setiap orang Indonesia dalam sehari untuk dapat hidup sehat dan aktif.

Capaian konsumsi energi dan protein penduduk Indonesia telah melebihi AKG masing-masing sebesar 2.153 kkal/orang/hari dan 62,19 g/orang/hari (BPS, 2018). Namun demikian, skor PPH Indonesia baru mencapai 90,4 dari skor ideal 100. Hal ini disebabkan komposisi pangan yang dikonsumsi belum sesuai standar PPH. Diketahui penduduk Indonesia kelebihan konsumsi energi dari beras dan kekurangan konsumsi protein hewani. Konsumsi beras penduduk Indonesia mencapai 114,6 kg/orang/tahun. Tingkat konsumsi beras tersebut menjadikan Indonesia negara konsumen beras terbesar di dunia, jauh di atas rata-rata konsumsi beras dunia sebesar 60 kg, dan negara tetangga Malaysia 80 kg, Thailand 70 kg, serta Jepang 58 kg/orang/tahun. Jika konsumsi beras tersebut dibagi harian, maka orang Indonesia mengonsumsi beras 314 g/orang/hari atau 105 g sekali makan, lebih tinggi daripada standar PPH 275 g/orang/hari. Kelebihan energi ini diduga berkaitan erat

dengan banyaknya penderita diabetes di Indonesia. International Diabet Federation (IDF) Atlas 2017 melaporkan jumlah penderita diabetes usia 20-79 tahun mencapai 10,3 juta orang, dan menjadikan Indonesia peringkat keenam di dunia setelah Tiongkok, India, AS, Brazil, dan Meksiko.

Konsumsi protein penduduk Indonesia sebesar 62,19 g/orang/hari, terdiri protein nabati 46,41 g (74,63%) dan hewani 15,78 g (25,37%) yang berasal dari ikan 8,23 g, daging 4,2 g, dan telur dan susu 3,35 g. Konsumsi protein hewani tersebut masih tergolong rendah dan berada di bawah konsumsi protein hewani Thailand dan Filipina antara 40-50 g, dan Malaysia dan Brunei Darussalam sekitar 50-60 g. Rendahnya konsumsi protein hewani tersebut merupakan salah satu faktor penyebab tingginya angka prevalensi stunting (balita pendek) di Indonesia. Stunting didefinisikan sebagai kondisi anak usia 0-59 bulan, di mana tinggi badan menurut umur berada di bawah minus 2 Standar Deviasi ($<-2SD$) dari standar median WHO. Kemenkes (2018) memperkirakan ada 37,2 persen anak usia 0-59 bulan atau sekitar 9 juta anak Indonesia dengan kondisi stunting, yang berlanjut sampai usia sekolah 6-18 tahun. Organisasi

Kesehatan Dunia (WHO) menempatkan Indonesia sebagai negara ketiga dengan angka prevalensi stunting tertinggi di Asia pada 2017. Merujuk pada standar WHO, batas maksimalnya adalah 20 persen atau seperlima dari jumlah total anak balita. Stunting akan berdampak dan dikaitkan dengan proses kembang otak yang terganggu, di mana dalam jangka pendek berpengaruh pada kemampuan kognitif. Jangka panjang mengurangi kapasitas untuk berpendidikan lebih baik dan hilangnya kesempatan untuk peluang kerja dengan pendapatan lebih baik. Anak stunting yang berhasil mempertahankan hidupnya, pada usia dewasa cenderung akan menjadi gemuk (obese), dan berpeluang menderita penyakit tidak menular (PTM), seperti hipertensi, diabetes, kanker, dan lain-lain. Stunting juga diyakini akan dapat menghambat pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kemiskinan, dan memperlebar ketimpangan.

Rendahnya konsumsi protein hewani bukan sekedar masalah harga ikan, daging, susu dan telur yang relatif mahal, atau pendapatan per kapita penduduk yang rendah, tetapi juga menyangkut perilaku konsumsi bangsa. Dengan pendapatan per kapita Rp 4,67 juta/bulan, seharusnya orang Indonesia bisa memilah dan memilih makanan apa yang

sebaiknya dikonsumsi, dan makanan apa yang seharusnya dihindari. Bandingkan konsumsi protein hewani dengan konsumsi rokok. BPS (2018) mencatat pengeluaran rata-rata per kapita sebulan kelompok makanan sebesar Rp 527.956. Pengeluaran tersebut digunakan untuk membeli rokok Rp 65.586 (12,42%), mengalahkan jumlah pengeluaran untuk kebutuhan pangan seperti beras Rp 61.455 (11,64%), ikan (Rp 40.478), daging (Rp 24.978), dan telur dan susu (Rp 29.357). Fakta tersebut membuktikan bahwa penduduk Indonesia lebih menyukai racun nikotin rokok penyebab penyakit jantung, paru-paru, kanker, dan gangguan kehamilan dan janin itu daripada protein hewani yang menyehatkan badan dan mencerdaskan otak.

Riskesdas (2018) melaporkan 33,8% (89,570 juta) penduduk Indonesia (62,9% laki-laki dan 4,8% perempuan) adalah perokok. Angka tersebut menjadikan Indonesia negara dengan jumlah perokok terbanyak ketiga di dunia setelah Cina dan India, dan terbanyak pertama di Asean, jauh melebihi Philipina (16,62%), Vietnam (14,11%), Myanmar (8,73), Thailand (7,74), Malaysia (2,90%), Kamboja (2,07%), Laos (1,23%), Singapura (0,39%), dan Brunei (0,04%). Kemenkeu mencatat konsumsi rokok tahunan

meningkat dari 320,4 miliar batang tahun 2016 menjadi 334 miliar batang tahun 2017, dan mencapai 339,5 miliar batang tahun 2018. Jika dibagi jumlah perokok 89,570 juta, berarti perokok Indonesia rata-rata menghisap rokok 10,38 batang/orang/hari. Jika satu batang rokok berharga Rp 1.000, maka uang yang dibakar perokok Indonesia mencapai Rp 339,5 triliun per tahun atau Rp 930,137 miliar sehari. Konsumsi rokok sebanyak itu telah menyumbang lebih dari 230.000 kematian setiap tahun.

Perilaku salah gizi membawa dampak negatif terhadap kualitas Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia pada peringkat ke-87 dari 157 negara dan daya saing dunia (World Competitiveness) pada peringkat ke-32 dari 63 negara. Jika kondisi tersebut tidak segera diperbaiki, maka dipastikan Indonesia akan semakin terpuruk di tengah persaingan global yang semakin ketat. ***

Malang Post, Minggu 19 Oktober 2019



17.

PETERNAK AYAM BAHAGIA

Prospek peternakan ayam petelur di Indonesia sangat baik dilihat dari populasi, produksi, dan konsumsi. Populasi ayam petelur 2016 sebesar 161,35 juta ekor, produksi telur 1,49 juta ton, dan konsumsi telur 6,30 kg/kapita/tahun, meningkat masing-masing menjadi 166,72 juta ekor, 1,53 juta ton, dan 6,53 kg/kapita/tahun pada 2017. Prospek peternakan ayam petelur juga dapat dilihat dari indikator keuntungan dan Nilai Tukar Petani (NTP). Peternakan ayam petelur menghasilkan keuntungan antara Rp 1.000-3.000/kg telur. NTP subsektor peternakan pada 2017 mencapai 106,95 meningkat menjadi 107,34 pada 2018. NTP lebih dari 100 menunjukkan bahwa peternak sejahtera.

Kesejahteraan tidak diukur melalui indikator material saja, tetapi juga diukur melalui indikator kesejahteraan subjektif (*subjective well-being*) atau kebahagiaan (*happiness*). OECD (2013) memaknai kebahagiaan sebagai

evaluasi tingkat kepuasan hidup yang dinilai secara subyektif oleh penduduk terhadap kondisi obyektif kehidupan yang mencakup dimensi kepuasan hidup (life satisfaction), perasaan (affection), dan makna hidup (meaning of life). Pada Survei Pengukuran Tingkat Kebahagiaan (SPTK) 2017, BPS menguraikan ketiga dimensi tersebut menjadi 19 indikator. Untuk mengetahui tingkat kebahagiaan individu atau masyarakat, dilakukan wawancara menggunakan kuesioner terstruktur tentang kepuasan individu atau masyarakat terhadap 19 indikator kebahagiaan secara kuantitatif dengan jawaban berskala 0 hingga 10 yang merepresentasikan *ladder of life scale* (tangga skala hidup). Skor 0 menunjukkan jawaban yang paling tidak puas, sedangkan skor 10 merepresentasikan kondisi yang paling puas. Tingkat kepuasan peternak dibagi menjadi lima kategori: (1) 0.00-2.00, “Sangat Tidak Puas”; (2) 2.01-4.00, “Tidak Puas”; (3) 4.01-6.00, “Cukup Puas”; (4) 6.01-8.00, “Puas”; dan (5) 8.01-10.00, “Sangat Puas”.

Berdasarkan metode seperti digunakan BPS pada SPTK 2017, penulis melakukan survei untuk mengukur tingkat kebahagiaan peternak ayam petelur di Kabupaten Malang tahun 2019. Unit analisis adalah rumah tangga

peternak ayam petelur skala kecil dengan kepemilikan ayam petelur kurang dari 5.000 ekor yang dipilih secara acak (*random*) sebanyak 109 (20%) peternak dari 543 peternak ayam petelur di Kabupaten Malang. Skor kepuasan peternak terhadap 19 indikator Indeks Kebahagiaan disajikan pada Gambar 1. Skor-skor jawaban tersebut kemudian digunakan untuk menghitung Indeks Kebahagiaan. Tingkat kebahagiaan peternak diklasifikasi menjadi lima kategori: (1) 0.00-2.00, “Sangat Tidak Bahagia”; (2) 2.01-4.00, “Tidak Bahagia”; (3) 4.01-6.00, “Cukup Bahagia”; (4) 6.01-8.00, “Bahagia”; dan (5) 8.01-10.00, “Sangat Bahagia”.

Peternak ayam petelur menyatakan “Puas” (skor 6,01-8,00) terhadap delapan indikator dan “Sangat Puas” (skor 8,01-10,00) terhadap dua indikator Dimensi Kepuasan Hidup (Indikator ke-1-10), menghasilkan Indeks Kepuasan Hidup (IKH) sebesar 7,40 (Bahagia). Peternak menyatakan “Puas” terhadap tiga indikator Dimensi Perasaan (Indikator ke-11-13), menghasilkan Indeks Perasaan (IP) sebesar 7,40 (Bahagia). Peternak menyatakan “Puas” terhadap enam indikator Dimensi Makna Hidup (Indikator ke-14-19), menghasilkan Indeks Makna Hidup (IMH) sebesar 7,71 (Bahagia). Ketiga indeks (IKH, IP, dan IMH) menghasilkan

Indeks Kebahagiaan (IK) peternak sebesar 7,36 dan tergolong “Bahagia”.

Kepuasan peternak terhadap indikator Pendidikan dan Ketrampilan (Indikator ke-1) sebesar 6,73 (Puas) adalah paling rendah. Sebagian peternak berpendidikan rendah. Sebanyak 28 (26,03%) peternak berpendidikan SD, dan 72 (66,67%) SMP, sisanya 4 (3,7%) SMA, dan 4 (3,7%) PT. Tingkat pendidikan yang rendah berpengaruh terhadap kemampuan peternak untuk memahami dan mengaplikasikan teknologi dan inovasi yang berhubungan dengan perkembangan usahanya. Cuñado dan de Gracia (2012) menemukan dampak langsung dan tidak langsung pendidikan terhadap kebahagiaan. Dampak langsung adalah meningkatkan kepercayaan diri dan kebanggaan serta rasa senang karena mendapatkan pengetahuan. Dampak tidak langsung terlihat dari pengaruh pendidikan terhadap peluang kesempatan kerja yang lebih luas, pekerjaan yang lebih baik, penghasilan yang diharapkan lebih banyak, dan kesehatan yang lebih baik. Chen (2012) mengungkapkan bahwa pendidikan yang lebih tinggi membuka peluang lebih besar untuk menjalin relasi atau jaringan yang lebih luas. Upaya memberdayakan peternak dapat dilakukan dengan

memberikan pelatihan, penyuluhan, dan bimbingan kepada peternak sehingga memiliki pengetahuan dan keterampilan untuk meningkatkan jumlah produksi dan pendapatan.

Kepuasan peternak terhadap indikator Pekerjaan Utama (Indikator ke-2) sebesar 7,26 (Puas). Peternak rata-rata memelihara ayam 3.760 ekor dengan penghasilan rata-rata Rp 5,280 juta per bulan. Penghasilan peternak tersebut lebih besar daripada standar kemiskinan Bank Dunia 2 US\$ per kapita per hari (setara Rp 846.000 per bulan), Upah Minimum Kaputen Malang 2018 sebesar Rp 2,575 juta per bulan, dan pendapatan per kapita penduduk Indonesia 2018 IDR 56 juta per tahun (Rp 4,667 juta per bulan). Penghasilan peternak juga lebih besar daripada petani padi sebesar Rp 715.000-1.500.000 per bulan. Penghasilan rumah tangga berpengaruh positif terhadap kebahagiaan. Semakin tinggi pendapatan makin tinggi tingkat kebahagiaan (Yakubu and Aidoo, 2015; Angela, 2018).

Kepuasan peternak terhadap indikator Perasaan Tidak Cemas (Indikator ke-12) sebesar 6,23 (Puas) dan Perasaan Tidak Tertekan (Indikator ke-13) sebesar 6,30 (Puas). Usaha perunggasan skala kecil sangat rentan terhadap penularan penyakit yang membahayakan bagi

ternak dan kehidupan manusia, karena kemampuan ekonomi dan pengetahuan melaksanakan *biosecurity* sangat terbatas (Martindah et al., 2014). Masalah fluktuasi harga telur dan pakan merupakan risiko yang sering dihadapi pengusaha ayam petelur. Selain disebabkan faktor fundamental seperti kenaikan harga pakan dan DOC serta struktur pasar unggas cenderung oligopolistik di pasar input dan oligopsoni di pasar output, kenaikan harga telur disebabkan berkurangnya produksi telur akibat serangan penyakit pada ayam yang menyebabkan produksi menurun tajam (Nuryati dan Nur, 2012; Ilham et al. 2019).

Kepuasan peternak terhadap indikator Penguasaan Lingkungan (Indikator ke-15) sebesar 7,80 (Puas). Penguasaan lingkungan adalah kemampuan untuk mengembangkan keterampilan yang cocok dengan kegiatan atau pekerjaan mereka. Peternak memiliki pengalaman mengelola usaha peternakannya selama 5-20 tahun. Mereka telah mahir dalam mengelola usaha peternakannya, baik dari sisi teknis, ekonomis, sosial, maupun politis. Pemerintah daerah menyediakan tenaga penyuluh pertanian yang memiliki peranan penting dalam meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap peternak (Lamarang et al., 2017).

Penyuluhan yang baik mampu meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi peternak dan masyarakat sekitarnya (Kamarudin, et al., 2013; Maoba, 2016).

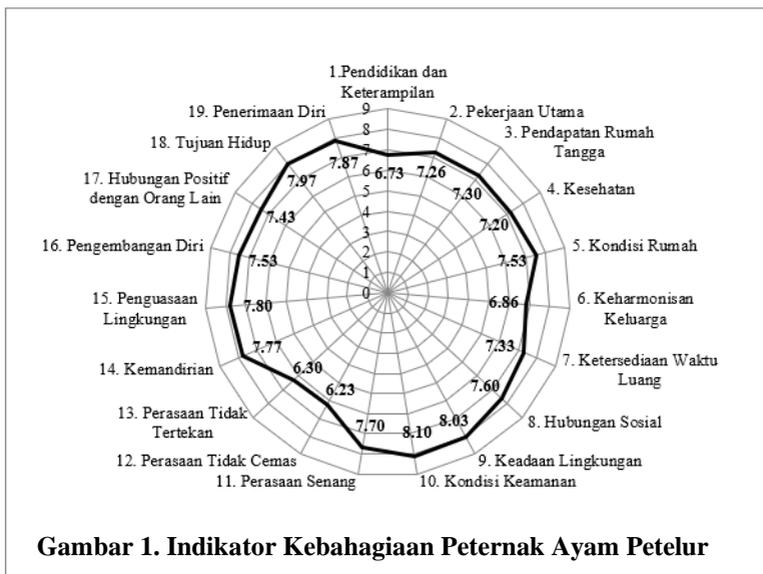
Kepuasan peternak terhadap indikator Tujuan Hidup (Indikator ke-18) sebesar 7,97 (Puas). Tujuan hidup berkaitan dengan cita-cita yang dimiliki tentang masa depan yang membuatnya merasa hidup yang dijalani memiliki makna. Peternak mengelola usaha peternakan sebagai pekerjaan utama dengan tujuan memperoleh pendapatan yang cukup untuk hidup layak. Pekerjaan sebagai peternak ayam petelur merupakan pekerjaan yang prospektif (Setiawati and Ulupi, 2016), karena harga dan permintaan telur cenderung meningkat setiap tahun. Selama periode 2014-2018, harga telur ayam ras di tingkat produsen dan konsumen terus meningkat menjadi Rp 19.724 per kg pada tahun 2018 dibandingkan tahun-tahun sebelumnya dengan kisaran Rp 15.131–17.479 per kg (Ilham dan Saptana, 2019). Faktor yang mendorong permintaan telur yang terpenting adalah jumlah penduduk dan pertumbuhannya, tingkat pendapatan, fenomena urbanisasi dan segmentasi pasar, serta preferensi konsumen (Hastang et al. 2011).

Indeks kebahagiaan peternak ayam petelur sebesar

7,36 tersebut lebih besar daripada Indeks Kebahagiaan penduduk Indonesia 2018 sebesar 7,07, Indeks Kebahagiaan penduduk Indonesia wilayah pedesaan sebesar 6,96, maupun Indeks Kebahagiaan penduduk Provinsi Jawa Timur sebesar 7,08 (BPS, 2017). Di Indonesia, Indeks Kebahagiaan tertinggi dicapai oleh penduduk Provinsi Maluku Utara sebesar 7,57. Di Maluku Utara sektor pertanian berkontribusi terbesar terhadap PDRB sebesar 23,95% dan sebanyak 45,73% penduduk bekerja di sektor pertanian (BPS Maluku Utara, 2018). Fakta ini mendukung bahwa penduduk yang bekerja di sektor pertanian, termasuk peternakan, kehutanan, dan perikanan, tergolong bahagia.

Temuan ini konsisten dengan hasil penelitian di sejumlah negara lain. Di Malaysia, sebagian besar petani, meskipun hidup di bawah garis kemiskinan, mereka bahagia dan bangga menjadi petani (Kamaruddin et al., 2013). Windon et al. (2014) menemukan bahwa 99,0% dari 400 petani Ohio menyatakan puas terhadap kualitas hidup mereka secara keseluruhan. Khaleeli (2012) menyatakan bahwa petani adalah pekerja paling bahagia di Inggris. Indeks Kebahagiaan menunjukkan bahwa orang yang bekerja di pedesaan - bertani, beternak, memelihara ikan, dan mengelola hutan – adalah

orang paling bahagia. Di Ghana, tujuh dari sepuluh petani subsisten, meski tidak makmur, mereka bahagia dengan kehidupannya secara keseluruhan (Yakubu dan Aidoo, 2015). Ann Paddy (2016) menyatakan bahwa “Kebahagiaan suatu bangsa ibarat pohon, pertanian adalah akarnya, dan perdagangan dan industri adalah cabang dan daunnya. Jika akar dihilangkan, cabang-cabangnya akan mati dan daunnya rontok”. Berbahagialah petani dan peternak Indonesia.



Poultry Indonesia, Januari 2020



18.

IDUL KURBAN UNTUK KETAHANAN PANGAN

Idul Adha (Idul Kurban) memiliki dimensi ritual dan dimensi sosial. Selama masa pandemi Covid-19 masih berlangsung, Idul Kurban tidak sekadar ibadah ritual, tetapi dapat dimaknai lebih dalam sebagai upaya mendukung ketahanan pangan. Menurut UU No. 18/2012 tentang Pangan, ketahanan pangan adalah *"kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan"*. Pandemi Covid-19 berpotensi menimbulkan kerawanan pangan (*food insecurity*) bahkan dapat memicu darurat pangan (*food emergency*) karena belum pasti kapan akan berakhir.

Kerawanan pangan adalah suatu kondisi ketidakcukupan pangan yang dialami daerah, masyarakat, atau rumah tangga, pada waktu tertentu untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologi bagi pertumbuhan dan kesehatan masyarakat. Menurut FAO, sebuah negara dikatakan mengalami darurat pangan jika kekurangan pasokan pangan relatif terhadap kebutuhan konsumsinya akibat bencana alam, lingkungan, dan/atau kemanusiaan, dan karena itu membutuhkan bantuan pangan dari luar.

Setelah melaksanakan sholat Idul Adha pada 10 Dzulhijah dalam penanggalan Hijriyah, umat Islam di seluruh dunia, termasuk 235 juta (87,2%) penduduk muslim Indonesia diperintah Allah untuk menyembelih hewan kurban dan membagi daging kurban. Idul Kurban merupakan momentum tahunan berbagi daging kurban sumber protein hewani kepada masyarakat. Ibadah kurban ini mendukung sistem ketahanan pangan pada tiga subsistem sekaligus, yaitu ketersediaan pangan (*food availability*), keterjangkauan pangan (*food accessibility*), dan konsumsi pangan (*food consumption*).

Pertama, ketersediaan daging. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan

(Ditjen PKH) Kementan, jumlah pemotongan hewan kurban pada Idul Adha 2019 mencapai 1.346.712 ekor, terdiri dari 376.487 ekor sapi, 12.958 ekor kerbau, 716.089 ekor kambing dan 241.178 ekor domba. Menurut Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia (DMI) Jusuf Kalla, Indonesia memiliki masjid dan mushola terbanyak di dunia sejumlah 800.000. Ini berarti setiap masjid atau mushola menyembelih 1-2 ekor hewan kurban. Seekor sapi/kerbau seberat 350 kg menghasilkan karkas (daging dan tulang) 175 kg (50%), sedangkan kambing/domba seberat 30 kg menghasilkan karkas 13,5 kg/ekor (45%). Jika tahun ini terdapat 1.350.000 ekor (390.000 ekor sapi/kerbau dan 960.000 ekor kambing/domba) disembelih sebagai hewan kurban, maka diperoleh 81.210.000 kg daging kurban.

Kedua, keterjangkauan daging. Bagi sebagian besar penduduk Indonesia, daging sapi dan daging kambing masih termasuk barang mewah. Hasil jajak pendapat Kompas pada 689 responden berusia minimal 17 tahun di 12 kota besar pada Agustus 2015 memaparkan bahwa frekuensi konsumsi daging sapi Indonesia masih rendah. Dalam satu bulan, sebanyak 42,4 persen responden mengaku mengonsumsi daging sapi segar hanya 1-2 kali. Bahkan, sebesar 20 persen tidak pernah mengonsumsi daging sapi dalam sebulan

(Kompas.com, 2015). Pendapatan dan harga merupakan penyebab utama penduduk Indonesia jarang mengonsumsi daging. Harga daging sapi dan kambing Rp 110-120 ribu/kg tergolong susah dijangkau oleh sebagian besar penduduk Indonesia yang berpendapatan Rp 4,93 juta/kapita/bulan. Pada masa pandemi Covid-19 semakin banyak penduduk yang tidak mampu membeli daging karena pendapatan dan daya beli menurun. Pemerintah memperkirakan sebanyak 1,8-3,78 juta orang Indonesia akan jatuh miskin dan 3,0-5,2 juta kehilangan pekerjaan selama pandemi Covid-19. Daging kurban yang dibagikan secara gratis kepada masyarakat di sekitar masjid dan mushola atau dikirim ke berbagai daerah merupakan bentuk kepedulian sosial mengatasi ketidakmampuan masyarakat membeli daging.

Ketiga, konsumsi daging. Konsumsi daging sapi/kerbau penduduk Indonesia tergolong rendah, baru sebanyak 2,56 kg/kapita/tahun, sedangkan daging kambing/domba 0,052 kg/kapita/tahun. Konsumsi daging tersebut berada di bawah Malaysia 4,8 kg, Filipina 3,1 kg, dan Vietnam 9,9 kg. Sesuai pedoman Pola Pangan Harapan (PPH), setiap orang idealnya mengonsumsi pangan hewani 161 g/hari, tetapi baru tercapai 125 g/hari. Jika tahun ini

terdapat 1.350.000 ekor (390.000 ekor sapi/kerbau dan 960.000 ekor kambing/domba) disembelih sebagai hewan kurban, seperti Idul Adha tahun 2019, maka diperoleh 81.210.000 kg daging kurban. Jika daging kurban sebanyak itu dibagi merata untuk 269 juta penduduk Indonesia, maka setiap orang akan memperoleh daging secara gratis sebanyak 0,30 kg.

Daging kurban dengan kadar protein 20% adalah sumber protein hewani. Daging mempunyai nilai biologi (NB) antara 80-90. Nilai biologis adalah persentase protein yang dapat diserap oleh tubuh. Bahan makanan dengan NB tinggi (70-100) menandakan kandungan asam amino yang lengkap dan tinggi. Konsumsi protein hewani penduduk Indonesia hanya 15,78 g yang berasal dari ikan 8,23 g, daging 4,2 g, dan telur dan susu 3,35 g. Konsumsi protein hewani tersebut juga tergolong rendah dan berada di bawah konsumsi protein hewani Thailand dan Filipina antara 40-50 g, dan Malaysia dan Brunei Darusalam sekitar 50-60 g. Rendahnya konsumsi protein hewani tersebut merupakan salah satu faktor penyebab tingginya angka prevalensi stunting (balita pendek) di Indonesia. Stunting didefinisikan sebagai kondisi anak usia 0–59 bulan, di mana tinggi badan menurut umur berada di bawah minus 2 Standar Deviasi (<-

2SD) dari standar median WHO. Kemenkes (2018) memperkirakan ada 37,2 persen anak usia 0-59 bulan atau sekitar 9 juta anak Indonesia dengan kondisi stunting, yang berlanjut sampai usia sekolah 6-18 tahun.

Selain pendapatan dan harga, faktor kebiasaan juga turut menyumbang rendahnya konsumsi daging. BPS (2018) mencatat pengeluaran kelompok makanan sebesar Rp 527.956/kapita/bulan. Pengeluaran tersebut digunakan untuk membeli rokok Rp 65.586 (12,42%), mengalahkan pengeluaran untuk kebutuhan pangan seperti beras Rp 61.455 (11,64%), ikan Rp 40.478 (7,67%), daging Rp 24.978 (4,73%), dan telur dan susu Rp 29.357 (5,56%). Fakta tersebut membuktikan bahwa penduduk Indonesia lebih menyukai racun nikotin rokok penyebab penyakit jantung, paru-paru, kanker, dan gangguan kehamilan dan janin itu daripada daging sumber protein hewani yang menyehatkan badan dan mencerdaskan pikiran. Idul Kurban bisa dijadikan momentum untuk mengubah kebiasaan, mengalihkan pengeluaran untuk membeli rokok yang mudarat dengan membeli daging yang manfaat. ***

Harian Bhirawa, 3 Agustus 2020



19.

BERPAKAH DATA KONSUMSI DAGING ?

Pembaca setia Poultry Indonesia tentu akrab dengan “data”, karena semua artikel yang dimuat PI pasti memuat “data”. Menurut KBBI, “data” berarti: (1) keterangan yang benar dan nyata; (2) keterangan atau bahan nyata yang dapat dijadikan dasar kajian. Menurut UU No. 16/1997 tentang Statistik, data adalah informasi yang berupa angka tentang karakteristik (ciri-ciri khusus) suatu populasi. Data dapat berupa fakta (kualitatif) atau angka (kuantitatif). Data merupakan bahan mentah sebuah informasi. Data baik menghasilkan informasi baik, data buruk menghasilkan informasi buruk. *“Gold in gold out, garbage in garbage out”*, masuk emas keluar emas, masuk sampah keluar sampah.

BPS berslogan “Data Mencerdaskan Bangsa”. Slogan ini menunjukkan harapan agar data BPS berguna bagi

nusa dan bangsa. Bagi pemerintah, data digunakan untuk perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan berbagai program pembangunan nasional. Bagi BMKG, data digunakan untuk prakiraan cuaca atau mitigasi bencana. Bagi rumah sakit, data digunakan untuk menentukan tindakan operasi atau pengobatan pasien. Bagi perusahaan, data digunakan untuk merumuskan strategi produksi atau pemasaran produk.

Data Valid dan Kira-kira

Masalah pokok data adalah validitas (sahih, benar, lengkap, akurat, dan mutakhir) dan reliabilitas (andal, dapat dipercaya). Bagi peneliti di laboratorium, memperoleh data valid dan reliabel barangkali tidak sulit, karena bisa dilihat di peralatan yang digunakan. Jika diperoleh data tidak valid dan reliabel, berarti metode penelitian tidak tepat atau peralatan bermasalah. Bagi peneliti lapangan yang berkaitan dengan bidang sosial ekonomi peternakan, memperoleh data yang valid dan reliabel adalah sebuah perjuangan. Responden penelitian lapangan umumnya tidak memiliki catatan tertulis yang valid dan reliabel, sehingga data yang diperoleh adalah data “kira-kira”.

Penulis beberapa kali bekerja mengumpulkan atau membahas data lapangan. Pertama, ketika berkuliah semester tiga tahun 1985 ada praktikum Ekonomi Pembangunan Peternakan. Mahasiswa ditugasi melaporkan potensi peternakan sebuah desa. Kedua, ketika menulis skripsi berjudul “Analisis Usaha Peternakan Ayam-Mina” tahun 1988, dan ketiga, ketika menulis tesis berjudul “Permintaan Bibit dan Pakan Ayam Pedaging” tahun 1995. Pada kegiatan-kegiatan tersebut, penulis mewawancarai peternak-peternak untuk memperoleh data-data tentang sarana produksi, produksi, pemasaran, dan analisis usaha peternakannya. Semua peternak responden tidak mempunyai catatan tertulis yang valid dan reliabel, sehingga penulis menggunakan senjata pamungkas berupa pertanyaan “...*kinten-kinten pinten Pak/Bu...?*” (...kira-kira berapa Pak/Bu...?). Keempat, ketika menulis disertasi tentang “Daya Saing Agribisnis Ayam Pedaging” tahun 2011. Pada kegiatan ini, penulis memperoleh setumpuk data valid dan reliabel berupa *print out* catatan lengkap hasil usaha ratusan peternak kemitraan ayam pedaging dari perusahaan.

Kelima, tahun 1997 penulis mendapat pekerjaan sensus sapi di Kabupaten Malang. Dananya Rp 5 juta dengan

cakupan wilayah 15 desa di lima kecamatan dan harus selesai dalam waktu sebulan. Kabupaten Malang terdiri 33 kecamatan dengan luas wilayah 2.977,05 km², atau 4,5 kali luas daratan Provinsi DKI Jakarta 661,52 km². Kabupaten Malang bagian selatan wilayahnya berbukit-bukit, berhutan-hutan, penduduknya jarang, jalan antar kecamatan dan antar desa masih banyak jalan berbatu bahkan jalan tanah. Penulis merasa ini pekerjaan “tidak masuk akal”, artinya berat pekerjaan tidak sebanding dengan ketersediaan dana. Sebelum penulis menolak pekerjaan itu, Kepada Dinas Peternakan mengatakan, “Memang pekerjaan ini berat Pak, tapi sudah dianggarkan dan harus dilaksanakan. Tidak boleh dikerjakan sendiri oleh dinas, harus pihak lain. Terserah bagaimana Bapak mengerjakan, yang penting datanya meningkat”. Akhirnya, pekerjaan itu penulis selesaikan dengan mengerahkan mahasiswa dengan metode seperti “quick count” yang dipakai pemilu sekarang.

Keenam, tahun 2014 penulis mengantar Tim Unpad survei pemotongan sapi potong di Jawa Timur. Tim menemui seorang staf ahli bupati yang pernah menjabat Kepala Dinas Peternakan Kabupaten di wilayah barat Provinsi Jawa Timur. Mantan Kadisnak itu menjelaskan

bahwa data populasi sapi itu tidak valid dan reliabel. Data populasi sapi wajib naik setiap tahun, karena di Jawa Timur ada Program Intan Sejati (Inseminasi Buatan Sejuta Ekor Sapi). Indikator keberhasilan program tersebut adalah kenaikan populasi sapi. Nah, kalau data populasi sapi di suatu kabupaten menurun, maka Kadis akan dimarahi Bupati, dan Bupati akan dimarahi Gubernur !!!.

Data Konsumsi Daging

Ketujuh, penulis mengikuti lokakarya ‘Konsolidasi Data untuk Akurasi Perhitungan Permintaan dan Penawaran Daging Sapi Nasional’ di Fakultas Peternakan UGM tanggal 22 Oktober 2015. Lokakarya itu diadakan sebagai tindak lanjut dari Rakornas “Menuju ‘SATU DATA NASIONAL’ tentang Produksi dan Konsumsi Daging Sapi di Indonesia” di Kantor Wantimpres pada Agustus 2015. Data di berbagai instansi berbeda-beda sehingga perlu adanya penyatuan angka nasional tentang produksi dan konsumsi daging sapi di Indonesia (Tabel 1). Ketika itu harga daging sapi melonjak sampai Rp 100-130 ribu/kg. Presiden Joko Widodo memerintahkan sejumlah menteri agar segera berupaya menurunkan harga daging sapi di bawah Rp 80 ribu per kilogram sebelum Lebaran 2016. Pemerintah berencana

mengimpor daging sapi untuk menekan harga daging sapi, tetapi terkendala masalah data yang bervariasi dari berbagai lembaga resmi. Perbedaan data dari berbagai instansi pemerintah ini terjadi karena perbedaan penyelenggara survei, petugas survei, responden, metode, waktu, tempat, dana, dan sebagainya. Akhirnya, tercapailah data “kompromi” (Gambar 1). Jadi, untuk masalah nasional sebesar itu, data yang digunakan adalah data “kompromi”, bukan data hasil survei lembaga resmi yang validitas dan reliabilitasnya terjamin. Entah karena data tidak valid dan reliabel atau faktor-faktor lain, sampai hari ini harga daging sapi di seluruh Indonesia tidak pernah turun di bawah Rp 100 ribu/kg.

Terakhir, pada awal Juli 2020 penulis mengirim artikel ke PI berjudul “Ketahanan Pangan Produk Peternakan Masa Pandemi Covid-19”. Biasanya, artikel penulis di PI itu dimuat atau ditolak tanpa diskusi. Kali ini, penulis perlu menyampaikan apresiasi kepada Redaktur PI. Penulis mencantumkan data konsumsi daging sapi 2,56 kg (2019), telur 6,49 kg (2018), dan daging ayam 5,55 kg (2018) per kapita per tahun. Redaktur PI menyangsikan data konsumsi daging ayam tersebut. Menurut Redaktur PI, pelaku industri

mengatakan saat ini konsumsi daging broiler sudah mencapai 14-15 kg/kapita/tahun dan telur ayam sudah mencapai 175 butir setara 11 kg/kapita/tahun. Penulis konfirmasi ulang kepada Redaktur PI dengan melampirkan sumber data resmi yaitu Outlook Daging Ayam Pedaging 2019, Outlook Daging Sapi 2019, dan Outlook Telur Ayam 2019, ketiganya diterbitkan Pusdatin Sekjen Kementan.

Tabel 1. Produksi, Konsumsi, dan Kebutuhan Daging Sapi (2015)

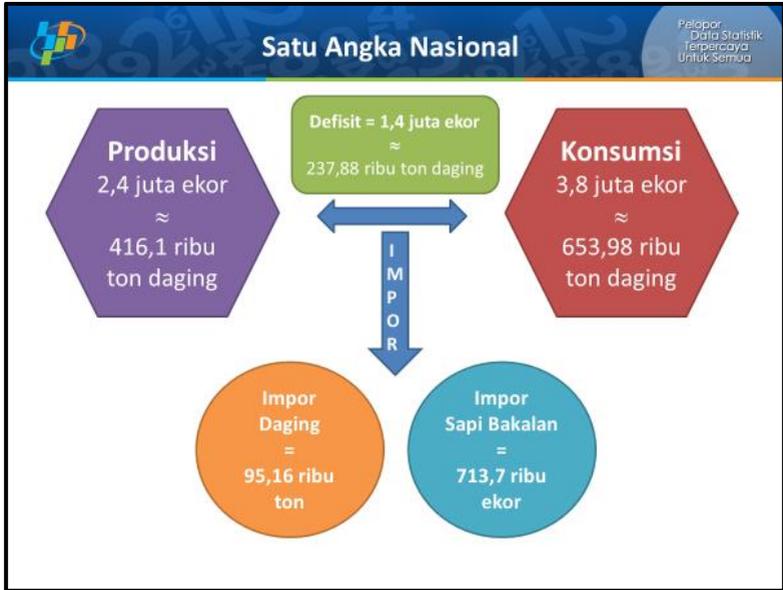
Produksi Daging Sapi	Konsumsi Daging Sapi	Kebutuhan Daging Segar/ Beku	Kebutuhan/ Konsumsi Daging Sapi (Terkoreksi)
BPS: Potensial Stok: Ready Stok = 2,8 juta ekor, setara 469,9 ribu ton daging	BPS: Konsumsi daging, iga, dan tetelan = 3,09 kg/kapita/tahun Konsumsi daging = 2,56 kg/kapita/tahun Konsumsi 2015 = 653,98 ribu ton daging, setara 3,8 juta ekor sapi	Susenas: = 0,36 kg/kap/tahun	Susenas: = 0,36 kg/kap/tahun
		VKBP 2014: = 2,65 kg/kap/tahun	VKBP 2014: = 2,12 kg/kap/tahun

Kementan: Ready Stok = 2,4 juta ekor, setara 416,1 ribu ton daging	Kementan: Konsumsi daging = 1,78 kg/kapita/tahun Konsumsi 2015 = 454,70 ribu ton daging, setara 2,7 juta ekor sapi	Survei IBS: = 0,02 kg/kap/tahun	Survei IBS: = 0,02 kg/kap/tahun
Kemendag: Ready Stok = 2,0 juta ekor, setara 350 ribu ton daging	Kemendag: Konsumsi daging = 2,00 kg/kapita/tahun Konsumsi 2015 = 510,9 ribu ton daging, setara 3 juta ekor sapi	Survei IMK: = 0,06 kg/kap/tahun	Survei IMK: = 0,06 kg/kap/tahun
Apfindo: Ready Stok = 2,3 juta ekor, setara 391,3 ribu ton daging		Total Konsumsi = 3,09 kg/kap/tahun	Total Konsumsi = 2,56 kg/kap/tahun

Sumber: Workshop ‘Konsolidasi Data untuk Akurasi Perhitungan Permintaan dan Penawaran Daging Sapi Nasional’, Kamis, 22 Oktober 2015 di Fakultas Peternakan UGM.

Redaktur PI kemudian mengirim balasan berupa bahan presentasi (slide ppt) dari Bapak Achmad Dawami (GPPU) berjudul “Bisnis Peternakan Era Pemerintahan Jokowi Periode Ke 2” bertanggal 20 November 2019. Pada slide presentasi tercantum dua macam data konsumsi daging ayam ras yaitu 5,683 kg (BPS, 2017) dan 15,50 kg/kapita/tahun (GPPU, 2019). Penulis kembali melengkapi data konsumsi dari Statistik Peternakan dan Kesehatan Hewan 2019 yang diterbitkan Ditjen PKH sebesar 5,579 kg/kapita/tahun (Tabel 2). Sejauh ini pelaku industri tidak ada yang percaya dengan data konsumsi daging ayam ras yang hanya sekitar 7 kg/kapita/tahun. Mereka percaya ada pada kisaran 13-15 kg/kapita/tahun. Pemerintah (Ditjen PKH) terakhir menyebutkan sekitar 12,79 kg/kapita/tahun (www.poultryindonesia.com, 6 Maret 2020). Menurut Dirjen PKH, berdasarkan hasil Survei Konsumsi Bahan Pokok (VKBP) tahun 2017 dan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) tahun 2019 yang dilaksanakan BPS, konsumsi daging ayam ras adalah sebesar 12,79 kg/kapita/tahun. Akhirnya, penulis dan Redaktur PI menggunakan data “kompromi” dari Ditjen PKH tersebut.

Penulis mencoba menggali dimana letak perbedaan data konsumsi daging ayam. Pemerintah (BPS, Kementan, Ditjen PKH) menghitung kebutuhan daging ayam ras berdasarkan pertumbuhan konsumsi rumah tangga hasil Susenas 2019, horeka, rumah makan dan PMM, serta industri, sedangkan GPPU berdasarkan produksi karkas ayam tahunan dibagi jumlah penduduk (Tabel 3). Jelaslah bahwa konsumsi daging ayam 5,55 kg/kapita/tahun yang tertulis di Outlook Daging Ayam 2019 dan Statistik PKH 2019 adalah konsumsi langsung rumah tangga, konsumsi 12,79 kg/kapita/tahun yang disebutkan Dirjen PKH adalah total konsumsi (RT, Horeka dan PMM, Industri, dan Jasa Kesehatan), dan konsumsi 15,50 kg/kapita/tahun yang dihitung GPPU adalah produksi karkas ayam tahunan dibagi jumlah penduduk. ***



Sumber: BPS (2015)

Gambar 1. Satu Angka Nasional Produksi, Konsumsi, dan Impor Daging Sapi (2015)

**Tabel 2. Konsumsi Daging Sapi, Telur, dan Daging Ayam
(kg/kapita/tahun)**

Tahun	Daging Sapi	Telur	Daging Ayam		
	(Pusdatin)	(Pusdatin)	(Pusdatin)	(Statistik PKH)	GPPU
2017	2,361	6,65	5,67	5,683	12,76
2018	2,500	6,49 ¹	5,55	5,579	13,12
2019	2,560	17,69²	5,80		15,50
2020	2,680 ³		6,03 ³		15,74 ³

Ket: ¹ = konsumsi telur rumah tangga
² = total konsumsi telur (RT, Horeka, dan PMM, Industri, dan Jasa Kesehatan)
³ = angka prediksi

**Tabel 3. Konsumsi Daging Ayam Versi Pemerintah dan
GPPU (kg/kapita/tahun)**

Lembaga	Uraian	Konsumsi	Keterangan
BPS, Kementan, Ditjen PKH	Konsumsi langsung (RT)	5,47	BPS dalam Rakor
	Horeka dan PMM Lainnya	6,08	Perunggasan 24 Januari
	Industri (Besar, Sedang, IMK)	1,21	2020 di Kemenko
	Jasa Kesehatan	0,03	Perekonomian
	Total	12,79	Jakarta
GPPU	Tahun 2017: Tonase Kaskas: 3.340.125.389	12,76	Bisnis Peternakan Era

	Jml Penduduk: 261.686.700		Pemerintahan Jokowi Periode Ke 2 (Achmad Dawami, Menara 165 Jakarta, 20 November 2019)
	Tahun 2018: Tonase Karkas: 3.467.272.446 Jml Penduduk: 264.330.000	13,12	
	Tahun 2019: Tonase Karkas: 4.138.682.939 Jml Penduduk: 267.000.000	15,50	

Poultry Indonesia, September 2020



20.

KETAHANAN PANGAN PRODUK PETERNAKAN MASA PANDEMI COVID-19

Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) yang melanda Indonesia sejak 2 Maret 2020 berdampak negatif terhadap ketahanan pangan. Ketahanan pangan merupakan suatu sistem yang terdiri tiga subsistem, yaitu ketersediaan pangan (*food availability*), keterjangkauan pangan (*food accessibility*), dan konsumsi pangan (*food consumption*). Himbauan pemerintah kepada masyarakat untuk melakukan pekerjaan dari rumah (*working from home*), pembatasan sosial berskala besar (*PSBB*), dan menjaga jarak secara fisik dan sosial (*physical and social distancing*), serta penutupan wilayah secara terbatas (*partial lockdown*), menyebabkan disrupsi pola rantai pasok pangan mulai dari produksi, distribusi, hingga konsumsi. Daging

sapi, daging ayam, dan telur ayam merupakan tiga produk peternakan yang termasuk sepuluh bahan pangan strategis yang ketahanannya terdampak Covid-19.

Ketersediaan

Ketersediaan pangan berarti kemampuan menyediakan pangan baik dari produksi dalam negeri maupun impor. Badan Ketahanan Pangan (2020) menyusun perkiraan ketersediaan, produksi, dan kebutuhan daging sapi, daging ayam, dan telur ayam disajikan pada Tabel 1. Perkiraan tersebut dibuat dengan asumsi bahwa Covid-19 akan mengakibatkan: (1) penurunan produksi sebesar 5% karena harga sarana produksi mahal dan distribusinya tidak lancar; (2) kebutuhan pangan meningkat 5% karena *panic buying* dan masyarakat menyetok pangan untuk persediaan; dan (3) realisasi impor turun sebesar 5% karena importasi tidak lancar dan negara produsen membatasi ekspor.

Tabel 1. Perkiraan Ketersediaan, Produksi dan Kebutuhan Pangan Produk Peternakan Periode Maret sampai Agustus 2020 (000 ton)

Komoditas	Ketersediaan				Perkiraan Kebutuhan	Surplus/ (Defisit)
	Stok (Feb '20)	Prakiraan Produksi	Rencana Impor	Jumlah Tersedia		
Daging Sapi	14,299	248,826	290,005	553,130	393,840	159,290
Daging	98,640	1.979,960	0	2.078,600	1.735,810	342,800
Telur Ayam	27,582	2.549,54	0	2.577,120	2.484,140	92,980

Sumber: BKP (2020)

Ketersediaan daging sapi, daging ayam, dan telur diperkirakan mencukupi kebutuhan dalam negeri sampai Agustus 2020 bahkan tercatat surplus. Ketersediaan daging ayam dan telur dapat dipenuhi dari produksi dalam negeri, sedangkan daging sapi perlu tambahan pasokan impor. Impor daging sapi diperkirakan naik dari 109.253 ton pada periode Maret-Mei 2020 menjadi 180.752 ton pada periode Juni-Agustus 2020. Kenaikan impor tersebut disebabkan kenaikan permintaan konsumsi masyarakat pada bulan Ramadhan (24 April–23 Mei) dan Idul Fitri (24-25 Mei), dan potensi disrupsi produksi dan konsumsi pangan sebagai dampak dari meluasnya penyebaran Covid-19.

Produksi daging sapi Indonesia saat ini belum mencukupi kebutuhan konsumsi dalam negeri. Nilai SSR (*Self Sufficiency Ratio*) daging sapi Indonesia 83,23%. Ini berarti bahwa produksi daging sapi dalam negeri hanya memenuhi 83,23% kebutuhan, sedangkan 16,77% sisanya harus dipasok dari daging sapi impor. Ketergantungan pada daging sapi impor ini utamanya daging sapi segar dan beku. Pada 2019 impor daging sapi Indonesia dari India memberikan kontribusi 45,86% dengan nilai impor sebesar US\$ 283,65 juta, Australia sebesar 43,45% dengan nilai

impor sebesar US\$ 268,71 juta, Amerika Serikat sebesar 5,98% dengan nilai impor sebesar US\$ 36,97 juta.

Produksi daging ayam dan telur ayam Indonesia saat ini telah mencukupi kebutuhan konsumsi dalam negeri. Nilai SSR komoditas daging ayam dan telur masing-masing 99,90% dan 99,91%. Ini berarti bahwa lebih dari 90,00% kebutuhan daging ayam dan telur dapat dipenuhi oleh produksi dalam negeri. Nilai SSR tersebut menunjukkan bahwa Indonesia telah berswasembada *on-trend* daging ayam dan telur. Pengertian swasembada *on-trend* adalah minimal 90 persen kebutuhan pangan dipenuhi dari produksi domestik, sedangkan 10 persen sisanya dipenuhi dari impor ketika pasokan dalam negeri tak mencukupi.

Keterjangkauan

Keterjangkauan pangan dari aspek fisik dan ekonomi dikelola melalui stabilisasi pasokan dan harga pangan. Pada aspek fisik, keterjangkauan pangan menghadapi masalah distribusi karena penduduk Indonesia tersebar di 17.504 pulau, sedangkan pusat produksi ada di Jawa. Pulau Jawa yang luasnya hanya 6,7% (129.438 km²) dibanding luas daratan Indonesia (1.910.931 km²) merupakan sentra produksi daging sapi, daging ayam, dan telur ayam masing-

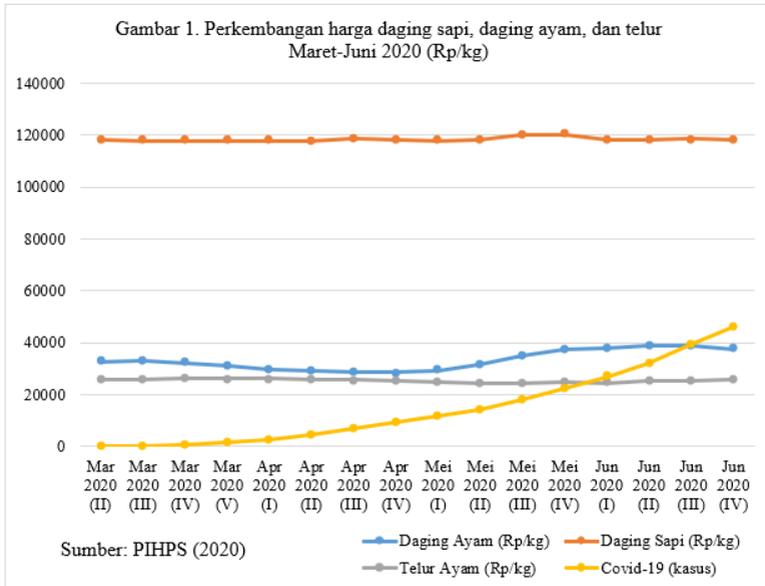
masing 59,20%, 67,57%, dan 60,34%. Beberapa provinsi diperkirakan mengalami defisit produk peternakan karena berada jauh dari daerah produksi. Pada aspek ekonomi, keterjangkauan pangan terkendala masalah fluktuasi harga. Faktor-faktor yang memengaruhi fluktuasi harga pada sisi permintaan adalah hari-hari besar keagamaan dan budaya masyarakat, sedangkan pada sisi penawaran adalah harga sarana produksi dan rantai pemasaran.

Harga daging sapi di tingkat konsumen Rp 66,329/kg (2010), meningkat rata-rata 3,93% per tahun menjadi Rp 116.670/kg (2019). Harga daging dalam negeri dipengaruhi volume impor daging. Jika volume impor daging meningkat maka harga daging sapi domestik menurun. Hal ini karena harga daging impor beku lebih murah dibandingkan dengan harga daging lokal segar. Harga daging sapi impor 4,22 US\$/kg setara Rp 61.250/kg, lebih murah Rp 30.000-60.000/kg dibanding harga daging sapi domestik Rp 90.000-120.000/kg.

Harga daging ayam ras di tingkat eceran Rp 24.166/kg (2010), meningkat 3,93% per tahun menjadi Rp 33.765/kg (2019). Harga telur meningkat dari Rp 15.384/kg (2010), meningkat 4,75% per tahun menjadi Rp 24.807/kg

(2019). Pemasaran daging ayam dan telur ayam sebagian besar mengandalkan pasar tradisional. Saluran pemasaran melibatkan banyak titik mata rantai distribusi dari peternak, pedagang sampai ke tangan konsumen. Hal ini seringkali menyebabkan harga di tingkat peternak sangat rendah, bahkan di bawah harga pokok produksi (HPP), namun di tingkat konsumen harga lebih mahal.

Selama pandemi Covid-19 periode Maret-Juni 2020 harga rata-rata daging sapi, daging ayam, dan telur ayam masing-masing Rp 118.362 ± 748 /kg, Rp 33.141 ± 3.679 /kg, dan Rp 25.321 ± 708 /kg (Gambar 1). Harga daging sapi dan daging ayam meningkat rata-rata 0,031% dan 0,887%/minggu, sedangkan telur menurun 0,096%/minggu. Awal pandemi Covid-19 harga daging sapi tampak lebih stabil Rp 117.850/kg pada Maret (I) dan Rp 118.200/kg April (IV). Harga daging kemudian naik dan mencapai titik tertinggi Rp 120.300/kg pada Mei (IV) sekitar Idul Fitri, dan menurun pada Juni (IV) Rp 118.400/kg. Kesulitan dalam menjaga stok daging impor menyebabkan harga naik sekitar Idul Fitri, tetapi permintaan yang lebih rendah daripada biasanya mencegah lonjakan harga.



Harga daging ayam dan telur cenderung menurun menjadi Rp 28.450/kg dan Rp 25.400/kg pada April (IV) dibanding Rp 32.900/kg dan Rp 25.550/kg pada Maret (I). Harga daging ayam kembali meningkat menjadi Rp 37.400/kg, sedangkan harga telur stabil Rp 25.900/kg pada Juni (IV). Penurunan harga daging ayam dan telur berkaitan adanya kelebihan pasokan yang terjadi sejak 2019. Hal ini diperburuk oleh penurunan permintaan akibat pelaksanaan tindakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (*PSBB*), termasuk pembatasan pergerakan masyarakat dan bisnis terkait

makanan (warung, restoran, hotel, dan katering), mulai awal April 2020. Deflasi bahan pangan -0,13% pada April 2020 mengindikasikan adanya penurunan harga akibat penurunan permintaan.

Konsumsi

Konsumsi pangan merupakan salah satu indikator kesejahteraan masyarakat. Hukum Engel menyatakan bahwa semakin miskin keluarga, semakin besar proporsi pengeluaran untuk makanan. Dalam skala lebih luas, semakin kaya sebuah negara, semakin kecil porsi pengeluaran untuk makanan. Pendapatan penduduk Indonesia tahun 2019 sebesar Rp 59,1 juta atau US\$ 4.175/kapita, lebih rendah dibanding pendapatan negara berkembang US\$ 5.650 dan negara maju US\$ 48.250 per kapita. Pengeluaran bulanan penduduk Indonesia Rp 1.124.717 per kapita, Rp 556,899 (49,51% digunakan untuk makanan dan Rp 567.818 (50,49%) untuk bukan makanan. Pengeluaran untuk makanan tersebut, Rp 23.006 (4,13%) digunakan untuk konsumsi daging dan Rp 32.196 (5,78%) untuk telur dan susu.

Konsumsi daging sapi penduduk Indonesia 2,30 kg (2010), meningkat rata-rata 2,82% per tahun menjadi 2,56 kg

per kapita per tahun (2019). Konsumsi tersebut berada di bawah konsumsi beberapa negara Asean, seperti Malaysia 4,8 kg, Filipina 3,1 kg daging sapi, dan Vietnam 9,9 kg. Konsumsi daging ayam 3,54 kg (2010), meningkat 6,88% per tahun menjadi 5,55 kg per kapita per tahun (2019). Konsumsi daging unggas ini lebih rendah dibanding Malaysia 46 kg, Thailand 14,5, Vietnam 13 kg, dan Filipina 12,6 kg. Konsumsi telur 6,71 kg (2010), meningkat 1,14% per tahun menjadi 6,49 kg per kapita per tahun (2019). Konsumsi telur ini juga lebih rendah dibanding Malaysia 14,4 kg dan Thailand 9,9 kg. Harga yang lebih mahal dan pendapatan penduduk yang lebih rendah menyebabkan konsumsi produk peternakan penduduk Indonesia lebih rendah dibanding negara tetangga.

Konsumsi pangan ditentukan oleh banyak faktor, seperti harga pangan, pendapatan rumah tangga, kesukaan konsumen, ketersediaan barang pengganti, porsi pendapatan untuk belanja pangan. Indikator yang biasa digunakan untuk mengukur sensitifitas harga dan pendapatan adalah elastisitas permintaan. Elastisitas harga dan elastisitas pendapatan daging sapi dan daging ayam bersifat elastis (Umaroh & Vinantia, 2018), sedangkan telur inelastis

(Febrianto & Putritamara, 2017). Ini berarti bahwa jika harga naik 1% atau pendapatan turun 1%, maka permintaan daging sapi dan daging ayam turun lebih dari 1%, dan sebaliknya. Jika harga naik 1% atau pendapatan turun 1%, maka permintaan telur akan turun kurang dari 1%, dan sebaliknya. Hal ini berbeda dengan negara maju dimana elastisitas harga dan elastisitas pendapatan ketiga komoditas bersifat inelastis. Bagi penduduk Indonesia, daging sapi dan daging ayam masih termasuk barang mewah dengan ciri permintaannya elastis terhadap perubahan harga dan pendapatan penduduk.

Pandemi Covid-19 berpotensi menurunkan konsumsi produk peternakan. Pertama, pengangguran meningkat. Pemerintah memperkirakan sebanyak 1,8-3,78 juta orang Indonesia akan jatuh miskin dan 3,0-5,2 juta kehilangan pekerjaan selama pandemi Covid-19. Peningkatan pengangguran menyebabkan penurunan pendapatan dan daya beli, ditambah gangguan rantai pasokan produk peternakan, pada gilirannya akan memberi tekanan pada kualitas dan kuantitas konsumsi produk peternakan. Konsumsi produk pertanian diprediksi menurun 8,29% dibanding sebelum wabah Covid-19 (McKibbin & Fernando, 2020). Konsumsi pangan diperkirakan menurun 20% dan

daging 30% (Adelayanti, 2020), serta konsumsi bulanan daging ayam turun 0,14 kg dan telur 3,73 butir (Ilman, 2020). Kedua, pertumbuhan ekonomi menyusut. Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mencapai 5,02% pada 2019, diperkirakan menyusut menjadi 1,0% pada 2020. Penurunan 1% pertumbuhan ekonomi menyebabkan peningkatan kemiskinan dan rawan pangan sebesar 1,6% and 3,0% (Vos et al., 2020). Penyusutan ekonomi Indonesia menyebabkan jumlah penduduk miskin dan rawan pangan diperkirakan meningkat 6,9-9,9% (Hermanto, 2020). ***

Poultry Indonesia, Agustus 2020



21.

MENGAPA IMPOR DAGING SAPI TERUS MENINGKAT ?

Program Swasembada Daging Sapi (PSDS) merupakan salah satu program strategis nasional dalam rangka mewujudkan kemandirian pangan nasional. Sejak dicanangkan tahun 2000 PSDS telah tiga kali gagal mencapai target, yaitu PSDS 2005, PSDS 2010, dan PSDS 2014. Pengertian swasembada adalah minimal 90% kebutuhan daging sapi dipenuhi dari produksi domestik, sementara 10% sisanya dipenuhi dari impor, baik daging maupun sapi bakalan. Sampai saat ini ketergantungan Indonesia terhadap daging sapi impor masih lumayan besar. Indikator IDR (Import Dependency Ratio) daging sapi meningkat dari 13,43% (2014) menjadi 25,13% (2018). Ini berarti bahwa ketergantungan Indonesia terhadap daging sapi impor meningkat dari 13,43% menjadi 25,13%. Dampaknya, harga daging sapi di Indonesia masih tergolong mahal Rp 110-130

ribu/kg dan konsumsi daging sapi tergolong rendah 2,56 kg/kapita/tahun.

Presiden Joko Widodo pernah memerintahkan sejumlah menteri agar menurunkan harga daging sapi di bawah Rp 80 ribu/kg sebelum Lebaran 2016. Namun, sampai hari ini harga daging sapi di seluruh Indonesia tidak pernah turun di bawah Rp 100 ribu/kg. Pertengahan Januari lalu harga daging sapi di Jabodetabek meningkat Rp 130.000/kg menyebabkan pedagang daging mogok jualan beberapa hari. Pemerintah akhirnya mengambil jalan pintas mengizinkan importir mengimpor 281.867 ton terdiri sapi bakalan setara daging dan daging beku dari Meksiko dan Australia pada Februari 2021.

Sedikitnya ada tujuh masalah PSDS di Indonesia. Pertama, keterbatasan ketersediaan pakan hijauan dan konsentrat. Pakan mempengaruhi 70% produksi ternak. Walaupun potensi genetik ternak tinggi, tanpa pakan yang cukup dan berkualitas ternak tidak memberikan hasil optimal. Kedua, pola pembibitan yang kurang intensif dan pengetahuan peternak untuk melakukan pembibitan masih rendah. Pihak swasta tidak tertarik pada usaha pembibitan karena kurang menguntungkan dibanding usaha

penggemukan. Ketiga, struktur produksi sapi potong 90% didominasi oleh peternakan rakyat, hanya 10% perusahaan komersial. Kondisi demikian menyebabkan rendahnya produktivitas sapi lokal karena manajemen pemeliharaan belum efisien dan tingkat kematian sapi tinggi. Keempat, pemotongan betina produktif (umur 1-5 tahun) termasuk betina bunting mencapai 15-26%. Secara nasional sapi betina produktif dipotong setiap tahun sangat banyak sekitar 150-200 ribu ekor. Kelima, kendala distribusi dan transportasi karena sebaran produksi sapi dan penduduk sebagai konsumen daging sapi tersebar di ribuan pulau. Kelebihan populasi sapi potong di luar Jawa sulit disalurkan ke Jawa dan Sumatera karena tata niaga daging sapi domestik masih mengandalkan pengiriman sapi hidup. Keenam, ketimpangan pendapatan antara peternak dan pedagang. Peternak yang memelihara sapi berbulan-bulan hanya untung sekitar Rp 1 juta/ekor, sedangkan pedagang (blantik) bisa meraup untung Rp 1-3 juta/ekor sekali jualan. Ketujuh, adanya kartel dalam perdagangan daging sapi. Salah satu modus dari mafia kartel ini adalah memborong sapi potong yang sudah siap dikirim ke Jawa, dan menjualnya di Jakarta dengan harga dua kali lipat.

PSDS kembali ditargetkan tercapai tahun 2026. Kali ini program yang diandalkan adalah UPSUS SIWAB (Upaya Khusus Sapi Induk Wajib Bunting) dan SIKOMANDAN (Sapi Kerbau Komoditas Andalan Negeri). SIWAB yang dicanangkan pada Oktober 2016 merupakan upaya meningkatkan populasi sapi potong melalui dua program utama yaitu peningkatan populasi melalui Inseminasi Buatan (IB) dan Intensifikasi Kawin Alam (Inka). Pemerintah mengklaim capaian kinerja program SIWAB sangat fantastis. Sampai 10 Desember 2019 kelahiran pedet mencapai 2.743.902 ekor senilai Rp 21,95 triliun, sementara investasi program SIWAB hanya sebesar Rp 1,41 triliun, berarti ada kenaikan nilai tambah sebesar Rp 20,54 triliun. Pematangan sapi dan kerbau betina produktif juga menurun sebanyak 8.514 ekor (57,12%) dibandingkan tahun 2017.

SIKOMANDAN dicanangkan Februari 2020 dengan tiga langkah operasional, yaitu gerakan optimalisasi reproduksi 5,8 juta akseptor, penanganan gangguan reproduksi 237.540 ekor, dan pengendalian pematangan betina produktif 4.000 ekor. Program SIKOMANDAN menargetkan kelahiran sapi dan kerbau secara nasional sebanyak 4 juta ekor tahun 2020. Dalam beberapa bulan

pelaksanaan, kinerja SIKOMANDAN juga diklaim sangat mengesankan. Tercatat hingga 17 Mei 2020 total akseptor IB sebanyak 1.579.158 ekor (63,29%) dari target 2020 sebanyak 2.495.007 ekor, jumlah sapi bunting sebanyak 884.661 ekor (50,35%) dari target 1.757.130 ekor, dan jumlah kelahiran kumulatif sapi dan kerbau sebanyak 834.213 ekor (33,82%) dari target 2.466.522 ekor.

Provinsi Jawa Timur merupakan sentra terbesar populasi sapi potong di Indonesia. Jawa Timur menyumbang sebanyak 4.763.182 ekor (27,82%) dari 17.118.650 ekor populasi sapi di Indonesia, diikuti Jawa Tengah 1.755.396 ekor (10,25%), dan Sulawesi Selatan 1.362.604 ekor (7,96%). Jawa Timur memiliki beberapa program unggulan pengembangan peternakan sapi potong dalam rangka mendukung PSDS. Tahun 2006 Dinas Peternakan Jawa Timur meluncurkan Program INTAN SEJATI (Inseminasi Buatan Sejuta Akseptor Sapi), dilanjutkan Program SAPI BERLIAN (Sapi Beranak Lima Juta dalam Lima Tahun) tahun 2009, dan tahun 2019 Program INTAN SELAKSA (Inseminasi Buatan Sejuta Lebih Anakan Sapi). INTAN SELAKSA melalui SIKOMANDAN merupakan salah satu program akselerasi percepatan peningkatan

populasi sapi potong dengan target kelahiran 1 juta ekor anakan sapi hasil IB di Jawa Timur tahun 2020. Sejak Januari sampai Juni 2020 jumlah sapi yang telah dilakukan IB mencapai 986.559 ekor (52,84%) dari total target 1.867.000 ekor tahun 2020 dan telah lahir sebanyak 648.721 ekor (54,06%) dari total target kelahiran sebanyak 1.190.000 ekor. Pada Desember 2019 Pemprov Jatim dinobatkan sebagai Juara I Tingkat Nasional kategori Kinerja Pelayanan Pemerintah Daerah Wilayah Dominan Inseminasi Buatan. Penghargaan ini diraih karena tahun 2019 Pemprov Jatim mampu melakukan kawin suntik pada 1.710.000 ekor sapi (131%) dari target nasional sebanyak 1.300.000 ekor sapi. Hasilnya, angka kebuntingan sebesar 1.025.000 ekor dan angka kelahirannya sebesar mencapai 1.021.000 ekor.

Melihat kinerja pemerintah yang begitu menakjubkan, tentu masyarakat berhak bertanya, “Mengapa impor sapi atau daging sapi Indonesia terus meningkat?”. Pertama, data populasi sapi memang akurat, tetapi pemerintah kesulitan menghitung stok sapi yang siap dipotong. Penduduk Indonesia mengonsumsi daging sapi 683 ribu ton (3,9 juta ekor sapi) setiap tahun. Jumlah stok sapi sejumlah itu tersedia, tetapi di tangan peternak dan

sebagian tidak dijual. Peternak menjadikan sapiunya sebagai tabungan hidup yang hanya dijual jika memerlukan uang. Dari kebutuhan daging tersebut, baru bisa dipenuhi dari dalam negeri 420 ribu ton (2,4 juta ekor sapi), dan sisanya 263.000 ton (1,5 juta ekor) harus dipenuhi dari sapi atau daging impor. Kedua, data populasi sapi tidak akurat. Tahun 2014 penulis mengantar Tim Unpad survei pemotongan sapi potong di Ngawi, Magetan dan Madiun. Tim menemui seorang staf ahli bupati yang pernah menjabat Kepala Dinas Peternakan Kabupaten. Mantan Kadisnak itu menjelaskan bahwa data populasi sapi itu tidak akurat. Data populasi sapi wajib naik setiap tahun, karena Pemprov Jawa Timur memiliki program unggulan (INTAN SEJATI dan SAPI BERLIAN). Indikator keberhasilan program tersebut adalah kenaikan populasi sapi. Nah, kalau data populasi sapi di suatu kabupaten menurun, maka Kadisnak akan dimarahi Bupati, dan Bupati akan dimarahi Gubernur !!! ***

Harian Bhirawa, Selasa 2 Februari 2021



22.

STUNTING DAN FENOMENA SALAH GIZI

Stunting (balita kerdil) merupakan salah satu pekerjaan rumah besar bagi bangsa Indonesia saat ini. Stunting didefinisikan sebagai kondisi anak usia 0–59 bulan, di mana tinggi badan menurut umur berada di bawah minus 2 Standar Deviasi dari standar median Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). BKKBN menyebutkan sebanyak 1,2 juta (24%) di antara 5 juta kelahiran setiap tahun dalam kondisi stunting yang diukur melalui ukuran panjang tubuh tidak sampai 48 sentimeter dan berat badan tidak sampai 2,5 kilogram. Jumlah prevalensi stunting di Indonesia tahun 2019 mencapai 27,67 persen. Angka ini lebih tinggi dibandingkan toleransi maksimal stunting yang ditetapkan WHO yaitu kurang dari 20 persen jumlah balita. Persentase stunting Indonesia lebih tinggi dibanding sejumlah negara Asia Tenggara seperti Vietnam (23), Filipina (20), Malaysia

(17), dan Thailand (16). WHO menempatkan status Indonesia berada di urutan keempat dunia dan urutan kedua di Asia Tenggara terkait jumlah balita stunting.

Stunting adalah masalah kurang gizi yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam rentang waktu yang lama yang mengakibatkan gangguan pertumbuhan fisik anak sehingga tinggi badannya lebih pendek dari standar usianya. Stunting akan berdampak dan dikaitkan dengan proses kembang otak yang terganggu, di mana dalam jangka pendek berpengaruh pada kemampuan kognitif. Jangka panjang mengurangi kapasitas untuk berpendidikan lebih baik dan hilangnya kesempatan untuk peluang kerja dengan pendapatan lebih baik. Anak stunting yang berhasil mempertahankan hidupnya, pada usia dewasa cenderung akan menjadi gemuk (obese), dan berpeluang menderita penyakit tidak menular (PTM), seperti hipertensi, diabetes, kanker, dan lain-lain. Stunting juga diyakini akan dapat menghambat pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kemiskinan, dan memperlebar ketimpangan.

Akar masalah stunting adalah kemiskinan yang kemudian berdampak negatif terhadap pendidikan dan kesehatan. Kasus stunting banyak ditemukan di daerah

dengan kemiskinan tinggi dan tingkat pendidikan yang rendah. Berdasarkan Riskesdas 2018, prevalensi stunting Jatim saat ini tidak terpaut jauh dari angka nasional, yaitu mencapai 26,91 persen. Ada 16 (42%) kabupaten/kota di Jatim yang termasuk zona merah stunting, yaitu Kabupaten Lamongan, Nganjuk, Trenggalek, Kabupaten dan Kota Kediri, Kota Batu, Kabupaten dan Kota Malang, Kabupaten dan Kota Probolinggo, Kabupaten Jember, Bondowoso, dan empat kabupaten di Madura yaitu Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumenep. Tujuh di antara 16 kabupaten/kota tersebut merupakan kabupaten termiskin di Jawa Timur. BPS Jatim (2019) mencatat persentase kemiskinan di 10 kabupaten termiskin masing-masing Sampang 20,71%, Sumenep 19,8%, Bangkalan 18,9%, Probolinggo 17,76%, Tuban 14,58%, Ngawi 14,39%, Pamekasan 13,95%, Pacitan 13,67%, Bondowoso 13,33%, dan Lamongan 13,21%. Suatu daerah yang banyak penduduknya hidup di bawah garis kemiskinan, bisa dipastikan kualitas pendidikan dan kesehatan di wilayah tersebut kurang baik.

Hasil penelitian Rosha dkk. (2012) menyimpulkan bahwa tingkat pendidikan ibu memengaruhi kejadian

stunting anak. Pendidikan ibu memengaruhi pengetahuan mengenai praktik kesehatan dan gizi anak sehingga anak berada dalam keadaan status gizi yang baik. Judith dan Stand (1996) dalam penelitiannya di Filipina menunjukkan bahwa pendidikan ibu memengaruhi kejadian wasting (kurus) dan stunting. Semba dkk. (2008) juga menegaskan bahwa pendidikan ibu merupakan penentu kejadian stunting di Indonesia. Ibu dengan tingkat pendidikan SD memiliki peluang 1,56 kali memiliki anak dengan status stunting dibandingkan dengan ibu yang berpendidikan SMP ke atas. Ibu yang memiliki pendidikan SMP ke atas cenderung lebih baik dalam pola asuh anak serta lebih baik dalam pemilihan jenis makanan anak. Hal ini dikarenakan ibu dengan pendidikan SMP ke atas memiliki peluang lebih besar dalam mengakses informasi mengenai status gizi dan kesehatan anak sehingga pengetahuannya meningkat. Informasi tersebut kemudian dipraktikkan dalam proses perawatan anak yang berimbas pada status gizi dan kesehatan anak yang lebih baik.

Selain faktor kemiskinan dan pendidikan, stunting juga diperparah oleh fenomena salah gizi (misnutrisi) penduduk Indonesia. BPS (2020) mencatat pengeluaran rata-

rata per kapita sebulan kelompok makanan sebesar Rp 572.551. Pengeluaran tersebut digunakan untuk membeli rokok Rp 70.537 (12,32%), mengalahkan jumlah pengeluaran untuk kebutuhan pangan seperti beras Rp 64.961 (11,35%), ikan Rp 45.304 (7,91%), telur dan susu Rp 32.435 (5,67%), dan daging Rp 24.783 (4,33%). Survei terbaru dari Institute for Demographic and Poverty Studies (IDEAS) pada Juli 2021 menyebutkan pengeluaran untuk konsumsi rokok keluarga miskin bahkan mencapai Rp 364.000 per bulan. Rokok telah menjadi kebutuhan dasar setara dengan kebutuhan pangan. Pengeluaran rokok keluarga miskin setara dengan sepertiga pengeluaran untuk makan sehari-hari dan 2,5 kali lebih besar dari tagihan listrik. Sebanyak 77,1 persen keluarga miskin menyatakan tidak menurunkan konsumsi rokoknya selama pandemi Covid-19, bahkan cenderung meningkat. Fakta tersebut membuktikan bahwa penduduk Indonesia, terutama keluarga miskin, lebih mengutamakan racun nikotin rokok penyebab penyakit jantung, paru-paru, kanker, dan gangguan kehamilan dan janin itu daripada protein hewani yang menyehatkan badan dan mencerdaskan otak anggota keluarganya.

Riskesdas (2018) melaporkan 33,8% (89,570 juta) penduduk Indonesia (62,9% laki-laki dan 4,8% perempuan) adalah perokok. Angka tersebut menjadikan Indonesia negara dengan jumlah perokok terbanyak ketiga di dunia setelah Cina dan India, dan terbanyak pertama di Asean, jauh melebihi Philipina (16,62%), Vietnam (14,11%), Myanmar (8,73), Thailand (7,74), Malaysia (2,90%), Kamboja (2,07%), Laos (1,23%), Singapura (0,39%), dan Brunei (0,04%). Kemenkeu mencatat konsumsi rokok tahunan meningkat dari 320,4 miliar batang tahun 2016 menjadi 334 miliar batang tahun 2017, dan mencapai 339,5 miliar batang tahun 2018. Jika dibagi jumlah perokok 89,570 juta, berarti perokok Indonesia rata-rata menghisap rokok 10,38 batang/orang/hari. Jika satu batang rokok berharga Rp 1.000, maka uang yang dibakar perokok Indonesia mencapai Rp 339,5 triliun per tahun atau Rp 930,137 miliar sehari. Konsumsi rokok sebanyak itu telah menyumbang lebih dari 230.000 kematian setiap tahun.

Pembelian rokok oleh kepala rumah tangga berdampak terhadap berkurangnya pengeluaran rumah tangga untuk makanan, pendidikan, dan kesehatan. Dengan pendapatan per kapita tahun 2020 hanya sebesar US\$ 3.870

(Rp 4,5 juta/bulan), seharusnya kepala rumah tangga lebih memilih menambah konsumsi protein hewani daripada nikotin rokok. Konsumsi protein penduduk Indonesia sebesar 62,19 g/orang/hari, terdiri protein nabati 46,41 g (74,63%) dan hewani 15,78 g (25,37%) yang berasal dari ikan 8,23 g, daging 4,2 g, dan telur dan susu 3,35 g. Konsumsi protein hewani tersebut masih tergolong rendah dan berada di bawah konsumsi protein hewani Thailand dan Filipina antara 40-50 g, dan Malaysia dan Brunei Darusalam sekitar 50-60 g. Rendahnya konsumsi protein hewani merupakan salah satu faktor pemacu tingginya angka prevalensi stunting di Indonesia. ***

Harian Bhirawa, Selasa 12 Oktober 2021

DAFTAR PUSTAKA

- 1 Sutawi, 2019. Pertanian Riwayatmu Kini. Malang Post, Sabtu 21 Sep 2019
- 2 Sutawi, 2020. Darurat Pangan Masa New Normal. Malang Post, 2 Juli 2020
- 3 Sutawi, 2020. Kontribusi Pertanian pada Era New Normal. Harian Bhirawa, 7 Juli 2020
- 4 Sutawi, 2020. Food Estate: Ketahanan Pangan Ketahanan Nasional. Malang Post, Senin 13 Juli 2020
- 5 Sutawi, 2020. Menhan, Food Estate dan Pesawat Tempur. Harian Bhirawa, 27 Agustus 2020
- 6 Sutawi, 2021. Ironis, Bangsa Tempe Impor Kedelai. Harian Bhirawa, 7 Januari 2021
- 7 Sutawi, 2021. Pupuk Bersubsidi Langka, Petani Merana. Malang Post Disway, 18 Maret 2021
- 8 Sutawi, 2021. Cabai Rawit Semakin Pahit. New Malang Pos, Rabu 24 Maret 2021
- 9 Sutawi. 2021. Importasi Beras, Marjinalisasi dan Kemiskinan Petani. Harian Bhirawa, Selasa 30 Maret 2021

- 10 Sutawi, 2021. Harga Jagung Melambung, Peternak Limbung. New Malang Pos, Sabtu, 18 September 2021
- 11 Sutawi, 2021. Pemberdayaan Petani Milenial. Harian Bhirawa, Selasa, 28 September 2021
- 12 Sutawi, 2020. Koperasi di Tangan Generasi Milenial. Harian Bhirawa, 15 Juli 2020
- 13 Sutawi, 2014. Kedaulatan Pangan Hasil Peternakan. Trobos, Selasa Juli 2014
- 14 Sutawi, 2015. Dinamika di Pasar Hewan. Trobos, Januari 2015
- 15 Sutawi, 2019. Empat Sehat Lima Sampoerna. Malang Post, Sabtu 3 Oktober 2019
- 16 Sutawi, 2019. Salah Gizi: Kurang Protein Banyak Nikotin. Malang Post, Minggu 19 Oktober 2019
- 17 Sutawi, 2020. Peternak Ayam Bahagia. Poultry Indonesia, Januari 2020
- 18 Sutawi, 2020. Idul Kurban untuk Ketahanan Pangan. Harian Bhirawa, 3 Agustus 2020
- 19 Sutawi, 2020. Berapakah Data Konsumsi Daging ? Poultry Indonesia, September 2020

- 20 Sutawi, 2020. Ketahanan Pangan Produk Peternakan Masa Pandemi Covid-19. Poultry Indonesia, Agustus 2020
- 21 Sutawi, 2021. Mengapa Impor Daging Sapi Terus Meningkat ? Harian Bhirawa, Selasa 2 Februari 2021
- 22 Sutawi, 2021. Stunting dan Fenomena Salah Gizi. Harian Bhirawa, Selasa 12 Oktober 2021

BIODATA PENULIS



Prof. Dr. Ir. Sutawi, M.P. lahir di Desa Bakaran Wetan Kecamatan Juwana Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah pada 22 April 1965, anak pertama dari tiga bersaudara, pasangan Bapak Kasir (90 tahun), seorang petambak di pantai utara Kecamatan Juwana, dan Emak Suyati (85 tahun), seorang ibu yang pernah menjadi *bakul iwak* di pasar ikan Kecamatan Juwana. Pendidikan dasar ditempuh di SDN I Bakaran Wetan (1977), pendidikan menengah di SMPN I Juwana (1981) dan SMAN I Pati (1984), kemudian melanjutkan pendidikan sarjana di Fakultas Peternakan UGM (1989), program magister di Program Studi Ekonomi Pertanian Program Pascasarjana UGM (1996), dan pendidikan doktor di Program Doktor Ilmu Ternak Minat Agribisnis Peternakan Program Pascasarjana Fakultas Peternakan UB dengan beasiswa BPPS Dikti Kemdikbud tahun 2008-2012. Sejak tahun 1990 menjadi dosen Kopertis Wilayah VII (sekarang Lembaga Layanan Dikti Wilayah VII) dpk. di Fakultas Peternakan

UMM, yang sekarang menjadi Fakultas Pertanian-Peternakan UMM. Selama menjadi dosen di UMM pernah menjabat Dekan Fakultas Peternakan UMM periode 1996-1998 dan Ketua Program Studi Magister Agribisnis Program Pascasarjana UMM periode 2006-2008. Gelar Profesor dicapai pada 31 Desember 2021. Komunikasi dapat disampaikan melalui email: sutawi@umm.ac.id

x x x
x x
x

